



# **RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH** **KABUPATEN BARITO SELATAN** **TAHUN 2023-2026**



**BUPATI BARITO SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**( R P D )**

**KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2023-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2022**



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2023-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan akan berakhir pada bulan Mei 2022, maka perlu Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Selatan.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

RPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN.

### **Pasal 3**

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM
  - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - e. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
  - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
  - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
  - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
  - i. BAB IX : PENUTUP
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

## **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

**BAB IV  
PERUBAHAN RPD**

**Pasal 6**

- (1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar;
  - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 7**

Perubahan RDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan RPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi.

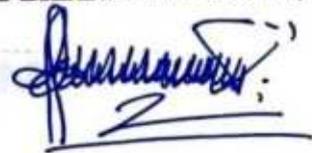
**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 16 Maret 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 16 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**EDY PURWANTO**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2023-2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga dokumen **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan 2023-2026** ini dapat diselesaikan. RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2023-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim perumus, Pokja beserta pihak-pihak lainnya yang telah membantu. Semoga upaya yang telah dilakukan menjadi langkah terbaik bagi kita bersama demi masa depan Kabupaten Barito Selatan. Besar harapan kami agar penyusunan dokumen RPD Kabupaten Barito Selatan ini dapat bermanfaat sebagai upaya dalam mendorong peningkatan kinerja daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, **Maret 2022**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Gambaran Umum .....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-31
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-56
2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-84
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Kinerja Masa Lalu .....	III-2
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-19
3.3. Kerangka Pendanaan .....	III-24
<b>BAB IV PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	IV-2
4.2. Urusan Wajib dan Pelayanan Dasar.....	IV-6
4.3. Urusan Pilihan .....	IV-13
4.4. Unsur pendukung Urusan Pemerintahan .....	IV-15
4.5. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan.....	IV-15
4.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	IV-16
4.7. Unsur Pemerintahan Umum.....	IV-17
4.8. Telaah Kebijakan dan Isu-isu Strategis .....	IV-17
4.9. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Selatan.....	IV-35

<b>BAB V TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>V-1</b>
5.1. TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1. Strategi Umum .....	VI-1
6.2. Strategi Berdasarkan Tujuan Dan Sasaran .....	VI-12
6.3. Arah Kebijakan .....	VI-14
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN</b>	
<b>PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>VII-1</b>
7.1. Latar Belakang .....	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah .....	VII-1
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan .....	VIII-1
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>IX-1</b>
9.1. Pedoman Transisi .....	IX-2
9.2. Kaidah Pelaksanaan.....	IX-2

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.....	II-2
Tabel 2.2.	Jarak Dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Barito Selatan.....	II-4
Tabel 2.3.	Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten Barito Selatan.....	II-5
Tabel 2.4.	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan .....	II-6
Tabel 2.5.	Jenis Tanah di Kabupaten Barito Selatan .....	II-8
Tabel 2.6.	Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan Di Kabupaten Barito Selatan .....	II-10
Tabel 2.7.	Rata-rata tekanan udara, kecepatan angin dan penyinaran Matahari menurut bulan di Kabupaten Barito Selatan .....	II-10
Tabel 2.8.	Rata-rata curah hujan dan hari hujan menurut bulan di kabupaten Barito Selatan .....	II-11
Tabel 2.9.	Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Barito Selatan.....	II-12
Tabel 2.10.	Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2015 .....	II-14
Tabel 2.11.	Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Barito Selatan.....	II-16
Tabel 2.12.	Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan .....	II-16
Tabel 2.13.	Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman .....	II-17
Tabel 2.14.	Potensi Pengembangan Kawasan Industri .....	II-17
Tabel 2.15.	Potensi Pengembangan Kawasan Wisata .....	II-18
Tabel 2.16.	Potensi Pariwisata di Kabupaten Barito Selatan .....	II-18
Tabel 2.17.	Potensi Kawasan Hutan .....	II-19
Tabel 2.18.	Kawasan Lindung di Kabupaten Barito Selatan .....	II-19
Tabel 2.19.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan	II-23
Tabel 2.20.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan .....	II-23
Tabel 2.21.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.....	II-24

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan.....	II-24
Tabel 2.23. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Barito Selatan.....	II-26
Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Barito Selatan.....	II-29
Tabel 2.25. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan, 2017-2019 .....	II-30
Tabel 2.26. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2015-2019 .....	II-32
Tabel 2.27. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2015-2019 .....	II-33
Tabel 2.28. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Selatan 2015-2019.....	II-34
Tabel 2.29. Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019 .....	II-36
Tabel 2.30. Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah .....	II-38
Tabel 2.31. PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019 .....	II-40
Tabel 2.32. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan 2015-2019 .....	II-45
Tabel 2.33. Capaian IPM Kabupaten Barito Selatan .....	II-48
Tabel 2.34. Capaian Kinerja Bidang Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan.....	II-51
Tabel 2.35. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan.....	II-54
Tabel 2.36. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Barito Selatan.....	II-55
Tabel 2.37. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Barito Selatan (%) .....	II-56
Tabel 2.38. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Selatan .....	II-57
Tabel 2.39. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Barito Selatan .....	II-58
Tabel 2.40. Rasio Guru/Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan.....	II-59
Tabel 2.41. Capain Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan.....	II-59

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.....	II-60
Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan .....	II-62
Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan.....	II-63
Tabel 2.45. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan .....	II-64
Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan .....	II-64
Tabel 2.47. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Barito Selatan .....	II-65
Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Tenaga kerja Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018 .....	II-65
Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan .....	II-66
Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Barito Selatan ...	II-67
Tabel 2.51. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.....	II-67
Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup .....	II-68
Tabel 2.53. Capaian Kinerja Urusa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan .....	II-68
Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.....	II-69
Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.....	II-70
Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.....	II-71
Tabel 2.57. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan .....	II-71
Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018 .....	II-72
Tabel 2.59. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan .....	II-72
Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Barito Selatan..	II-73
Tabel 2.61. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018.....	II-73

Tabel 2.62. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Barito Selatan.....	II-74
Tabel 2.63. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	II-74
Tabel 2.64. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Selatan.....	II-74
Tabel 2.65. Capaian Kinerja Urusan Parawisata Kabupaten Barito Selatan.....	II-75
Tabel 2.66. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2018.....	II-76
Tabel 2.67. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Barito Selatan.....	II-77
Tabel 2.68. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018 .....	II-77
Tabel 2.69. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Barito Selatan.....	II-78
Tabel 2.70. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.....	II-78
Tabel 2.71. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.....	II-79
Tabel 2.72. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan.....	II-80
Tabel 2.73. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Barito Selatan .....	II-81
Tabel 2.74. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan .....	II-82
Tabel 2.75. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Barito Selatan.....	II-83
Tabel 2.76. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan.....	II-83
Tabel 2.77. Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Bulan Kabupaten Barito Selatan .....	II-85
Tabel 2.78. NTP Kabupaten Barito Selatan .....	II-86
Tabel 2.79. Produktivitas Daerah Kabupaten Barito Selatan.....	II-88
Tabel 2.80. Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Barito Selatan .....	II-90
Tabel 2.81. Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan.....	II-91

Tabel 2.82. Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Non Produktif Terhadap Penduduk Usia Produktif Kabupaten Barito Selatan.....	II-92
Tabel 3.1. Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah.....	III-3
Tabel 3.2. Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021(Rupiah).....	III-4
Tabel 3.3. Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 .....	III-5
Tabel 3.4. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (dalam juta Rupiah) .....	III-10
Tabel 3.5. Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (Dalam Juta Rupiah).....	III-15
Tabel 3.6. Rasio Lancar Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (000) Rupiah.....	III-17
Tabel 3.7. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah).....	III-18
Tabel 3.8. Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (dalam juta Rupiah) .....	III-18
Tabel 3.9. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 .....	III-20
Tabel 3.10. Analisis Proporsi Belanja Daerah 2017-2020.....	III-20
Tabel 3.11. SILPA Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (Rupiah) .	III-21
Tabel 3.12. Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017-2021.....	III-21
Tabel 3.13. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran Tahun 2017-2021 .....	III-22
Tabel 3.14. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Barito Selatan Tahun Tahun 2017-2021 .....	III-24
Tabel 3.15. Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah)	III-26
Tabel 3.16. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2026 .....	III-27
Tabel 3.17. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2026 .....	III-28
Tabel 3.18. Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah) .....	III-29

Tabel 3.19.	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapistas Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ( <i>dalam Jutaan Rupiah</i> ) .....	III-30
Tabel 3.20.	Proyeksi Kerangka Pendanaan Pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah).....	III-32
Tabel 4.1.	Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Selatan (km) 2016.....	IV-2
Tabel 4.2.	Rasio Elektrifikasi (%) di Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Data Desa dan Data Rumah Tangga Tahun 2012-2016 .....	IV-8
Tabel 4.3.	Progres Kegiatan Bidang Kebersihan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016.....	IV-10
Tabel 4.4.	Perbandingan Indikator Terpilih Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah 2015-2016.....	IV-12
Tabel 4.5.	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.....	IV-16
Tabel 4.6.	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Barito Selatan.....	IV-17
Tabel 4.7.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2020 .....	IV-20
Tabel 4.8.	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah Sesuai RPJMN 2015-2019.....	IV-29
Tabel 5.1.	Penjabaran Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	V-4
Tabel 6.1.	PENJABARAN TUJUAN DAN SASARAN KE STRATEGI.....	VI-12
Tabel 7.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Selatan 2023-2026.....	VII-5
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 .....	VIII-3
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 .....	VIII-4
Tabel 8.3.	Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 .....	VIII-8

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan .....	II-2
Gambar 2.2.	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Selatan .....	II-3
Gambar 2.3.	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan .....	II-5
Gambar 2.4.	Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan.....	II-9
Gambar 2.5.	Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Barito Selatan.....	II-13
Gambar 2.6.	Tipe Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan.....	II-14
Gambar 2.7.	Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan .....	II-15
Gambar 2.8.	Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Selatan.....	II-21
Gambar 2.9.	Proporsi Penduduk di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019.....	II-22
Gambar 2.10.	Piramida Penduduk Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019.....	II-25
Gambar 2.11.	Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2019 .....	II-28
Gambar 2.12.	Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 .....	II-29
Gambar 2.13.	Proporsi Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja di Kabupaten Barito Selatan .....	II-31
Gambar 2.14.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah .....	II-35
Gambar 2.15.	Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 .....	II-37
Gambar 2.16.	Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tengah (persen) .....	II-39
Gambar 2.17.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016-2019 (%).....	II-40
Gambar 2.18.	Perkembangan Angka Inflasi Kalimantan Tengah (%).....	II-42
Gambar 2.19.	Perkembangan Inflasi/Deflasi Gabungan Dua Kota HK Tahun 2019 (%).....	II-42
Gambar 2.20.	Perkembangan Inflasi Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Terhadap Inflasi Di Tingkat Nasional 2015-2019 .....	II-43
Gambar 2.21.	Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan 2015-2019 .....	II-44

Gambar 2.22.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 .....	II-45
Gambar 2.23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan 2015-2019.....	II-46
Gambar 2.24.	Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2019 .....	II-47
Gambar 2.25.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	II-49
Gambar 2.26.	IPM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019.....	II-49
Gambar 2.27.	Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Melek Huruf Kabupaten Barito Selatan 2016-2020 (%) .....	II-51
Gambar 2.28.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2015-2019 .....	II-52
Gambar 2.29.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019.....	II-53
Gambar 2.30.	Umur Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan.....	II-54
Gambar 2.31.	Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Barito Selatan 2018-2019 .....	II-76
Gambar 2.32.	Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Bulan Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah .....	II-86
Gambar 2.33.	Nilai Tukar Petani Per Sub Sektor di Kabupaten Barito Selatan 2018-2019 .....	II-87
Gambar 4.1.	Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Dalam Pembentukan PDRB Kalimantan Tengah 2016...IV-12	
Gambar 6.1.	Strategi Umum RPD Kabupaten Barito Selatan (Tahun 2023-2026) .....	VI-1
Gambar 6.2.	Tema pembangunan 2023-2926 .....	VI-15

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu permasalahan utama sistem perencanaan di Indonesia adalah sulitnya melakukan penyelerasan dan sinergitas antara program prioritas Nasional dan Daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakseragaman periodisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Atas dasar permasalahan tersebut terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu amanatnya adalah akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional pada Tahun 2024.

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni banyaknya daerah yang periodisasi Kepala Daerah dan RPJMD nya berakhir sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada Tahun 2024, sehingga akan ada kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah sejak berakhirnya RPJMD Tahun 2022 sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024.

Walaupun dalam rentang waktu tersebut akan ada Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Gubernur, tetap saja Pejabat Sementara tidak dapat membuat/menyusun arah kebijakan Pembangunan daerah untuk Kabupaten/Kota yang di pimpinannya, sebagaimana ketentuan pada Permendagri No 86 Tahun 2017 pada Pasal 12 ayat (2) "RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN".

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang untuk selanjutnya disebut RPD Kabupaten Barito Selatan disusun dengan pendekatan teknokratis dengan tetap memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

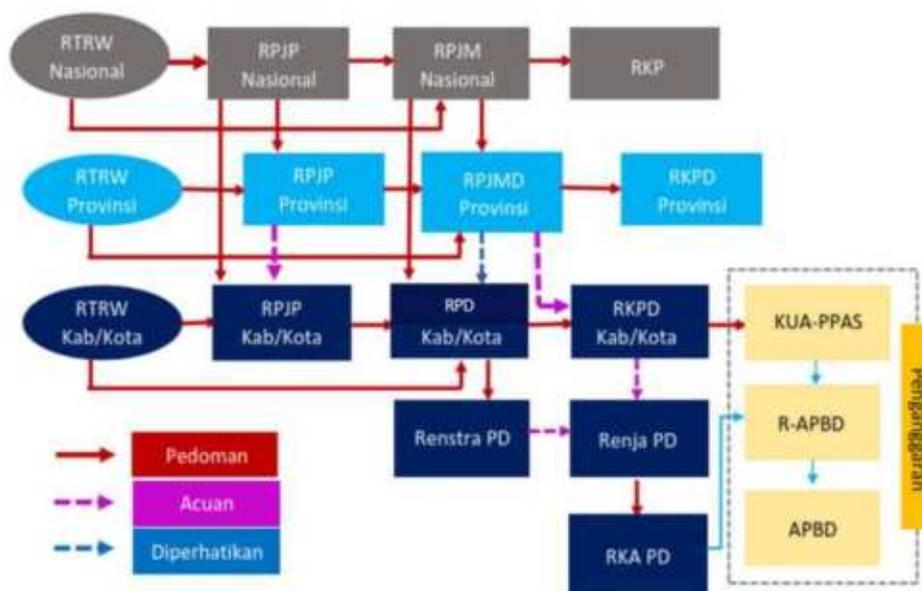
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam proses penyusunannya, RPD Kabupaten Barito Selatan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2026, dan RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, serta Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2043. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut 1.1 ini :

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antar dokumen Perencanaan**



Sumber : Permendagri 86/2017, diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut, hubungan masing-masing dokumen perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPD kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.
2. RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2006-2026, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
3. RPD dan Renstra PD merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD. Implementasi dari RPD Kabupaten Barito Selatan dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.
4. RPD merupakan pedoman untuk menyusun RKPD dari tahun ketahun. Sasaran dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program Pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. PD menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja PD.
5. RPD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan selaras dengan rencana penataan ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang melalui pendekatan pembangunan regional dengan memperhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu serta kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 antara lain :

1. Sebagai arah pembangunan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2026.
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
4. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendaikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 antara lain :

1. Penyesuaian dengan perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan, KUA dan PPAS serta APBD terutama untuk Tahun Anggaran 2023-2026;
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, sistematika dokumen RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN
- BAB II     GAMBARAN UMUM
- BAB III    GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V     TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI    STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII   KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII   KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IX    PENUTUP

## **BAB II** **GAMBARAN UMUM**

### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Pada bagian ini akan menyajikan dan menjelaskan sejarah pembentukan Kabupaten Barito Selatan secara singkat yang kemudian dilanjutkan dengan uraian data mengenai gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Selatan yang meliputi aspek geografi dan demografi serta berbagai aspek indikator kinerja penyelenggaraan daerah.

Secara historis, Kabupaten Barito Selatan didirikan pada tanggal 21 September 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, yang merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi dalam suatu wilayah Kabupaten. Pada saat awal dibentuk, Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.266.400 hektar.

Pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan kemudian dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur.

#### **2.1.1. Aspek Letak, Kondisi Geografis, Karakteristik Lokasi dan Demografi**

##### **2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Setelah pemekaran seperti yang telah diuraikan di atas, wilayah Kabupaten Barito Selatan kemudian terbagi ke dalam 6 (enam) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Jenamas, dan Kecamatan Dusun Hilir.

Ke enam Kecamatan tersebut terbagi ke dalam 86 Desa dan 7 Kelurahan. Berikut ini tabel sebaran Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan:

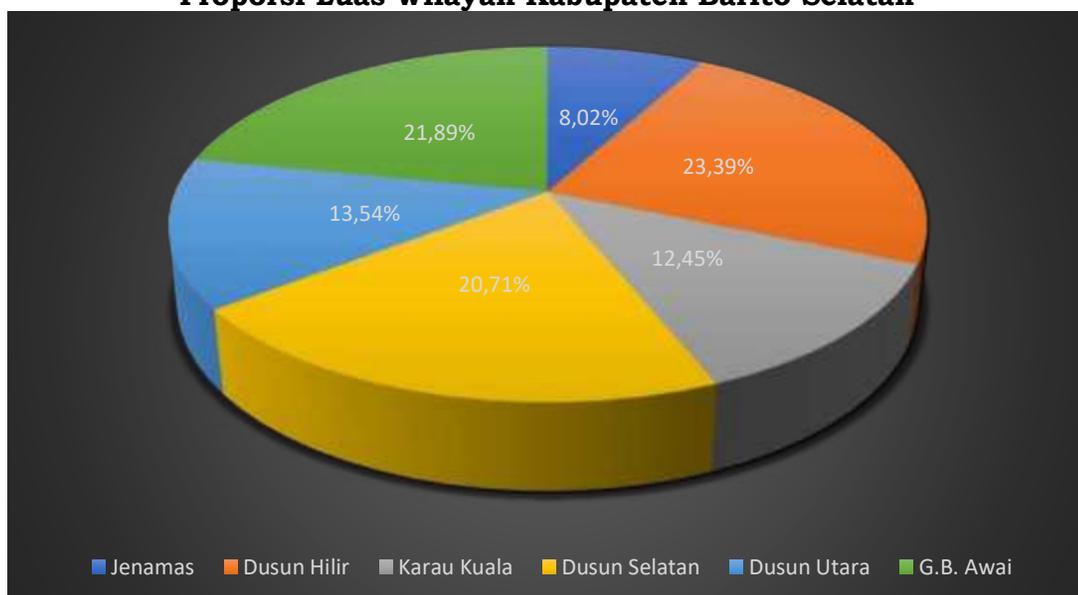
**Tabel 2. 1**  
**Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Barito Selatan**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Jenamas	Rantau Kujang	4	1
2.	Dusun Hilir	Mengkatip	9	1
3.	Karau Kuala	Bangkuang	10	1
4.	Dusun Selatan	Buntok	24	3
5.	Dusun Utara	Pendang	18	1
6.	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	21	-
<b>Barito Selatan</b>			<b>86</b>	<b>7</b>

*Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, wilayah Kabupaten Barito Selatan mencakup wilayah yng secara geografis terletak pada 1°15'35,625" LS dan 114°35'48,600" BT - 115°36'35,700 BT, dengan luas Kabupaten Barito Selatan yaitu 883.000 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu) hektar. Dengan rincian luas Wilayah Kecamatan Jenamas 70.800 hektar, Kecamatan Dusun Hilir 206.500 hektar. Kecamatan Karau Kuala 109.900 hektar, Kecamatan Dusun Selatan 119.600 hektar, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai 193.300 hektar. Proporsi luas wilayah Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2. 1**  
**Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Barito Selatan**



*Sumber : Barito Selatan Dalam Angka, 2022 diolah.*

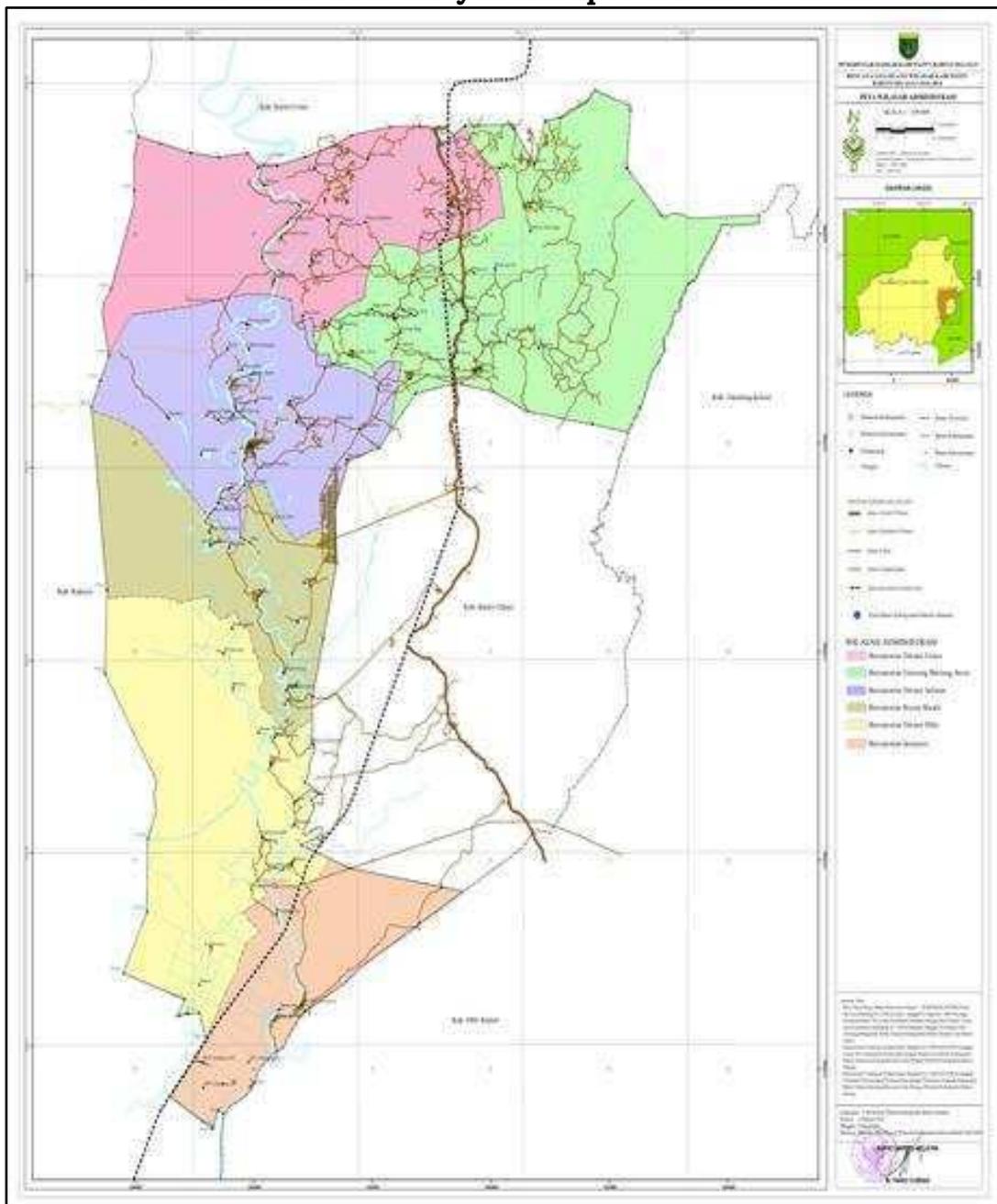
Selanjutnya, secara administratif, Kabupaten Barito Selatan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas
- Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas.
- Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar 2.2 berikut ini.

**Gambar 2. 2**

**Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Selatan**



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034

### 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Barito Selatan terletak membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis di antara 1°20'LS- 2°35'LS dan 114°-115° BT. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, dengan panjang 900 km dan rata-rata kedalaman 8 m melewati lima dari enam kecamatan yang ada. Panjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang khusus melintasi Wilayah Administrasi Barito Selatan sekitar 233,64 km yang berpotensi bagi perikanan budidaya dan tangkap, daerah (inti) konservasi, juga bisnis agrowisata. Adapun jarak antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 2**  
**Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota**  
**Kabupaten Kabupaten Barito Selatan**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota (km)
1.	Jenamas	Rantau Kujang	150
2.	Dusun Hilir	Mengkatip	143
3.	Karau Kuala	Bangkuang	77
4.	Dusun Selatan	Buntok	1
5.	Dusun Utara	Pendang	57
6.	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	48

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020*

### 2.1.1.3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah dengan kemiringan lahan berkisar antara 0-40 persen. Kemiringan lahan 15-40 persen berada di sebagian wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang merupakan daerah perbukitan. Pada bagian tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai sampai miring, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara.

Bagian utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Sejalan dengan fisiografi wilayah, pada areal yang bertopografi bergunung berada pada daerah-daerah di kawasan atas, sebaliknya pada areal bertopografi rendah berada pada daerah-daerah di kawasan bawah. Terkait dengan kemiringan lahan serta luasan masing-masing kelerengan, dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

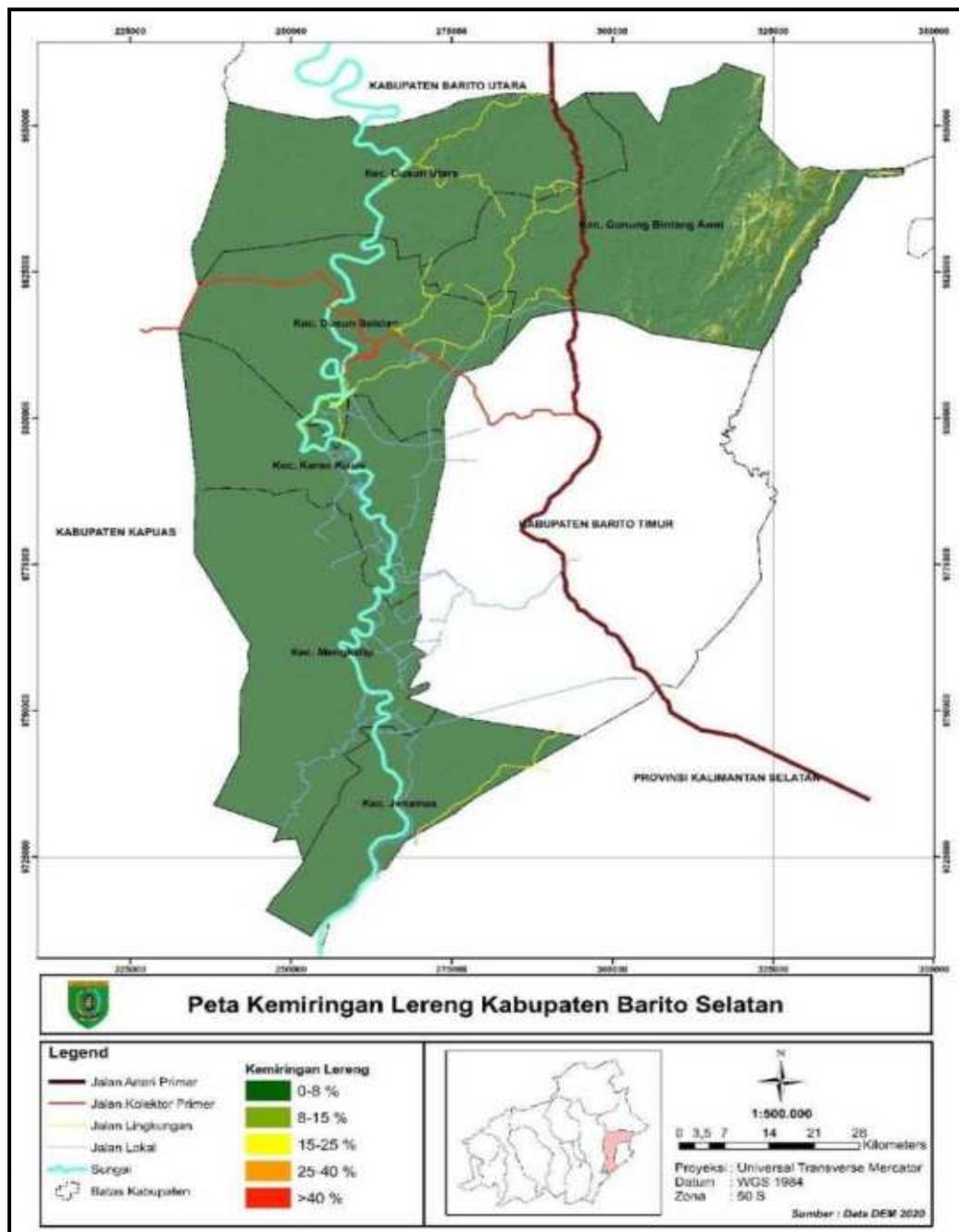
**Tabel 2. 3**  
**Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan di**  
**Kabupaten Barito Selatan**

No.	Kemiringan Lahan	Luas (Ha)
1	0 - 2%	555.747
2	2 - 15%	199.075
3	15 - 40%	107.195
4	>40%	20.983
<b>Jumlah</b>		<b>883.000</b>

Sumber : RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Berdasarkan data di atas, kemiringan lahan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 2.3**  
**Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barito Selatan**



Sumber : Data DEM Tahun 2020, diolah

Selanjutnya, terkait dengan ketinggian wilayah yang ada di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Gunung Bintang Awai merupakan wilayah dengan ketinggian tertinggi yakni sebesar 55 meter di atas permukaan laut (mdpl). Untuk wilayah dengan ketinggian terendah ada di Kecamatan Jenamas yakni sebesar 27 meter di atas permukaan laut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 4**  
**Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (m)
1	Jenamas	Rantau Kujang	27
2	Dusun Hilir	Mengkatip	31
3	Karau Kuala	Bengkuang	33
4	Dusun Selatan	Buntok	35
5	Dusun Utara	Pendang	38
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	55

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020*

#### 2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Barito Selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Informasinya untuk pengembangan wilayah meliputi potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung dan kerawanan fisik. Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanannya terdiri dari: Aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan bergambut; Batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu, terdapat Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik; Batuan beku; Batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara; Batuan metamorf. Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- Aluvial, dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliran sungai Barito, mulai dari bagian Selatan sampai ke Utara sungai Barito. Tanah endapan sungai ini merupakan suatu tanggul sungai dataran banjir, terbentuk dari bahan induk liat dan pasir. Lapisan-lapisan tanahnya

terlihat jelas bentuk wilayah datar, warna coklat tua sampai coklat kekuningan, tekstur agak halus, drainase agak terlambat dan reaksi tanah masam. Lebih masuk dari tepi sungai daerahnya lebih rendah dan sering tergenang, sehingga dijumpai tanah aluvial hidromorfik kelabu yang memanjang disamping tanah aluvial, bersolum dalam, terbentuk warna kelabu tekstur halus sampai agak kasar, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Setelah aluvial hidromorfik terdapat tanah *gley* yang berasosiasi dengan endapan tanah organik yang telah mengalami pelapukan lanjut. Tanah yang terbentuk dikenal sebagai tanah *gley* humus. Tanah ini sering berasosiasi dengan organosol sehingga disebut tanah kompleks organosol - *gley* humus, mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus sampai sedang, drainase terhambat dan reaksi tanah masam.

- Regosol, dijumpai menyebar dibagian tengah kabupaten Barito Selatan. Tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.
- Padsolik, merupakan jenis tanah yang cukup luas di jumpai menyebar di tengah sampai hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak sampai agak berbukit, warna tanah coklat sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangkal dan berbatu, membentang di puncak perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 meter keadaan medan yang terjal dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi yang cukup berat sehingga terjadilah tanah dangkal berbatu.
- Organosol, merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat di sebelah Barat sungai Barito mulai dari selatan hingga ke bagian Utara Kabupaten Barito Selatan. Ketebalan gambut umumnya dalam (90 cm) terdapat pada bentuk wilayah datar dan di daerah cekungan, warna merah kehitaman sampai coklat tua, drainase sangat terhambat, reaksi tanah sangat masam.

- Podsolik, terletak menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kwarsa) pada bentuk wilayah berombak dan agak berombak, warna coklat tua kemerahan sampai kuning pucat, tekstur sedang, drainase agak terhambat dan reaksi masa.
- Podsol, terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tektur yang halus, berwarna kecoklatan.
- Regosol, tanah tersebut terletak di Utara bagian tengah dari kabupaten Barito selatan, yaitu kecamatan Dusun Utara.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah dan penyebarannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 5**  
**Jenis Tanah di Kabupaten Barito Selatan**

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Aluvial	263.151,5	41,5
2.	Organosol	131.892,8	20,8
3.	Podsolik	71.019,2	11,2
4.	Podsol	48.925,7	7,7
5.	Litosol	39.948,3	6,3
6.	Kambisol	27.266,3	4,3
7.	Regosol	52.630,3	8,2

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan, 2009

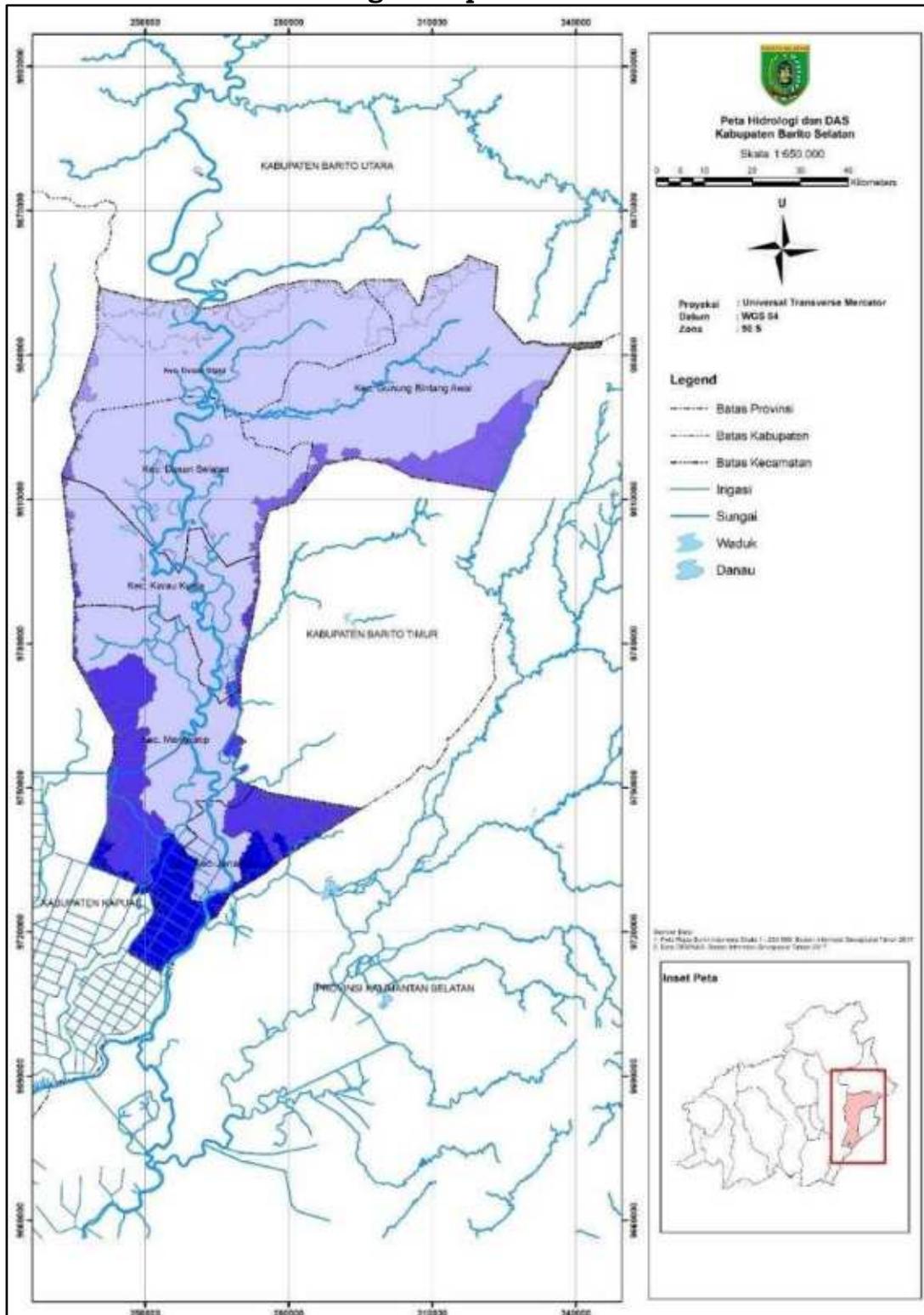
#### 2.1.1.5. Hidrologi

Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai *verval* yang rendah hingga ke sektor tengah maka jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh, khususnya pada musim kemarau. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke bagian tengah; pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan *verval* tinggi bahkan beriam.

Dengan demikian, kawasan hulu sangat berpotensi bagi pembangkit listrik tenaga air disamping sebagai sumber air mineral. Kawasan berawa disektor tengah dan pesisir berfungsi retensi saat kelebihan air musim penghujan. Dengan satu sungai besar (Sungai Barito) dan banyak sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu

ciri khas Kabupaten Barito Selatan. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8m merupakan sungai terpanjang di Barito Selatan. Peta hidrologi Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 4**  
**Peta Hidrologi Kabupaten Barito Selatan**



Sumber : Peta RBI skala 1 : 250.000 dan Data Demnas 2017, diolah

#### 2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Barito Selatan merupakan wilayah yang beriklim tropis sehingga sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti suhu, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, penyinaran matahari dan curah hujan ikut mempengaruhi kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi klimatologi di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 2. 6**  
**Rata-rata Suhu dan kelembaban Udara Menurut Bulan**  
**di Kabupaten Barito Selatan**

No.	Bulan	Suhu(°C)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
1	Januari	34,0	21,6	27,7	100,0	54,0	83,2
2	Pebruari	34,6	22,5	28,3	99,0	54,0	81,6
3	Maret	34,6	22,4	28,1	100,0	51,0	81,3
4	April	35,0	21,9	28,7	100,0	50,0	80,1
5	M e i	34,9	22,4	28,7	100,0	56,0	81,5
6	J u n i	34,6	20,3	28,6	100,0	54,0	80,7
7	J u l i	34,7	22,0	28,0	100,0	46,0	82,3
8	Agustus	35,2	22,0	27,7	100,0	54,0	83,4
9	September	34,2	22,2	27,8	100,0	56,0	83,4
10	Oktober	35,0	22,5	28,4	100,0	52,0	82,7
11	Nopember	34,4	22,2	27,9	100,0	57,0	83,5
12	Desember	34,6	22,0	27,9	99,0	58,0	83,9

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2022

**Tabel 2. 7**  
**Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran**  
**Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan**

No.	Bulan	Tekanan Udara (mb)			Kecepatan Angin (Knots)	Arah Terbanyak	Penyinaran Matahari (%)
		Maks	Min	Rata-rata			
1	Januari	1009,9	1001,2	1005,7	23,0	Calm	2,3
2	Pebruari	1010,9	1001,5	1006,3	9,0	Calm	2,1
3	Maret	1011,2	1000,4	1006,4	11,0	Calm	2,3
4	April	1011,6	1001,5	1006,8	8,0	Calm	2,3
5	M e i	1013,0	1000,8	1005,9	9,0	Calm	2,2
6	J u n i	1011,7	1002,7	1007,3	10,0	Calm	2,1
7	J u l i	1010,9	1001,8	1006,7	8,0	Calm	2,2
8	Agustus	1011,5	1002,3	1007,3	11,0	Calm	2,3
9	September	1025,5	1000,5	1006,8	12,0	Calm	2,2
10	Oktober	1012,4	1000,6	1006,4	10,0	Calm	2,6
11	Nopember	1011,0	1000,6	1005,8	11,0	Calm	2,5
12	Desember	1011,3	1001,7	1007,0	13,0	Calm	2,3

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2022

**Tabel 2. 8**  
**Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan**  
**di Kabupaten Barito Selatan**

No.	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Curah Hujan Harian Maks (mm)
1	Januari	25	198,8	26,3
2	Pebruari	20	286,3	32,8
3	Maret	19	312,7	37,4
4	April	16	224,9	46,2
5	M e i	19	263,3	40,7
6	J u n i	15	128,9	41,9
7	J u l i	17	80,7	30,8
8	Agustus	21	205,2	33,4
9	September	21	311,3	29,3
10	Oktober	17	176,0	40,5
11	Nopember	22	405,6	32,0
12	Desember	24	280,6	31,5

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022*

#### 2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan penataan ruang, dengan adanya tatanan penggunaan lahan maka penataan ruang akan semakin terkendali dan teratur. Kondisi dimana terjadi ketidaksesuaian lahan dengan kemampuan tanah juga dapat mempengaruhi penataan ruang. Penggunaan lahan merupakan dasar penentuan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang pada hakekatnya merupakan gabungan antara aktivitas masyarakat dengan tingkat teknologi, jenis usaha, serta jumlah manusia.

Kabupaten Barito Selatan berdasarkan luas kawasan hutan dan perairan mempunyai luas 702.009,9 Hektar yang terbagi dalam beberapa kawasan, yaitu hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, dan hutan produksi (Hutan produksi terbatas, tetap dan dapat dikonversi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

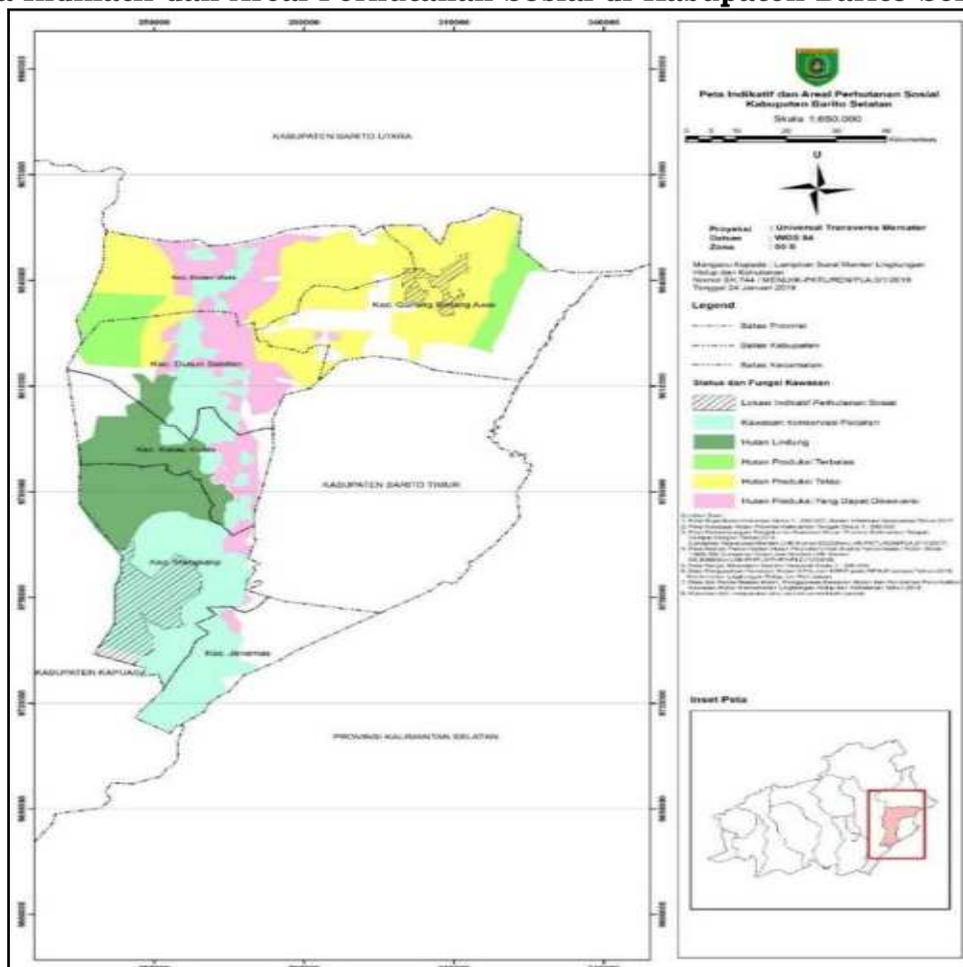
**Tabel 2. 9**  
**Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Barito Selatan**

No.	Kawasan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	181,602
2	Suaka Alam dan Pelastarian Alam	76,941
3	Hutan Produksi	
	a. Hutan Produksi Terbatas	64,278
	b. Hutan Produksi Tetap	220,687
	c. Dapat dikonversi	62,417

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022.*

Sementara itu apabila mengacu kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 Tanggal 24 Januari 2019 terkait dengan area perhutanan sosial provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Barito Selatan memiliki status dan fungsi kawasan yang terdiri dari hutan lindung yang berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Mangkatip dan Kecamatan Karau Kuala serta Kecamatan Dusun Selatan, hutan produksi terbatas yang berada di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Dusun Selatan. Sementara untuk Hutan produksi tetap berada di wilayah Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan serta Kecamatan Gunung Bintang Awai serta hutan produksi yang dapat dikonversi tersebar di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Mengkatip dan Kecamatan Jenamas. Terkait dengan status dan fungsi kawasan bisa dilihat pada gambar 2.5 berikut ini.

**Gambar 2. 5**  
**Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Barito Selatan**



Sumber : Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019, diolah

Hutan alam Barito Selatan memiliki berbagai macam ragam jenis pohon dan hasil hutan ikutan lainnya yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi khususnya kayu, sedangkan hasil hutan ikutan seperti berbagai jenis rotan, damar, gaharu dan lain-lain. Produksi kayu hutan menurut jenis produksi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 10**  
**Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi**  
**di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2011-2015**

Tahun	Kayu Bulat (m <sup>3</sup> )	Kayu Gergajian (m <sup>3</sup> )	Kayu Lapis
2011	5.217,64	905,79	-
2012	7.411,73	267,19	-
2013	888,83	583,38	-
2014	1.706,20	774,01	-
2015	2.161,51	121,61	-

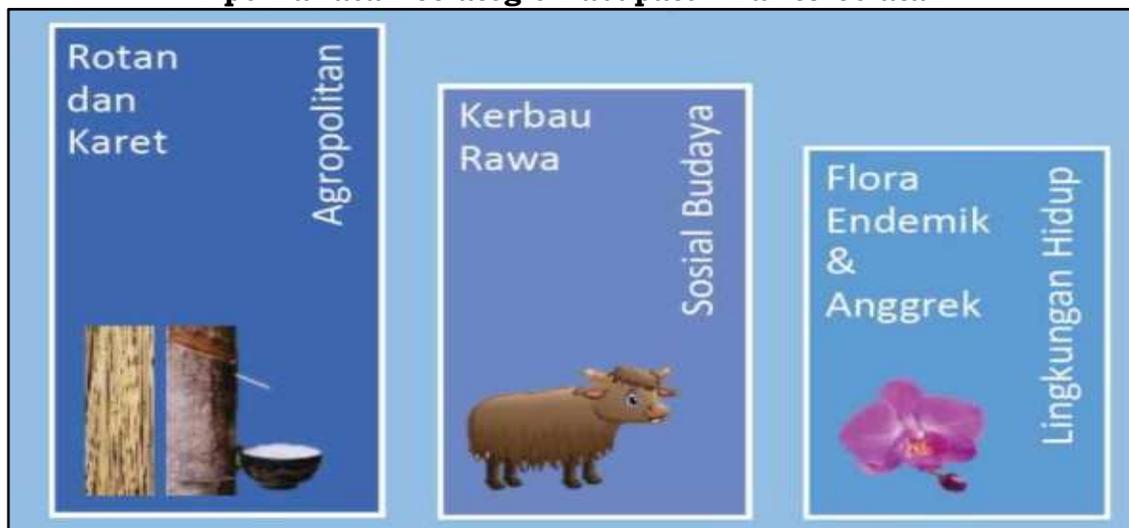
Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020

#### 2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

##### 1. Kawasan Strategis

Pengembangan wilayah merupakan strategi dalam memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas wilayah serta kemajuan dari wilayah itu sendiri. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, terdapat tiga tipe kawasan strategis Seperti yang ada pada gambar 2.6 di bawah ini.

**Gambar 2. 6**  
**Tipe Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan**



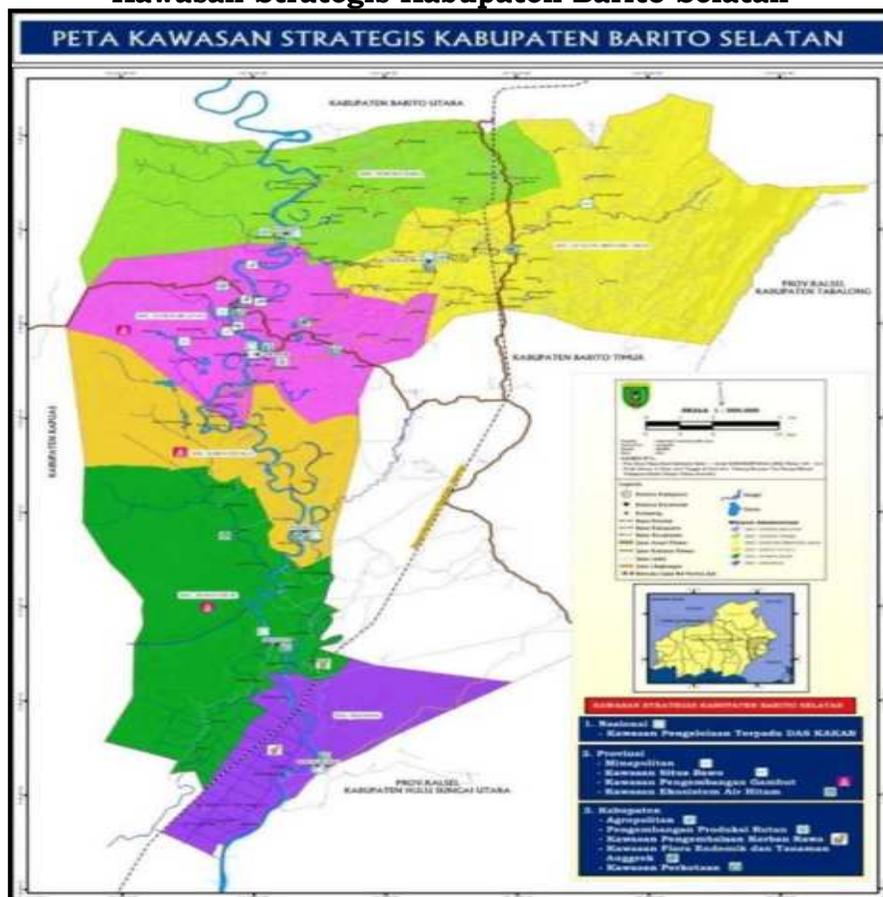
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2019

Berdasarkan gambar di atas, kawasan strategis Kabupaten Barito Selatan terbagi melalui tiga sudut pandang yakni sebagai berikut :

1. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi yakni Kawasan agropolitan berbasis utama pada sektor kehutanan (rotan) dan perkebunan (karet) di Kawasan Pendang dan Tabak kanilan, dengan pusat pengembangan produksi dan pengumpul rotan di Buntok dan Mangkatip.
2. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, yakni kawasan strategis Penggembalaan Kerbau Rawa di Tampulang, Ranga Ilung, dan Kalanis.
3. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Barito Selatan meliputi kawasan flora endemik dan taman anggrek di Malawen. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdapat di Desa Bintang Ara (Malungai Dalam) yaitu di Situs Gunung Bawo.

Terkait dengan penetapan kawasan strategis di Kabupaten Barito Selatan, secara visual bisa dilihat pada gambar 2.7 berikut ini :

**Gambar 2. 7**  
**Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan**



Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034

## 2. Kawasan Pertanian

Untuk kawasan pertanian sub tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan kering dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Barito Selatan. Apabila dikaitkan dengan ketersediaan air untuk irigasi, dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Barito Selatan yang sesuai untuk dikembangkan sebagai pertanian lahan basah adalah wilayah yang berada di dekat aliran sungai, selain itu, keberadaan danau-danau alami bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengairan agar lahan pertanian yang ada menjadi lebih produktif. Terkait dengan potensi kawasan pertanian di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel di berikut.

**Tabel 2. 11**  
**Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Barito Selatan**

No	Jenis Pengembangan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan peruntukkan tanaman pangan	Seluruh kecamatan	7.105,38
2.	Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat	1. Kec. Dusun Utara 2. Kec. Gunung Bintang Awai 3. Kec. Dusun Selatan, 4. Kec. Karau Kuala 5. Kec. Dusun Hilir 6. Kec. Jenamas	7.481,65
3.	Kawasan peruntukkan perkebunan besar	Seluruh kecamatan	64.808,12
4.	Kawasan peruntukkan peternakan	1. Kec. Jenamas 2. Kec. Dusun Hilir	10.151,18
5.	Kawasan peruntukkan perikanan	Di sungai dan danau setiap kecamatan	745,62

*Sumber Materi Teknis RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034*

## 3. Kawasan Pertambangan

Potensi galian/bahan tambang yang ada di Kabupaten Barito Selatan yang dapat dioptimalkan adalah batu bara dan bahan galian yang berasal dari permukaan tanah dan bukan logam. Untuk batu bara sendiri, diperkirakan tersimpan potensi kurang lebih 250 juta ton (terduga)/60 juta ton (terukur). Adapun wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan dengan peruntukkan pertambangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 12**  
**Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan**

No	Jenis Pengembangan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Peruntukkan Pertambangan Batu Bara	Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara	93.400,43

*Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034*

#### 4. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Barito Selatan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan jenis pengembangan yakni kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 13**  
**Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman**

No	Jenis Pengembangan	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan permukiman perdesaan	Seluruh kecamatan	24.655,45
2.	Kawasan permukiman perkotaan	Di arahkan di Desa Sababilah, Mangaris dan Sanggu Kec. Dusun Selatan	1.500,20
3.	Kawasan permukiman perkotaan	Kota Buntok	3.831,46

*Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034*

#### 5. Kawasan Industri

Potensi pengembangan Kawasan industri di Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi kawasan industri besar, kawasan industri sedang dan kawasan industri rumah tangga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 14**  
**Potensi Pengembangan Kawasan Industri**

No	Jenis Pengembangan	Jenis dan Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan peruntukkan industri besar	1)Kawasan industri karet di Kec. Dusun Selatan, 2)Kawasan Industri CPO di Kec. Dusun Utara 3)Kawasan industri pencampuran batu bara di sepanjang Sungai Barito Kec. Dusun Utara, Kec. Dusun Selatan, Kec. Karau Kuala dan Kec. Dusun Hilir	2.120,35
2.	Kawasan peruntukkan industri sedang	1)Kawasan industri rotan di Kec.Dusun Hilir, Kec. Dusun Utara dan Kec. Dusun Selatan 2)Kawasan industri kayu di Kec. Gunung Bintang Awai 3)Kawasan industri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di Kec. Dusun Selatan	
3.	Kawasan peruntukkan industri rumah tangga	1)Kawasan industri anyaman rotan dan purun di Kec. Karau Kuala, Kec. Jenamas, Kec. Dusun Hilir dan Kec. Dusun Selatan 2)Kawasan industri penganekeagaman pangan di Kec. Dusun Selatan dan Kec. Gunung Bintang Awai	

*Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034*

## 6. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Adapun terkait dengan lokasi dari masing-masing potensi wisata bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 15**  
**Potensi Pengembangan Kawasan Wisata**

No	Jenis Pengembangan	Jenis dan Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan peruntukkan wisata alam	1) Wisata jelajah goa di Desa Bintang Ara dan Desa Bipak Kali 2) Wisata air terjun Senango di Desa Bintang Ara	50,80
2.	Kawasan peruntukkan wisata budaya	1) Wisata situs Gunung Bawo di Desa Bintang Ara	
3.	Kawasan wisata buatan	1) Wisata kuliner di Desa Pamait	

*Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034*

Sementara itu, potensi pariwisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan apabila mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh BPS antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2. 16**  
**Potensi Pariwisata di Kabupaten Barito Selatan**

No	Objek Wisata	Lokasi
1.	Air Terjun Senango	Desa Bintang Ara, Gunung Bintang Awai
2.	Ekosistem Air Hitam	Kelurahan Mengkatip, Dusun Hilir
3.	Tugu Christian Simbar	Desa Madara, Dusun Selatan
4.	Danau Desa Madara	Desa Madara, Dusun Selatan
5.	Danau Sababilah	Desa Sababilah, Dusun Selatan
6.	Dam Uang	Desa Muka Haji, Gunung Bintang Awai
7.	Goa Liang Lempang	Desa Palurejo, Gunung Bintang Awai
8.	Danau Sanggu-Malawen	Desa Sanggu, Dusun Selatan
9.	Danau Bundar	Desa Bundar, Dusun Utara
10.	Danau Ganting	Desa Danau Ganting, Dusun Selatan
11.	Kampung Terapung Bambaler	Desa Baru, Dusun Selatan
12.	Goa Liang Santangan	Desa Sei Paken, Gunung Bintang Awai
13.	Kawasan Kerbau Rawa	Desa Tampulang, Jenamas
14.	Danau Sadar	Desa Danau Sadar, Dusun Selatan
15.	Kawasan Adat Suku Bawo	Desa Bintang Ara, Gunung Bintang Awai
16.	Banyu Habang	Desa Sanggu, Dusun Selatan
17.	Waterboom Nagoya	Desa Sanggu, Dusun Selatan
18.	Batang Nan Sarunai	Desa Sanggu, Dusun Selatan
19.	Rawen (Rawa Wendu)	Desa Sanggu, Dusun Selatan

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2020*

## 7. Kawasan Hutan

Potensi kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan secara lengkap bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 17**  
**Potensi Kawasan Hutan**

No	Jenis Pengembangan	Jenis dan Lokasi	Luas (Ha)
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1) Kec. Gunung Bintang Awai 2) Kec. Dusun Utara 3) Kec. Dusun Selatan	85.070,30
2.	Hutan Produksi Tetap (HP)	1) Kec. Dusun Utara 2) Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Karau Kuala	203.445,40
3.	Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK)	1) Kec. Dusun Selatan 2) Kec. Karau Kuala 3) Kec. Dusun Hilir 4) Kec. Jenamas	93.378,90
4.	Kawasan peruntukkan hutan rakyat/hutan hak	1) Kec. Gunung Bintang Awai 2) Kec. Dusun Selatan	1) 288,02 2) 280,12
5.	Kawasan areal penggunaan lain	1) Kec. Dusun Utara 2) Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Karau Kuala 5) Kec. Dusun Hilir 6) Kec. Jenamas	54.428,25

*Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034*

## 8. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan alokasi ruang di Kabupaten Barito Selatan dengan peruntukkan sebagai kawasan lindung adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 18**  
**Kawasan Lindung di Kabupaten Barito Selatan**

No	Jenis Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kawasan hutan lindung	1) Kec. Dusun Hilir 2) Kec. Karau Kuala 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Gunung Bintang Awai	67.566,60
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan resapan air)	1) Kec. Dusun Utara 2) Kec. Gunung Bintang Awai 3) Kec. Dusun Selatan 4) Kec. Karau Kuala 5) Kec. Dusun Hilir	2.789,30

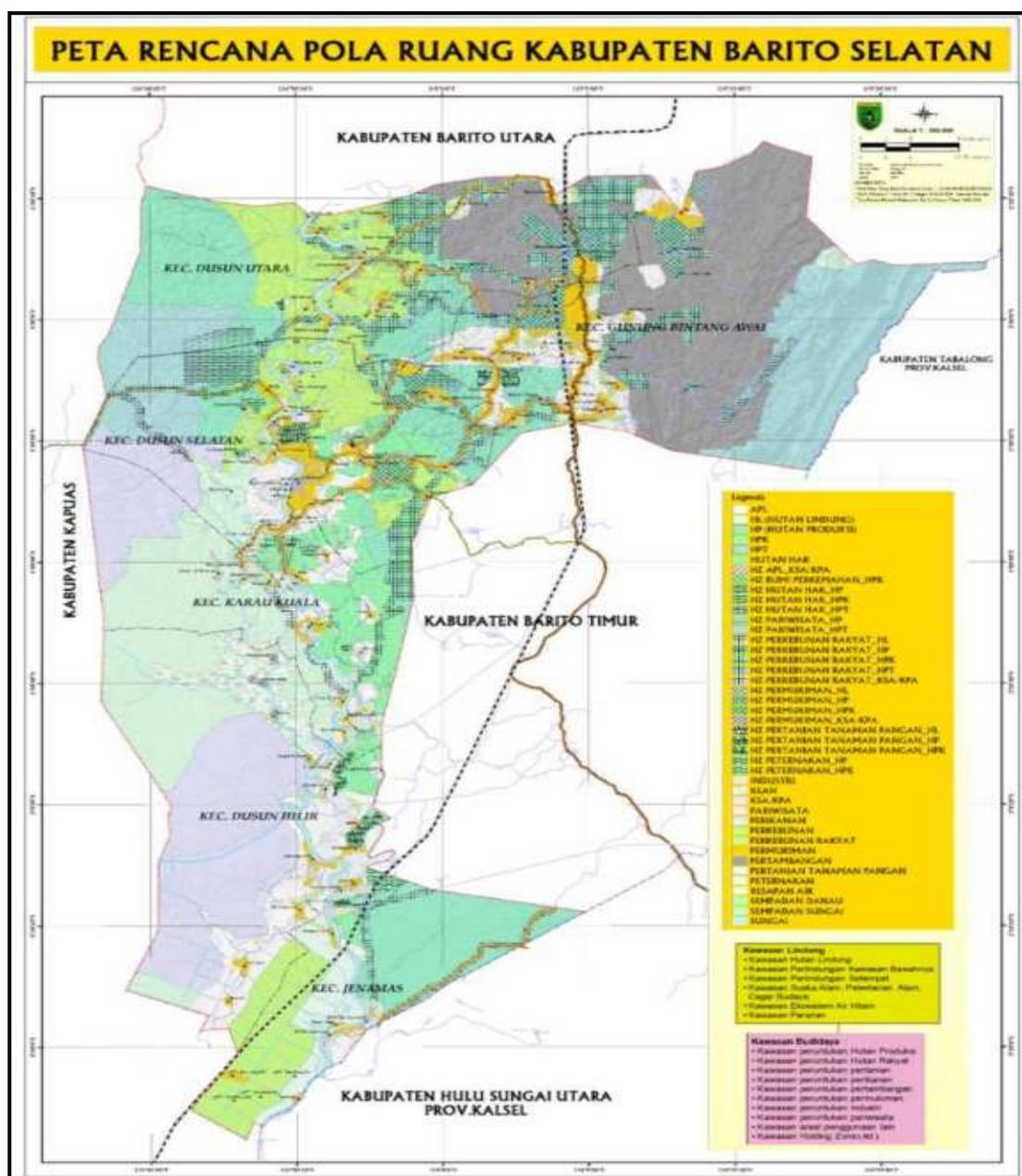
No	Jenis Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
3.	Kawasan Perlindungan setempat		
a.	Kawasan Sempadan Sungai dengan ketentuan yakni : 1. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter 2. Perlindungan terhadap anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 meter 3. Pada sungai besar dan anak sungai yang melawati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter	1) Di sepanjang Sungai Barito	2.904,53
b.	Kawasan sempadan danau/waduk	1) Danau Bambaler 2) Danau Madara 3) Danau Karen 4) Danau Maguru 5) Danau Buntal 6) Danau Buritkumpai 7) Danau Kararen 8) Danau Raya 9) Danau Bundar 10) Danau Mangkirai 11) Danau Ganting 12) Danau Palui 13) Danau Malawen 14) Danau Jutuh 15) Danau Sadar 16) Danau Hampalam 17) Danau Sabur 18) Danau Lambuhang 19) Danau Jaman 20) Danau Letek 21) Danau Muaradanau 22) Danau Pamarahan 23) Danau Bahalang 24) Danau Surapanji 25) Danau Rakutan 26) Danau Kalahien 27) Danau Mutar 28) Danau Sanggu 29) Danau Limut 30) Danau Sababilah 31) Danau Masura 32) Danau Baleleng 33) Danau Jayo 34) Danau Mantarem 35) Danau Pulut 36) Danau Telang	Luasnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
c.	Kawasan Suaka Alam	Habitat Orang Utan 1) Madara 2) Batilap 3) Muara Puning	76.829,50

No	Jenis Kawasan Lindung	Lokasi	Luas (Ha)
d.	Kawasan Ekosistem Air Hitam	Kawasan hutan rawa yang gambutnya sangat tebal sehingga perairan disekitarnya berwarna hitam	13.719,02
e.	Kawasan Perairan	Sungai Barito beserta cabang-cabang sungainya yang tersebar di seluruh kecamatan	15.607,30

Sumber : RTRW Kabupaten Barito Selatan 2014-2034

Adapun terkait dengan visualisasi dari potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Barito Selatan (rencana pola ruang) bisa dilihat pada gambar 2.8 berikut ini.

**Gambar 2. 8**  
**Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Selatan 2014-2034**



Sumber : Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014

### 2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Barito Selatan terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu:

- Wilayah rawan bencana longsor tebing sungai, yang meliputi sepanjang aliran Sungai Barito dan Sungai Ayuh.
- Wilayah rawan bencana longsor, rockfall dan landslide, yang meliputi Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara.
- Wilayah rawan bencana banjir, yang meliputi seluruh kecamatan yang berada di sepanjang aliran Sungai Barito, Sungai Mangkatip dan Sungai Ayuh.

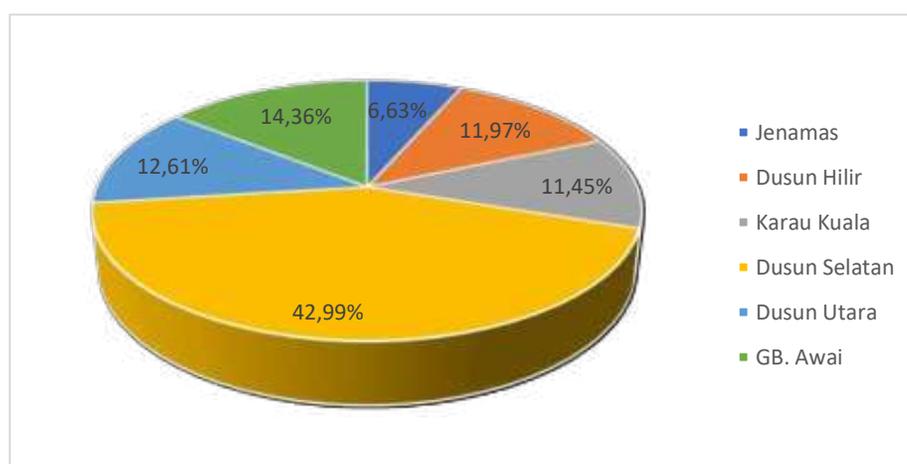
### 2.1.2. Demografi

#### 2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Barito Selatan berjumlah 131.606 jiwa, dengan rincian Kecamatan Jenamas 8.719 jiwa, Kecamatan Dusun Hilir 15.753 jiwa, Kecamatan Karau Kuala 15.067 jiwa, Kecamatan Dusun Selatan 56.575 jiwa, Kecamatan Dusun Utara 16.599 jiwa dan Kecamatan Gunung Bintang Awai 18.893 jiwa.

Proporsi penduduk terbesar ada di Kecamatan Dusun Selatan yakni sebesar 42,99 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Jenamas yang berada pada angka 6,63 persen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 9**  
**Proporsi Penduduk di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021**



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022, diolah

### 2.1.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk laki-laki pada umumnya lebih banyak dibanding perempuan di berbagai kelompok umur kecuali untuk kelompok umur 65-70, 70-74 dan 75+, seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.19**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan**

No	Kelompok Umur	2021		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	5.447	5.203	10.650
2.	5 – 9	4.976	4.705	9.681
3.	10 – 14	5.603	5.240	10.843
4.	15 – 19	6.216	5.746	11.962
5.	20 – 24	5.949	5.479	11.428
6.	25 – 29	5.352	5.013	10.365
7.	30 – 34	5.253	5.168	10.421
8.	35 – 39	5.227	5.129	10.356
9.	40 – 44	5.174	4.998	10.172
10.	45 – 49	4.828	4.514	9.342
11.	50 – 54	4.029	3.793	7.822
12.	55 – 59	3.298	3.111	6.409
13.	60 – 64	2.536	2.375	4.911
14.	65 – 70	1.609	1.633	3.242
15.	70 – 74	954	1.083	2.037
16.	75+	858	1.107	1965
<b>Jumlah</b>		<b>67.309</b>	<b>64.297</b>	<b>131.606</b>

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022

Dilihat dari tabel di atas, Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh kelompok umur yang termasuk ke dalam usia produktif. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk terus berinovasi guna memanfaatkan bonus demografi yang ada melalui penciptaan lapangan pekerjaan.

### 2.1.2.3. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk usia kerja yang merupakan refleksi dari pertumbuhan penduduk, secara keseluruhan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja disuatu daerah. Dengan kata lain bahwa keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan.

**Tabel 2. 20**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas**  
**Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Barito Selatan**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<b>Angkatan Kerja (Total)</b>	44.302	22.137	66.439
Bekerja	42.434	21.242	63.676
Pengangguran	1.868	895	2.763
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	8.989	29.230	38.219
Sekolah			6.489
Mengurus Rumah Tangga			26.294
Lainnya			5.436
<b>Jumlah</b>			<b>104.658</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>			<b>63,48%</b>
<b>Tingkat Pengangguran</b>			<b>4,16%</b>

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021, mencapai 66.439 jiwa. Diantaranya jumlah Bekerja sebesar 63.676, sedangkan jumlah pengangguran sebesar 2.763. Hal ini berarti penduduk usia produktif yang pada 2021 termasuk golongan bukan angkatan kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan yang tidak aktif secara ekonomi) sudah beralih ke dalam angkatan kerja.

Adapun untuk tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 sebesar 63,48 persen. Angka TPAK bisa menjadi indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisa capaian hasil pembangunan yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi angka TPAK, bisa dikatakan bahwa semakin besar pula keberhasilan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Barito Selatan.

Terkait dengan Status Pekerjaan di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021, jumlah penduduk dengan status sebagai Buruh/karyawan/pegawai lebih mendominasi yakni sebesar 26.267 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil adalah dengan status Pekerjaan Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar yakni sebesar 833 jiwa. Data lebih jelas ada pada tabel berikut ini.

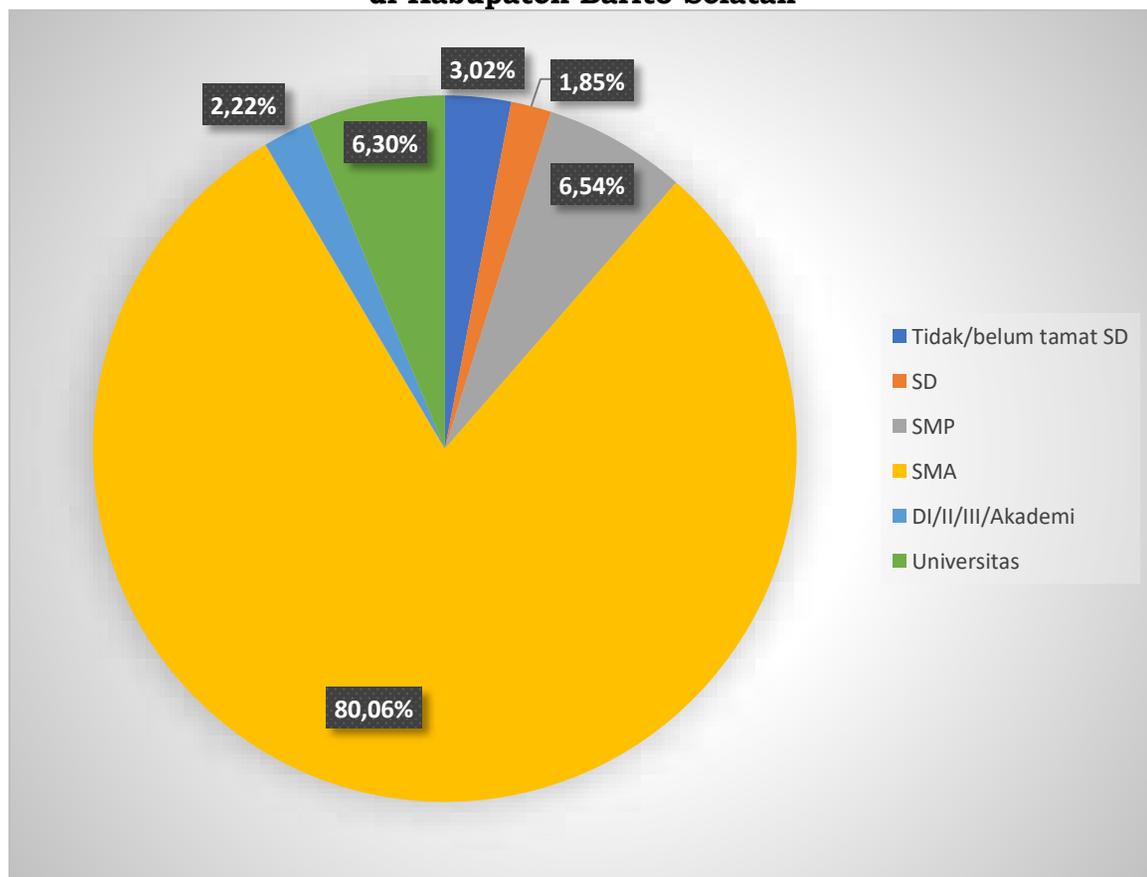
**Tabel 2. 21**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**  
**Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2021**

Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		
	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	10.918	6.419	17.337
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	3.575	1.492	5.067
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	620	213	833
Buruh/karyawan/pegawai	18.174	8.093	26.267
Pekerja keluarga/tak dibayar	1.004	4.521	5.525
Pekerja bebas pertanian	5.250	202	5.452
Pekerja bebas non pertanian	2.893	302	3.195
<b>Jumlah/Total</b>	<b>42.434</b>	<b>21.242</b>	<b>63.676</b>

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022

Proporsi tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh lulusan SMA sebesar 80,06%, kemudian SMP sebesar 6,54%, Universitas sebesar 6,30%, Tidak/belum tamat SD sebesar 3,02%, DI/III/III/Akademi sebesar 2,2%, dan SD sebesar 1,85%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 10**  
**Proporsi Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja**  
**di Kabupaten Barito Selatan**



Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2022, diolah

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan baik migas maupun non migas termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi maupun struktur ekonominya. Selain itu, indikator lain yang juga dapat memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah laju inflasi, PDRB per kapita, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks gini (*gini ratio*).

#### 2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengetahui perkembangan ekonomi di suatu wilayah, dapat diketahui melalui data PDRB yang merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu wilayah. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi) sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi.

Pada tahun 2021, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Selatan mencapai 6.695,6 miliar yang mana lebih tinggi dari tahun 2020 dengan besaran PDRB sebesar 6.276,7 miliar. PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2017-2021 secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 22**  
**Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**(miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan 2017-2021**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1018,5	1083,7	1172,3	1213,9	1211,9
2	Pertambangan dan Penggalian	1046,0	1154,5	1160,0	843,0	1056,4
3	Industri Pengolahan	338,4	348,0	365,7	373,0	390,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,5	3,0	3,5	3,7	4,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,3	8,4	10,0	10,5	11,8
6	Konstruksi	354,2	392,1	435,8	400,5	364,9

7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	429,8	469,4	512,7	535,0	550,9
8	Transportasi dan Pergudangan	621,3	721,6	758,8	768,4	761,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114,6	124,7	137,0	136,0	141,1
10	Informasi dan Komunikasi	69,0	74,0	82,4	99,9	107,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	259,3	279,1	300,7	339,2	364,8
12	Real Estat	124,8	139,8	155,8	164,8	174,5
13	Jasa Perusahaan	1,0	1,1	1,2	1,1	1,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368,1	408,6	455,6	501,3	539,0
15	Jasa Pendidikan	394,8	450,1	497,5	527,1	584,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,4	162,1	184,2	228,1	302,0
17	Jasa Lainnya	115,5	126,1	138,4	130,9	127,0
<b>PDRB Kabupaten Barito Selatan</b>		<b>5.410,1</b>	<b>5.946,4</b>	<b>6.371,5</b>	<b>6.276,7</b>	<b>6.695,6</b>

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022*

*\*) angka sementara      \*\*) angka sangat sementara*

Sementara itu, untuk PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2017) pada tahun 2021 mencapai angka 6.695,6 miliar yang mana angka ini sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 6.371,5 miliar. Secara rinci, PDRB berdasarkan lapangan usaha menurut harga konstan tahun 2017-2021 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 23**  
**Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	665,40	679,70	706,50	736,80	774,00
2	Pertambangan dan Penggalian	896,50	931,30	976,50	1015,30	1071,80
3	Industri Pengolahan	211,90	223,80	231,30	231,70	239,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,60	1,80	1,90	2,10	2,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,50	4,80	4,90	5,20	5,80
6	Konstruksi	213,90	232,50	245,40	259,30	279,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	265,40	287,00	304,60	321,50	338,50
8	Transportasi dan Pergudangan	375,10	414,00	445,20	483,70	477,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61,30	68,60	74,60	77,90	82,30

10	Informasi dan Komunikasi	48,40	52,50	57,60	60,50	65,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	147,90	157,70	171,50	177,70	185,40
12	Real Estat	73,40	77,30	80,40	84,80	89,30
13	Jasa Perusahaan	0,60	0,60	0,60	0,70	0,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	213,20	224,10	237,30	252,40	269,80
15	Jasa Pendidikan	218,90	232,80	245,70	267,10	285,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89,30	95,00	100,70	106,60	116,20
17	Jasa Lainnya	67,00	70,60	73,60	77,60	81,70
<b>PDRB Kabupaten Barito Selatan</b>		<b>3554,30</b>	<b>3754,10</b>	<b>3958,30</b>	<b>4160,90</b>	<b>4365,70</b>

*Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2022*

*\*) Angka sementara*

*\*\*) Angka sangat sementara*

### **2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk menuju keadaan yang lebih baik. Laju pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan persentase pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan dua basis yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan riil dari masing-masing sektor.

Terkait pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan atau pertumbuhan riil di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017-2021 secara umum bergerak tumbuh ke arah yang lebih baik kecuali untuk lapangan usaha Konstruksi dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 12,25 persen. Pada tahun 2021, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi dan berkontribusi besar dalam angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan yakni Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 32,34%. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2017-2021 untuk setiap lapangan usaha bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 24**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Barito Selatan 2017-2021**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,94	4,29	5,06	2,44	-3,69
2	Pertambangan dan Penggalian	4,86	3,97	5,57	-15,55	6,02
3	Industri Pengolahan	3,35	0,20	3,55	-0,48	1,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,11	8,48	6,55	7,37	6,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,88	6,28	12,52	4,60	7,26
6	Konstruksi	5,52	5,69	7,86	-11,02	-12,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,13	5,53	5,29	1,39	1,20
8	Transportasi dan Pergudangan	7,53	8,66	-0,97	-3,89	-3,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,78	4,41	5,71	-1,70	2,01
10	Informasi dan Komunikasi	9,63	5,13	8,26	17,69	7,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,78	3,59	4,31	7,46	5,21
12	Real Estat	4,01	5,43	5,31	1,37	0,03
13	Jasa Perusahaan	5,24	5,45	6,69	-7,66	-7,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,92	6,37	6,88	4,33	6,18
15	Jasa Pendidikan	5,54	8,73	6,71	3,73	7,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,99	5,86	9,02	21,37	32,34
17	Jasa Lainnya	4,32	5,42	4,23	-7,36	-5,86
<b>Laju Pertumbuhan PDRB ADHK</b>		<b>5,44</b>	<b>5,12</b>	<b>4,96</b>	<b>-2,91</b>	<b>2,02</b>

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022, diolah*

*\*) angka sementara*

*\*\*\*) angka sangat sementara*

Adapun terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dari tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan. Dimana penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan paling besar terjadi pada tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi sebesar -2,91. Hal ini semua merupakan dampak dari wabah Covid-19 yang melanda Indonesia.

### 2.2.1.3. Struktur Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Struktur ekonomi wilayah dapat digambarkan melalui distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku karena menggunakan nilai PDRB pada tahun tertentu yang dipengaruhi oleh dinamika inflasi menurut sub sektor lapangan usaha terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Struktur ekonomi juga dapat mengetahui peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah. Analisis ini juga sebagai identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, analisis proses dan tahap transformasi struktural, serta menunjukkan tingkat industrialisasi suatu wilayah. Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

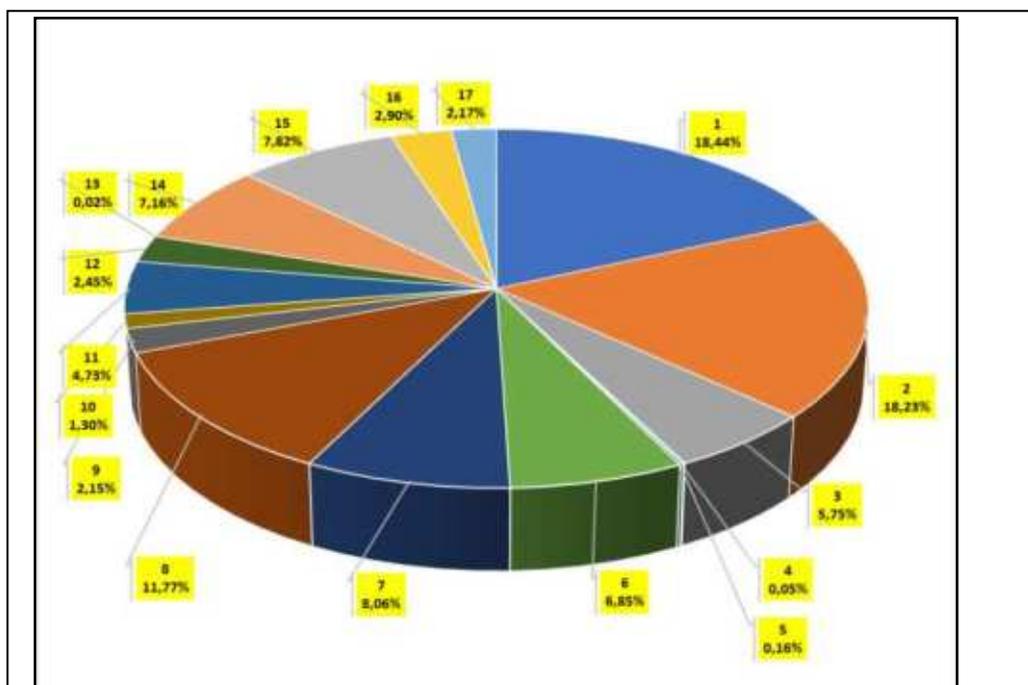
**Tabel 2. 25**  
**Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019**

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,62%	19,59%	18,83%	18,25%	18,44%
2	Pertambangan dan Penggalian	18,91%	18,53%	19,33%	19,43%	18,23%
3	Industri Pengolahan	6,55%	6,53%	6,26%	5,85%	5,75%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,16%
6	Konstruksi	6,37%	6,55%	6,55%	6,60%	6,85%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,58%	7,84%	7,94%	7,90%	8,06%
8	Transportasi dan Pergudangan	10,90%	11,32%	11,49%	12,08%	11,77%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,96%	2,11%	2,12%	2,10%	2,15%
10	Informasi dan Komunikasi	1,23%	1,24%	1,28%	1,25%	1,30%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,60%	4,67%	4,79%	4,70%	4,73%
12	Real Estat	2,28%	2,31%	2,31%	2,35%	2,45%
13	Jasa Perusahaan	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,77%	6,84%	6,80%	6,87%	7,16%
15	Jasa Pendidikan	7,22%	7,44%	7,30%	7,57%	7,82%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,66%	6,67%	2,67%	2,73%	2,90%
17	Jasa Lainnya	2,15%	2,17%	2,14%	2,12%	2,17%
<b>PDRB Kabupaten Barito Selatan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Dari Beberapa Edisi, diolah

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi kabupaten Barito Selatan dalam periode 2015-2019 cenderung mengalami fluktuasi penurunan di mana pada tahun 2015 tercatat kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 20,62 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan ke angka 18,25 persen dan kembali naik di tahun 2019 ke angka 18,44 persen. Demikian pula dengan sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi tumpuan kedua Kabupaten Barito Selatan dalam struktur perekonomian regionalnya juga cenderung fluktuatif di mana pada tahun 2015 proporsi sektor ini berada pada angka 18,91 persen dan pada tahun 2018 mencapai angka 19,43 persen dan kemudian mengalami penurunan ke angka 18,23 persen di tahun 2019.

**Gambar 2. 11**  
**Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019**



**Keterangan**

- |                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Pertanian, Kahutanan dan Perikanan                            | 10. Informasi dan komunikasi                                       |
| 2. Pertambangan dan penggalian                                   | 11. Jasa keuangan dan asuransi                                     |
| 3. Industri Pengolahan                                           | 12. Real Estat                                                     |
| 4. Pengadaan listrik dan Gas                                     | 13. Jasa perusahaan                                                |
| 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang      | 14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib |
| 6. Konstruksi                                                    | 15. Jasa pendidikan                                                |
| 7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial                             |
| 8. Transportasi dan pergudangan                                  | 17. Jasa lainnya                                                   |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan makan minum                          |                                                                    |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020

Struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2019 didominasi oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang persentase kontribusinya secara berturut-turut adalah sebesar 18,44 persen dan 18,23 persen. Kedua kategori lapangan usaha ini termasuk ke dalam sektor primer yang outputnya merupakan bahan mentah dan memiliki nilai tambah relatif rendah. Adapun untuk sektor tersier (sektor yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa), kategori lapangan usaha yang berkontribusi relatif besar dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Barito Selatan adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang berkontribusi sebesar 11,77 persen. Perlu menjadi perhatian mengingat kategori lapangan usaha ini mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 1,20 persen. Selanjutnya terkait dengan kategori lapangan usaha industri pengolahan, berkontribusi sebesar 5,75 persen sehingga, apabila mengacu kepada UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*) dalam Muta'ali (2015), Kabupaten Barito Selatan masih belum memasuki proses industrialisasi karena kontribusi di sektor industri pengolahan belum mencapai 10 persen.

Selanjutnya, terkait dengan struktur perekonomian regional yang digunakan untuk mengetahui peran perekonomian antar sub-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan kata lain, struktur perekonomian regional digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian membandingkan kontribusi tersebut terhadap kabupaten lainnya. Berikut kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah.

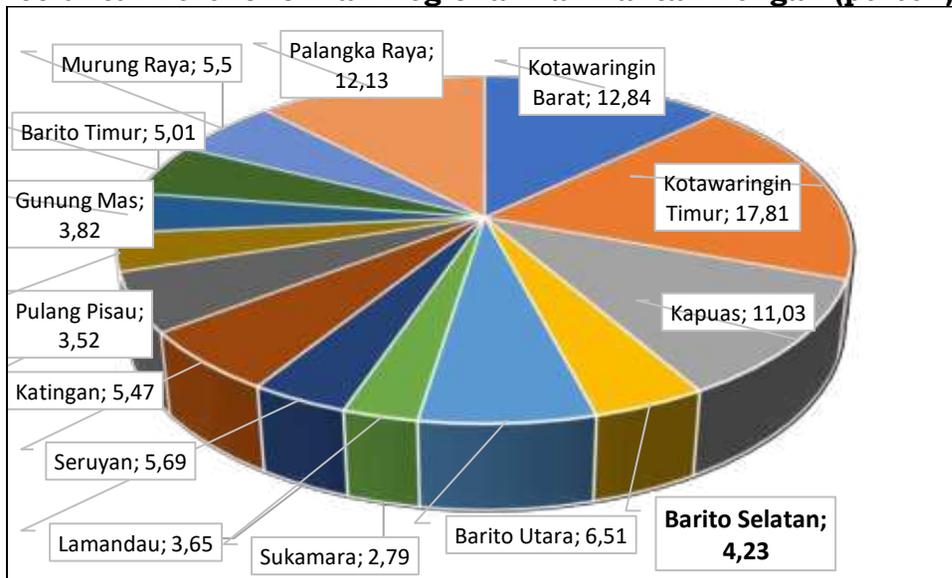
**Tabel 2. 26**  
**Capaian Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah**

Kabupaten	Capaian Kontribusi PDRB Regional Kabupaten Barito Selatan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah (Persen)			
	2016	2017	2018	2019
Barito Selatan	4,38	4,32	4,29	4,23

Berdasarkan tabel di atas, bisa dikatakan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan dalam membentuk PDRB regional Provinsi Kalimantan Tengah relatif kecil. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Barito Selatan berkontribusi secara konsisten berada di kisaran angka 4 persen dalam perekonomian regional provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Adapun untuk tahun 2019, Berikut merupakan diagram yang menunjukkan struktur perekonomian regional Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019.

**Gambar 2. 102**

**Struktur Perekonomian Regional Kalimantan Tengah (persen)**



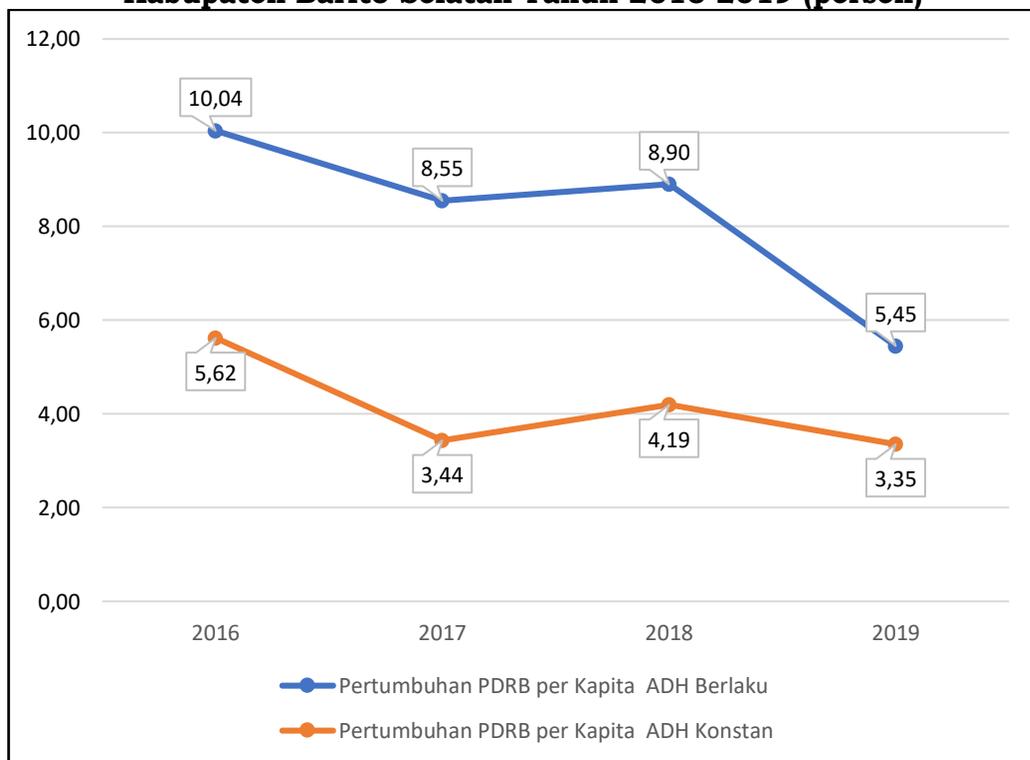
Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020, diolah

Berdasarkan diagram di atas, Kabupaten Barito Selatan berkontribusi sebesar 4,23 persen di dalam struktur perekonomian regional atau berada pada peringkat 11 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bisa dikatakan, kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam struktur perekonomian regional relatif kecil apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang telah lama berdiri di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kondisi ini penting untuk menjadi perhatian dalam upaya merumuskan kebijakan yang berpengaruh untuk mendorong perkembangan perekonomian makro di Kabupaten Barito Selatan.

#### 2.2.1.4. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Tren perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 13**  
**Perkembangan PDRB per Kapita**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016-2019 (persen)**



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dari Beberapa Edisi, diolah

Peningkatan secara riil PDRB per kapita Barito Selatan atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan hingga tahun 2019. Selama periode 2016-2019, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai Rp.46.175.506 atau tumbuh sebesar 5,45 persen dibandingkan dengan 2018. Selanjutnya, terkait PDRB per kapita atas dasar harga konstan, juga relatif mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu 2015-2019. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 27**  
**PDRB per Kapita Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB ADH Berlaku (milyar rupiah)	5.410,0	5.946,3	6.369,1	6.277,0	6.695,6
Jumlah Penduduk	129,29	135,74	136,80	131,1	-
PDRB per Kapita (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Berlaku	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB ADH Konstan (milyar rupiah)	3.958,2	4.160,8	4.367,1	4.240,6	4.326,7
Jumlah Penduduk	129,29	135,74	136,80	131,1	-
PDRB per Kapita (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Konstan	5,44	5,12	4,96	-2,91	2,02

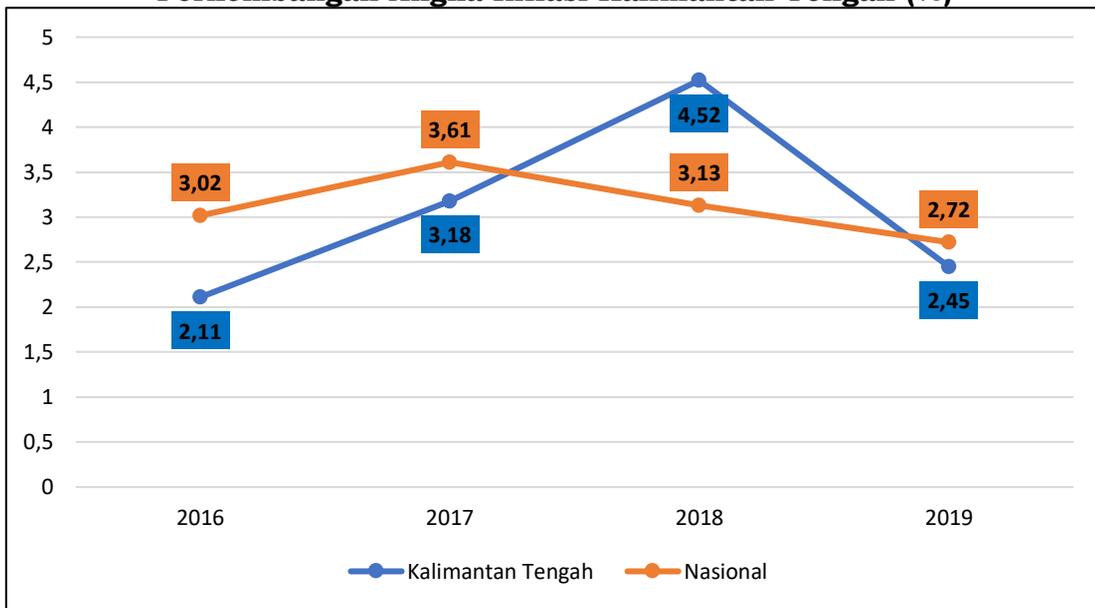
*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022, diolah*

Berdasarkan tabel di atas, meskipun PDRB per kapita Kabupaten Barito Selatan relatif cukup besar, tidak serta merta menjadi suatu kesimpulan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan berada pada tingkat kesejahteraan tinggi mengingat masih tetap terdapat disparitas pendapatan di Kabupaten Barito Selatan yang ditunjukkan oleh Pertumbuhan PDRB per Kapita ADH Berlaku yang berada pada angka 100,00 dari tahun 2017-2021.

#### **2.2.1.5. Laju Inflasi**

Laju inflasi merupakan angka indikator yang menunjukkan kenaikan harga umum secara terus menerus dalam periode tertentu, sedangkan deflasi menunjukkan terjadi penurunan harga barang-barang dan jasa secara umum. Untuk angka Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen. Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan angka inflasi, diwakilkan oleh dua kota yakni Kota Palangka raya dan Kota Sampit yang menjadi tolak ukur perhitungan angka inflasi umum Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait laju inflasi tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016-2019 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018, melampaui laju inflasi nasional dengan angka 4,52 persen atau merupakan inflasi tertinggi dalam kurun waktu 4 tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2019, laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah kembali turun ke angka 2,45 dan di bawah laju inflasi nasional Berikut perkembangan angka inflasi umum untuk Provinsi Kalimantan Tengah. dari tahun 2016-2019.

**Gambar 2. 14**  
**Perkembangan Angka Inflasi Kalimantan Tengah (%)**



Sumber : Indeks Harga Konsumen Provinsi Kalimantan Tengah, diolah

Sementara itu, jika melihat pola inflasi bulanan pada tahun 2019, inflasi Kota Palangka Raya dan Kota Sampit menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan disertai tiga kali lonjakan inflasi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan pasar, terkait dengan perayaan hari keagamaan hingga akhir tahun. Inflasi cukup tinggi terjadi selama April (0,44 persen) dan Mei (0,72 persen) kerana bertepatan dengan Ramadhan dan Idul Fitri. Terkait laju inflasi gabungan dua kota (Palangkaraya dan Sampit) bisa dilihat pada gambar 2.20 berikut.

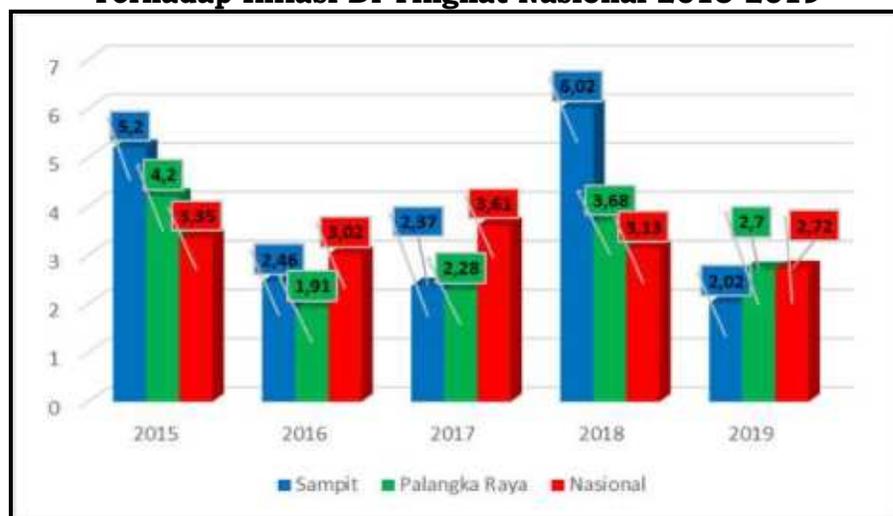
**Gambar 2. 15**  
**Perkembangan Inflasi/Deflasi Gabungan Dua Kota HK Tahun 2019 (%)**



Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Palangka Raya dan Sampit, 2019

Secara umum, apabila melihat pola inflasi tahunan selama 2015-2019, inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, tingkat inflasi di dua kota tersebut cenderung berada di bawah inflasi pada tingkat nasional (2,72 persen) yang mana juga merupakan angka terendah selama 5 tahun terakhir. Adapun laju inflasi tahun ke tahun untuk Kalimantan Tengah selama 2019 juga lebih rendah dari tahun 2018 (4,52 persen). Terdapat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan didorong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi. Lonjakan tingkat permintaan barang dan jasa menyebabkan jumlah pasokan tidak mampu mencukupi kebutuhan di pasar konsumen. Hal ini tentu berdampak pada harga yang merangkak naik pada waktu yang sama.

**Gambar 2. 16**  
**Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Dan Kota Sampit Terhadap Inflasi Di Tingkat Nasional 2015-2019**



Sumber : Indeks Harga Konsumen Kota Palangka Raya dan Kota Sampit 2015-2019, diolah

#### 2.2.1.6. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.21, garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat dimana pada tahun 2019, garis kemiskinan

berada pada angka Rp. 408.072 per kapita per bulan meskipun peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan selama periode tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyentuh angka 438.248 di tahun 2019. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan penduduk miskin.

**Gambar 2. 17**  
**Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan 2015-2019**



*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020, diolah*

Selanjutnya terkait dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 5,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,16 persen. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah berada pada jalur yang tepat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 28**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kabupaten Barito Selatan 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	5,95	6,16	5,99	6,12	-
Persentase Penduduk Miskin	-	-	-	-	-

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2022*

Kemudian jika membandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 18**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019**



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020, diolah

Persoalan kemiskinan bukan hanya terkait dengan jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity*) dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan pada periode 2016 sampai dengan 2019 cenderung fluktuatif di mana dari tahun 2015 ke tahun 2017 sempat mengalami sedikit penurunan dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan ke angka 0,63 dan kembali turun ke angka 0,21 pada tahun 2019. Penurunan Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 mengindikasikan arah kebijakan penanganan kemiskinan sudah berada di jalur yang tepat.

Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan, juga cenderung fluktuatif di mana pada tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami penurunan yang kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan.

Namun pada tahun 2019 Indeks Keparahan Kemiskinan kembali mengalami penurunan ke angka 0,05 yang berarti ketimpangan pengeluaran penduduk miskin pada tahun tersebut semakin merata. Perkembangan indeks Kedalaman Kemiskinan dan indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2. 19**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan 2015-2019**



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020, diolah

#### 2.2.1.7. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Angka rasio gini Kabupaten barito Selatan pada tahun 2018 adalah 0,32 yang berarti termasuk ke dalam kategori **ketimpangan pendapatan sedang**. Angka ini sedikit lebih rendah dari angka rasio gini Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 0,34. Berikut ini gambaran

perkembangan rasio gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2018 terhadap Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan indeks gini di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2. 20**  
**Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2018**



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olahraga. Dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun.

#### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Terkait dengan tren perkembangan IPM, Kabupaten Barito Selatan memiliki tren perkembangan yang relatif baik. Hal ini bisa dilihat dari terus meningkatnya angka IPM dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dimana pada tahun 2017, nilai IPM kabupaten Barito Selatan berada pada kisaran angka 69,25 dan pada tahun 2020 berada di angka 70,22 atau berada pada status IPM tinggi. Bisa dikatakan peningkatan IPM di Kabupaten Barito Selatan yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian. Terkait perkembangan IPM di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini.

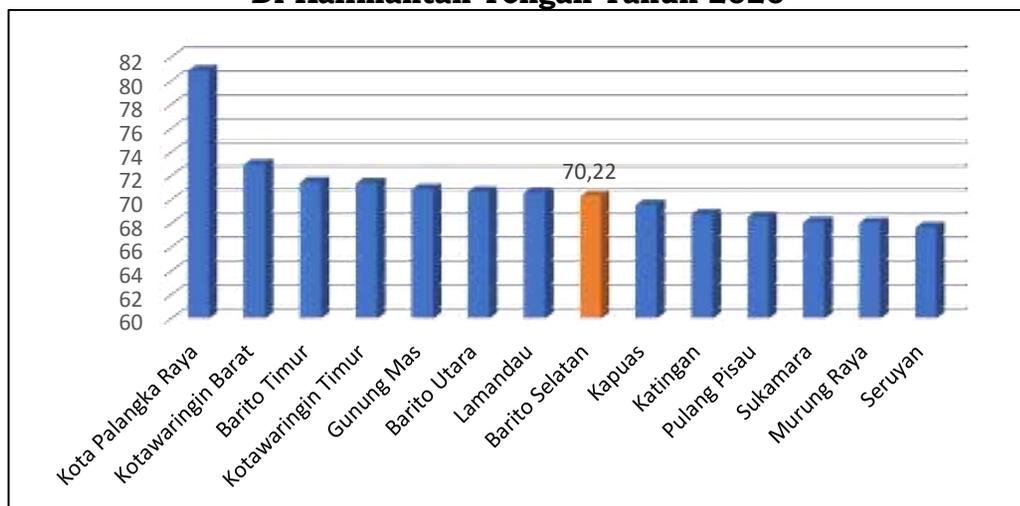
**Tabel 2. 29**  
**Capaian IPM Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	69,25	69,73	70,1	70,22	NA	NA

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2022

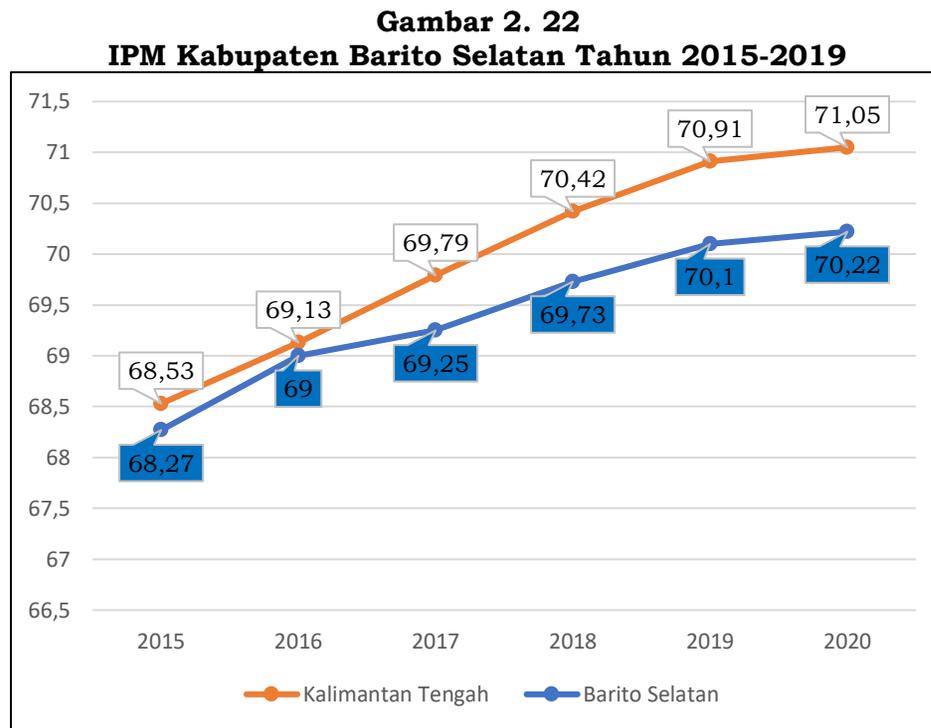
Di tahun 2020, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.26, IPM kabupaten Barito Selatan berada di urutan 8 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah. Adapun kabupaten/kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Palangka Raya yakni sebesar 80,77 serta Kabupaten Seruyan dengan nilai IPM sebesar 67,58 sebagai kabupaten dengan nilai IPM terendah.

**Gambar 2. 21**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Tahun 2020**



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2020

Jika dibandingkan dengan perkembangan nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah, tren perkembangan IPM Kabupaten Barito Selatan masih cenderung berada di bawah tren perkembangan Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2020

#### 2.2.2.2. Aspek Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pada aspek pendidikan dapat diukur menggunakan indikator antara lain **angka melek huruf (AMH)**, **Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)** dan **rata-rata lama sekolah (RLS)**. Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk: a) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan, dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD; b) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta c) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. AMH diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Sementara Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator selanjutnya adalah rata-rata lama sekolah (RLS) yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal serta merupakan salah satu dari tiga komponen IPM. Rata-rata lama sekolah sendiri memiliki pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan. Berikut capaian indikator kinerja untuk pembangunan pada aspek pendidikan di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017-2020.

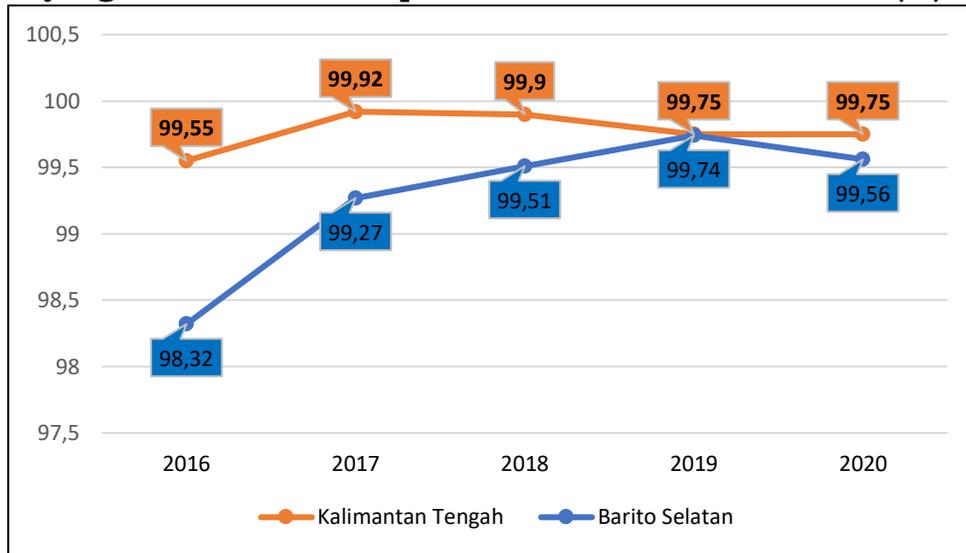
**Tabel 2. 30**  
**Capaian Kinerja Bidang Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Angka Melek Huruf	99,27	99,51	99,74	99,56	NA	NA
Angka Harapan Lama Sekolah	12,31	12,53	12,54	12,55	NA	NA
Rata-Rata Lama Sekolah	8,67	8,69	8,71	8,82	NA	NA

*Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2020 dan Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020*

Capaian angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Barito Selatan cenderung bergerak fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020 di mana pada tahun 2017, AMH berada pada angka 99,27 persen dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, yakni berada pada angka 99,56 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, angka AMH Kabupaten Barito Selatan sedikit berada di bawah angka AMH Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dalam kurun waktu 2016-2020 (gambar 2.28). Angka melek huruf perlu menjadi perhatian dari Pemerintah dalam sebagai bagian dari penilaian kualitas SDM di Kabupaten Barito Selatan , agar ke depannya bisa semakin bergerak ke arah yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

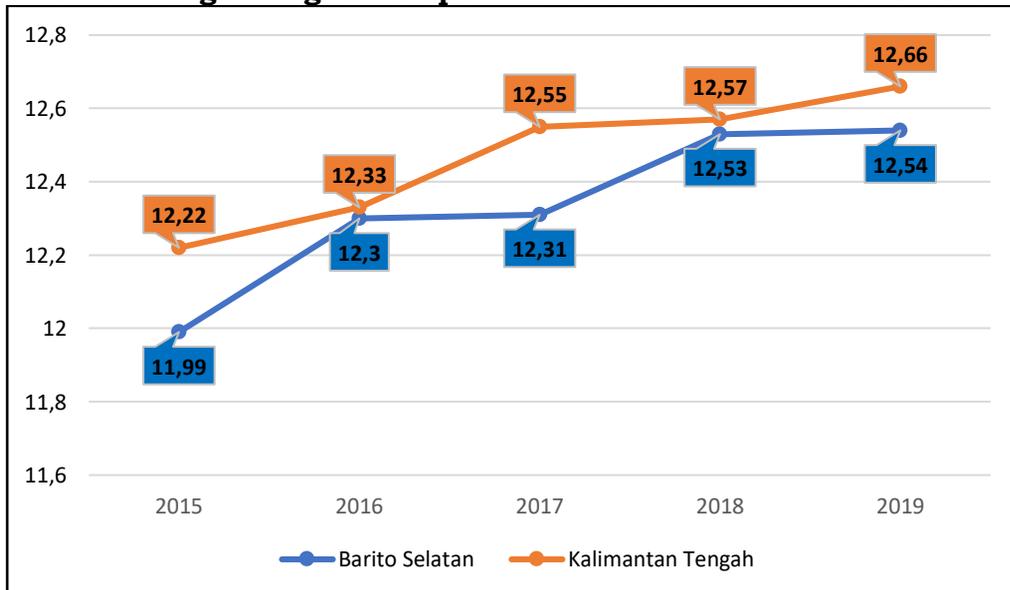
**Gambar 2. 23**  
**Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf Kabupaten Barito Selatan 2016-2020 (%)**



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka dari beberapa edisi, diolah

Adapun untuk Capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2017, capaian AHLS berada pada angka 12,31 tahun yang kemudian pada tahun 2020 berada pada angka 12,55. Apabila dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Tengah, tren perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 masih berada di bawah tren perkembangan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut ini.

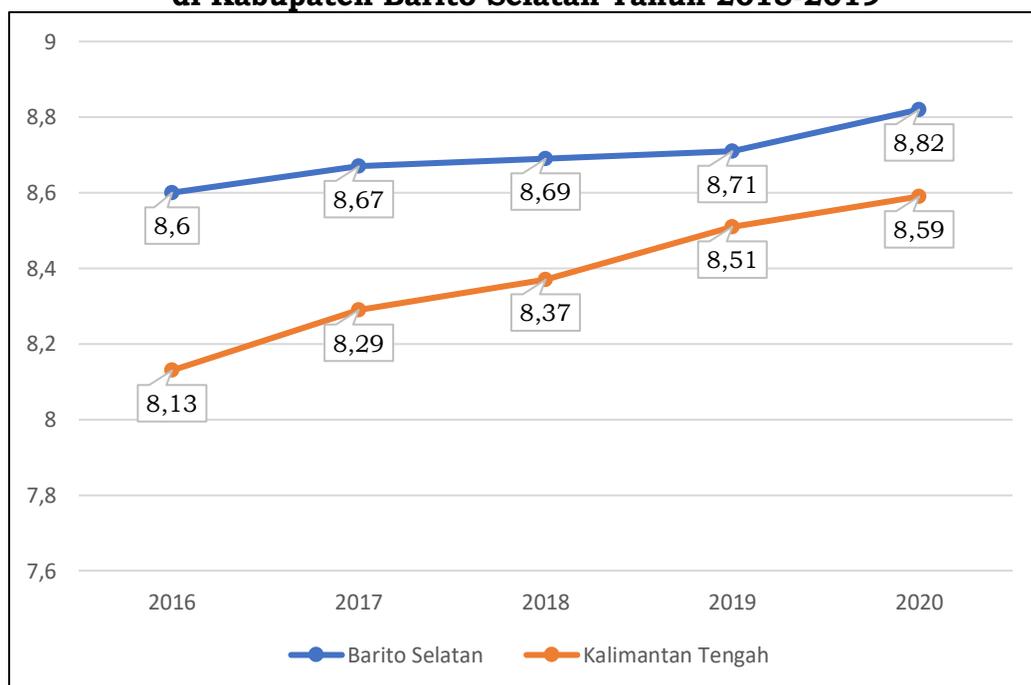
**Gambar 2. 24**  
**Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2015-2019**



Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020, diolah

Selanjutnya terkait dengan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Barito Selatan. Sampai tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Barito Selatan telah mencapai 8,82 tahun atau setara dengan SMP kelas VIII/IX. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pendidikan tertinggi yang ditamatkan secara umum adalah pendidikan SD/Sederajat atau dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Barito Selatan masih relatif cukup rendah, meskipun melampaui tren rata-rata lama sekolah di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat lintas sektor seperti tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya dan faktor dari internal peserta didik itu sendiri. Namun yang patut diapresiasi adalah terkait komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan melalui tren rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Terkait dengan perkembangan rata-rata lama sekolah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kabupaten Barito Selatan terhadap Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 25**  
**Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk**  
**di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2019**



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020

**2.2.2.3. Kesehatan**

Capaian di bidang kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2019. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari tren kenaikan angka harapan hidup Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 mencapai 67,09 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2020 akan memiliki peluang hidup hingga 67 tahun. Berikut data lengkapnya terkait dengan angka harapan hidup di Kabupaten Barito Selatan.

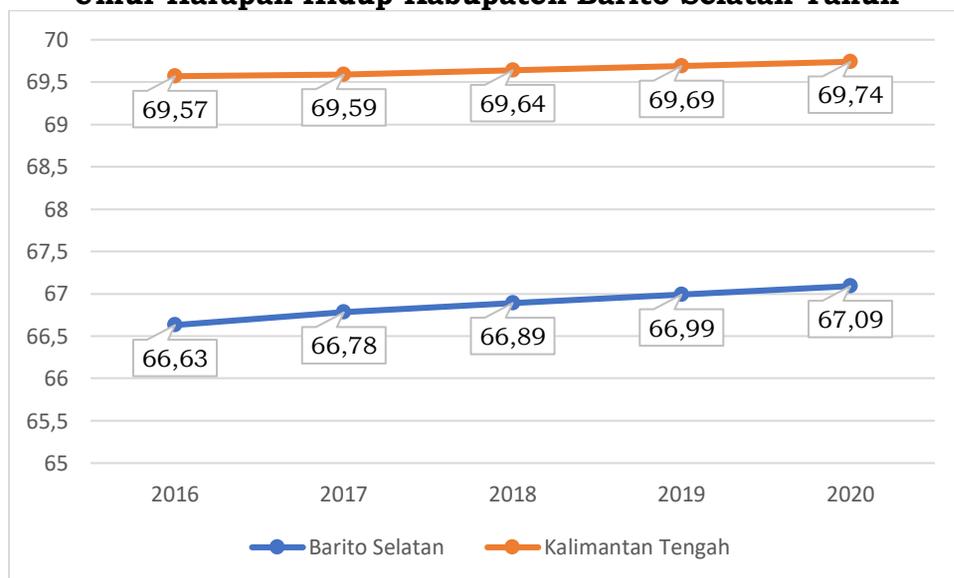
**Tabel 2. 31**  
**Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	66,78	66,89	66,99	67,09	NA	NA

*Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2022*

Secara umum, tren kenaikan angka harapan hidup di Kabupaten Barito Selatan masih sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka harapan hidup pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. 26**  
**Umur Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun**



*Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2020*

### **2.2.3. Fokus Seni dan Budaya**

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu : (1) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

#### 2.3.1.1. Urusan Pendidikan

##### 1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya serta untuk menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berikut angka partisipasi kasar di Kabupaten Barito Selatan untuk tiap jenjang pendidikannya.

**Tabel 2. 32**  
**Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Barito Selatan (%)**

Indikator Capaian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
APK	104,18	99,26	104,77	106,45	0	NA

Sumber : BAPPEDA Barito Selatan Tahun 2022, diolah

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2020 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 108,72 persen menjadi sebesar 112,31 persen di tahun 2019. Capaian APK ini harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mengoptimalkan daya serap SD/MI terhadap penduduk usia SD/MI sehingga dapat dipastikan bahwa kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan semakin terbuka lebar.

Untuk jenjang SMP/MTS, APK cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2017 tercatat APK Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 105,06 persen dan di tahun selanjutnya yakni tahun 2017 mengalami peningkatan ke angka 116,52 persen. Namun, pada tahun 2019, APK untuk jenjang SMP/MTs mengalami penurunan ke angka 105,92 persen. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu untuk kembali berupaya dalam hal meningkatkan APK untuk jenjang SMP/MTs agar kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan di jenjang tersebut kembali terbuka mengingat akan pentingnya pendidikan

guna mencerdaskan generasi muda dan kewajiban dalam menempuh pendidikan 12 tahun melalui optimalisasi sistem pendidikan tingkat menengah pertama baik melalui optimalisasi terhadap kuantitas (peningkatan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk) serta kualitas pendidikan (peningkatan rasio guru terhadap murid secara merata).

## 2. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu target dari Sustainable Development Goals (SDGs) atau lazimnya disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian SDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Semakin tinggi nilai APS berarti Semakin besar jumlah penduduk yang masih mengenyam pendidikan pada suatu jenjang tertentu.

Terkait perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2020 untuk kelompok umur 7-12 tahun cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan di mana pada tahun 2017, tercatat APS Kabupaten Barito Selatan berada pada angka 100 persen dan selanjutnya mengalami penurunan secara berturut-turut yakni pada tahun 2018 berada pada besaran 99,22 persen dan pada tahun 2020 berada pada angka 98,82 persen. Selanjutnya, untuk kelompok umur 13-15 tahun angka partisipasi sekolah cenderung fluktuatif dan juga mengalami sedikit penurunan di mana pada tahun 2017 berada pada angka 97,61 persen dan pada tahun 2020 berada pada angka 97,03 persen.

**Tabel 2. 33**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	Capaian Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Selatan (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi	94,17	100	100	96,98	98,8	NA

Indikator Kinerja	Capaian Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Barito Selatan (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sekolah (APS) SD/MI (7-12 Tahun)						
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (13-15 Tahun)	62,21	92,42	84,11	86,97	96,64	NA

Sumber : BAPPEDA Barito Selatan Tahun 2022, diolah

### 3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang berkesesuaian. Berikut perkembangan APM di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2016-2020.

**Tabel 2. 34**  
**Angka Partisipasi Murni Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
APM SD/MI	93,09	90,08	98,38	87,75	98,32	NA
APM SMP/MTs	70,04	66,45	70,27	58,23	89,52	NA

Sumber : BAPPEDA Barito Selatan Tahun 2022, diolah

Secara umum, APM Kabupaten Barito Selatan untuk jenjang SD/MI dalam lima tahun terakhir berada pada kategori sangat baik di mana dari tahun 2017-2020 berada pada kisaran angka hampir 100 persen, demikian pula untuk APM jenjang SMP/MTS yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan kisaran angka 90-an persen.

### 4. Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru pada suatu jenjang sekolah terhadap jumlah murid yang berguna untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar atau untuk melihat mutu pengajaran di dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai rasio berarti semakin tinggi beban kerja sehingga semakin berkurang tingkat pengawasan, perhatian dan pembimbingan dari guru terhadap muridnya.

Rasio guru/murid di Kabupaten Barito Selatan terdiri dari dua indikator yaitu rasio guru/murid terhadap murid pendidikan menengah yakni untuk pendidikan tingkat sekolah dasar dan pendidikan tingkat

sekolah menengah pertama dan rasio guru/murid terhadap murid pendidikan menengah untuk pendidikan tingkat menengah atas. Dari tahun 2016-2019 untuk setiap jenjang pendidikan seperti yang disebutkan di atas bisa dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 35**  
**Jumlah dan Rasio Guru/Murid Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Di Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Rasio Guru/Murid Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	1:8	1:10	1:8	1:8	1:8	NA
Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:11	1:13	1:11	1:11	1:10	NA

*Sumber: BAPPEDA Barito Selatan Tahun 2022, diolah*

Berdasarkan tabel di atas, bisa diketahui bahwa rasio guru/murid cenderung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2015-2019. Untuk tahun 2019, rasio guru/murid tertinggi adalah 1:10 yakni untuk SMP/Sederajat. Adapun tingkat pendidikan TK/Sederajat dan SD/Sederajat memiliki rasio sebesar 1:8 atau bisa dikatakan rasio tersebut relatif ideal. Untuk indikator kinerja lain urusan pendidikan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 36**  
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partasipasi Kasar	104,18	99,26	104,77	106,45	0	
Angka Partisipasi Murni	84,67	81,59	88,32	87,38	0	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,09	90,08	98,38	87,75	98,32	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70,04	66,45	70,27	58,23	89,52	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	94,17	100	100	96,98	98,8	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	62,21	92,42	84,11	86,97	96,64	
<b>Angka Putus Sekolah</b>						
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,16	0,12	0,07	0,28	0	
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,25	0,74	0,3	0,39	0,00	
<b>Angka Kelulusan</b>						
Angka Kelulusan SD/MI			100	100	100	

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kelulusan SMP/MTs			100	100	100	
<b>Angka Melanjutkan</b>						
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	74,64	81,16	78,19	85,46	92,72	
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	63,25			96,11		
<b>Fasilitas Pendidikan</b>						
Sekolah Pendidikan SD/ Sederajat Kondisi Bangunan Baik						
Sekolah Pendidikan SMP/Sederajat atau SMA/Sederajat Kondisi Bangunan Baik						
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	1:84	1:81	1:83	1:80	0,00	
Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata sekolah	1:8	1:10	1:8	1:8	1:8	
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar						
Penduduk yang berusia > 15 Tahun yang melek huruf	99,46	99,8	99,74	99,75	99	
Guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV	68,5%	72,93%	85,70%	92,57%	0,0	

### 2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja antara lain: Angka Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks), Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks), Rasio Posyando per satuan balita, Rasio Puskesmas per satuan penduduk, Rasio Pustu per satuan penduduk, Rasio rasio rumah sakit per satuan penduduk, Rasio rasio rumah sakit per satuan penduduk, Rasio Dokter per satuan penduduk, Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dan Cakupan Pelayanan Nifas.

**Tabel 2. 37**  
**Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks)	1	2,6	2,6	0	3,89	

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,76	99,75	99,93	99,93	99,9	
Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks)	195	1	0	251	399,29	
Rasio Posyandu per Satuan Balita	80	80	80	80	80	
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	10	10	10	10	10	
Rasio Pustu per satuan penduduk	6	10	10	6	6	
Rasio rasio rumah sakit per satuan penduduk						
Rasio Dokter per satuan penduduk	19,5	18,6	20,1	42,2	42,6	
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	0,03	0,03	0,01	0,031	0,019	
Cakupan Pelayanan Nifas	64,1%	63,6%	82%	82%	62%	

Sumber: BAPPEDA Barito Selatan Tahun 2022, diolah

### 2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam), Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor, Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Persentase penduduk berakses air minum, Rasio areal kawasan kumuh, Rasio tempat pemakaman umum per desa/kelurahan, Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, dan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.

**Tabel 2. 38**  
**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	205,15	194,22	297,73	361,66	373,96	
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	810,75	848,09	1250,53	1444,7484	1635,36	
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	0,078	0,0936	0,1092	0	1,125	
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,0752	0,0376	0	0	0	
Persentase rumah tinggal bersantasi	3,839884	3,839884	15,0863	16,73652	13,38	
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	0,04	0,02	0,20	0,02	0,02	
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	0,70	0,84	0	0	20,78	
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	0	0	0,76	0	0,37	
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	1538,05152	1706,77152	1811,488	3434,8	2035,49	
Rasio Jaringan Irigasi	0,46	0,51	173,4714	0,79	114,64	
Persentase penduduk berakses air minum	19,43	22,20	14,24	16,09	37,19	
Rasio areal kawasan kumuh	0,60	0,40	0,20	0	0	
Rasio tempat pemakaman umum per desa/kelurahan						

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk						
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	1991,38 Ha	1991,38 Ha	2100 Ha	8000	25,31	

*Sumber: BAPPEDA Barito Selatan Tahun 2022, diolah*

#### 2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur dengan indikator: Jumlah Rumah layak huni.

**Tabel 2. 39**  
**Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan**

No.	Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah rumah layak huni	778	1.252	2.050	2.185	2.245	

*Sumber : BAPPEDA Barito Selatan Tahun 2022, diolah*

#### 2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diukur dengan indikator: Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dan Persentase Penegakan PERDA.

**Tabel 2. 40**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%	100%	100%	100%	100%	
Tingkat Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)						
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	20,71%	20,71%	20,71%	20,71%	78,00%	
Tingkat Waktu Tanggap ( <i>response time rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	100%	90%	82,60%	73%	
Persentase Penegakan PERDA	75%	76%	75%	77%	79%	

### 2.3.1.6. Urusan Sosial

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Sosial diukur dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.

**Tabel 2. 41**  
**Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	75%	80%	100%	100%	100% (348)	

### 2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

#### 2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Dari keseluruhan penduduk Barito Selatan terdapat 57.346 jiwa berumur 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Berdasarkan Komposisi angkatan kerja menurut kelompok umur di Barito Selatan didominasi oleh penduduk yang berumur 15-49 tahun. Sebagian besar atau 30.824 jiwa (53,75 %) penduduk berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor Listrik, Gas dan Air yaitu 161 Jiwa atau 0,28 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 42**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian			
	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	18.738	6.052	24.790
2	Industri			

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Konstruksi	10.022	2.460	12.482
3	Jasa			
	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	13.674	12.730	26.404
<b>Jumlah</b>		<b>42.434</b>	<b>21.242</b>	<b>63.676</b>

*Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2022*

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Tenaga Kerja diukur dengan indikator : Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah dan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.

**Tabel 2. 43**  
**Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2022**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	5	6	2	4	11	
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	3	6	0	4	5	
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	2	0	0	0	0	
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30	30	20	15	0	

### 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

**Tabel 2. 44**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Capaian	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		34,73%	34,73%	24,14%		
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		36%	36%	40%		
Partisipasi perempuan di lembaga swasta		45,93%	45,93%	31,30%		
Rasio KDRT		0,14	0,14	0,14		
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur						
Partisipasi angkatan kerja perempuan		34,59%	34,59%	54,38%		
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu						
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100%	100%	100%		

### 2.3.2.3. Pangan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pangan diukur dengan indikator : Penguatan Cadangan Pangan, Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah, Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat, Penanganan Daerah Kerawanan Pangan, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital, dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

**Tabel 2. 45**  
**Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2022**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penguatan Cadangan Pangan	68,91	77,00	5,02	5,02	50,00	
Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah	80,56	93,06	97,22	97,22	106,38	

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	96,00	153,06	95,83	95,83	106,38	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	94,60	92,90	93,80	92,9	84,08	
Penanganan Daerah Kerawanan Pangan	34,80	39,29	50,00	50,00	54,69	
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	98,10	88,87	115,73	108,62	115,55	
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	59,00	82,22	87,88	87,88	133,33	

#### 2.3.2.4. Pertanian

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pertanian diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat.

**Tabel 2. 46**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanian**  
**Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2022**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pertanian					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase luas lahan bersertifikat	0,0020	1,233	1,389	2,597	1,017	

#### 2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota, Jumlah Titik Pantau Kualitas Lingkungan, dan Jumlah Perusahaan Yang Diawasi.

**Tabel 2. 47**  
**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota						

### 2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator : Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Cakupan penerbitan akta kelahiran.

**Tabel 2. 48**  
**Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Tahun 2018					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Penduduk ber- KTP per Satuan Penduduk	4.593	94,36%	98,41%	99,20%	99,98%	
Rasio bayi berakte kelahiran	4.309	83%	92,68%	93,78%	95,39%	
Rasio pasangan berakte nikah	372	31,04%	34,36%	40,53%	80,06%	
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	Sudah	
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	4.593	93,04%	97,47%	99,17%	99,98%	
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	4.309	55,89%	89,36%	93,26%	95,03%	

*Sumber : BAPPEDA Barito Selatan Tahun 2022, diolah*

### 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator : Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Persentase LSM aktif, Persentase LPM Berprestasi, Persentase PKK aktif, Persentase Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 2. 49**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	60%	70%	70%	75%	65%	
Persentase LSM Aktif	42%	42%	43%	40%	45%	
Persentase LPM berprestasi	65%	75%	80%	80%	65%	
Persentasi PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	80%	
Persentase Posyandu Aktif	26,2%	26,2%	26,2%	93%	30%	
swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	45%	50%	50%	70%	80%	
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	45%	50%	50%	80%	80%	

#### **2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator : Rata-rata jumlah anak per keluarga, Ratio Akseptor KB, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB, Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan, Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri, Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, dan Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa.

**Tabel 2. 50**  
**Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan**  
**Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah anak per keluarga						
Ratio Akseptor KB		0,78	0,78	0,72		
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun		78,00%	78,00%	72%		
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		2,18	2,18	2,18		
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		12,85	12,85	11,67		
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				13,35%		
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		86,93	86,93	79,53		
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		90,00	90,00	88,06		
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		75,80	75,80	75,27		
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		76,21	76,21	66,67		
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		50,00	50,00	76,72		
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		93%	93%	93%		
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa		1	1	1		

### 2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perhubungan diukur dengan indikator : Jumlah arus penumpang angkutan umum, Rasio ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Sungai/Udara/Terminal Bis, Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit), Pemasangan Rambu Sungai (Unit), Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, dan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum.

**Tabel 2. 51**  
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah arus penumpang angkutan umum	75%	85%	90%	0%	8.328	
Rasio ijin trayek	1.325 Orang	1.235 Orang	1.120 Orang	310 Orang	25	
Jumlah uji kir angkutan umum	5.300 Orang	4.000 Orang	6.000 Orang	1.250 Orang	561 Unit	
Jumlah pelabuhan Sungai /Udara/Terminal Bis	54%	-	-	7%	8	
Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	70%	-	3%	3%		
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	300 Buah	240	240	320		
Jumlah orang/barang yang bersangkutan angkutan umum	250	-	-	10	43.040	

#### 2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Komunikasi dan Informatika diukur dengan indikator Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dan Proporsi rumah tangga dengan akses internet.

**Tabel 2. 52**  
**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		76,33%	76,33%	85,00%	92,60%	
Proporsi rumah tangga dengan akses internet		31,70%	31,70%	65,00%	73,20%	

#### 2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah diukur dengan indikator : Persentase koperasi aktif, Persentase UKM non BPR/LKM aktif, Persentase BPR/LKM aktif dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil.

**Tabel 2. 53**  
**Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase koperasi aktif	207	209	37	42	11	
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100%	100%	100%			
Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%			
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100%	100	100	8.859	2.801	

### 2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

**Tabel 2. 54**  
**Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	28	28	28	14	38	
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta rupiah)						
PMDN dalam Miliar Rupiah	476	428.655.150.000	26.730,1	26.730,1		
PMA dalam US \$ Ribu	1,215	1.423.156.350.000	10.987,7	10.987,7		

### 2.3.2.13. Urusan Statistik

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Statistik diukur dengan indikator Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB".

**Tabel 2. 55**  
**Capaian Kinerja Urusan Statistik**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Buku "kabupaten dalam angka"	1	1	1	1	1	1
Buku "PDRB"	1	1	1	1	1	

#### 2.3.2.14. Urusan Persandian

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Persandian diukur dengan indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

**Tabel 2. 56**  
**Capaian Kinerja Urusan Persandian**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			30,00%	60%	60%	

#### 2.3.2.15. Urusan Perpustakaan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perpustakaan diukur dengan indikator : Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah, Rasio perpustakaan persatuan penduduk, Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun, Jumlah koleksi judul buku perpustakaan dan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

**Tabel 2. 57**  
**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan**  
**Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	6.820	7.801	5.500	7.818	2495	
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	32.767	31.412	31.412	31.412	33.718	
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,56%	0,59%	0,59%	0,62%	0,65%	
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	568,33	650,08	458,33	651,50	207,92	
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	28.757	28.080	28.080	28.080	16860	
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	8	10	12	14	16	

### 2.3.2.16. Urusan Kearsipan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kearsipan diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

**Tabel 2. 58**  
**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	3%	20%	40%	57%	60%	
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	1	2	2	3	

### 2.3.2.17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga diukur dengan indikator Persentase organisasi pemuda yang aktif.

**Tabel 2. 59**  
**Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase organisasi pemuda yang aktif	98%	98%	98%	98%	60%	

## 2.3.3. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

### 2.3.3.1. Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan. Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan pariwisata diukur dengan indikator Kunjungan wisata.

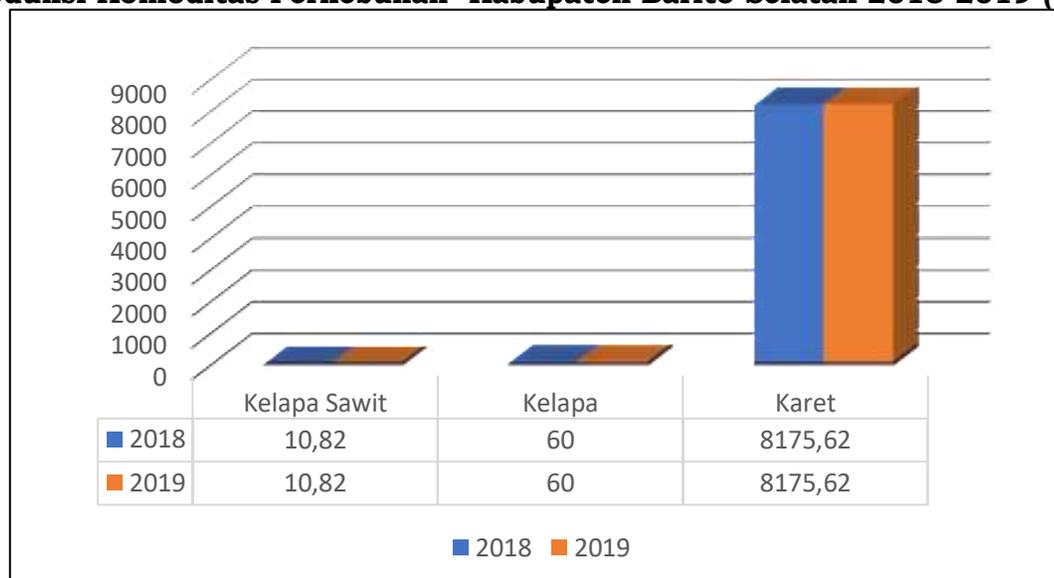
**Tabel 2. 60**  
**Capaian Kinerja Urusan Pariwisata**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kunjungan wisata Mancanegara	0%	0%	0,08%	0%		
Kunjungan wisata Lokal/Nusantara	49,85%	24,18%	30,25%	26,02%	8.432	

### 2.3.3.2. Urusan Pertanian

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap devisa maupun lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam kehidupan social budaya masyarakat Barito Selatan. Pada tahun 2019 luas panen padi sawah adalah 2.399 Ha dengan produktivitas sebesar 2874 ton/Ha. Terjadi penurunan produktivitas apabila dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 3.362 ton/Ha. Secara keseluruhan produksi padi di Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 6.894 ton. Sementara itu, untuk sektor perkebunan dan kehutanan masih menjadi komoditas utama Kabupaten Barito Selatan dengan luas kebun pada tahun 2019 adalah 32.907 Ha dan produksi 8.175,62 ton dengan rincian luas areal tanam masing-masing adalah perkebunan karet sebesar 32.907 Ha, Kelapa Sawit 1076,7 Ha dan kelapa sebesar 509,66 Ha. Untuk lebih jelasnya terkait dengan produksi sektor perkebunan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2. 27**  
**Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Barito Selatan 2018-2019 (Ton)**



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020

Dari sektor peternakan dan perikanan, ternak babi hingga tahun 2019 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 15.724 ekor, sedangkan untuk jenis unggas, ayam pedaging merupakan jenis ternak terbanyak populasinya yaitu 693.459 ekor.

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pertanian diukur dengan indikator Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB.

**Tabel 2. 61**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanian**  
**Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018**

Indikator	Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-	2,02	1,90	1,90	1.593,07	
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	-	-	7,09	7,09	8.328,87	

#### 2.3.3.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diukur dengan indikator Persentase rumah tangga pengguna listrik.

**Tabel 2. 62**  
**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tangga pengguna listrik Desa	89,25	92,47	92,47	93,55	94,62	
Persentase rumah tangga pengguna listrik RT	82,19	81,42	79,47	79,78	86,93	

#### 2.3.3.4. Urusan Perdagangan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perdagangan diukur dengan indikator Ekspor bersih perdagangan dan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

**Tabel 2. 63**  
**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan**  
**Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	2000	3037	3037	3.037	599	

### 2.3.3.5. Urusan Perindustrian

Sektor industri pengolahan di Barito Selatan hanya mencakup sub sektor industri non migas karena di kabupaten ini tidak terdapat industri migas. Berdasarkan NTB yang terbentuk, sektor ini mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 6,49 persen dan kontribusi sebesar 6,58 persen terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2017.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian, dikarenakan industri di Kabupaten Barito Selatan masih merupakan industri berbasis sumber daya alam atau industri yang menggunakan output sektor pertanian sebagai bahan baku, seperti karet, kayu, dan hasil pertanian lainnya. Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perindustrian diukur dengan indikator Cakupan bina kelompok pengrajin.

**Tabel 2. 64**  
**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok pengrajin	30 IKM	28 IKM	30 IKM	30 IKM	5 Kelompok	

### 2.3.3.6. Transmigrasi

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Transmigrasi diukur dengan indikator Persentase transmigran swakarsa.

**Tabel 2. 65**  
**Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase transmigran swakarsa						

**2.3.3.7. Kelautan dan Perikanan**

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kelautan dan Perikanan diukur dengan indikator : Produksi perikanan, Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk), Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org), Produksi Hasil Budidaya Ikan, Kolam Ikan, Keramba dan KJA, Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari, Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk), Jumlah Penanganan Kasus Ilegal Fishing (Kasus), Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali), Usaha Pengelolaan, Nilai tukar nelayan, Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber Daya Perikanan (Reservaat (Danau), Restocking (Ekor), Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje).

**Tabel 2. 66**  
**Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi perikanan	15.518,88	14.777,20			6.697,00	
Konsumsi Ikan	41,16	42,00	42,13	44,40	41,50	
Cakupan Bina Kelompok Nelayan					524,00	
Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan yang dibina (Klpk)	38	48	30		22,00	
Jumlah Petugas yang Mengikuti Diklat Teknis (Org)	7	5	-		-	
Produksi Hasil Budidaya Ikan					8.943,36	
Kolam Ikan	2.617,33	1.853,48	1.989,64	2.027,23	1.991,06	
Keramba dan KJA	6.142,41	6.570,71	6.603,18	6.739,40	6.952,30	
Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari						
- Jumlah Pokmaswas yang dibina (Klpk)	21	32	35	35,00	5	
- Jumlah Penanganan Kasus Ilegal Fishing (Kasus)	-	-	4	4	1	
- Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali)	7	2	2	2 Kali	-	
Usaha Pengelolaan	140	145	135	135,00	140,00	

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tukar Nelayan	105,20	106,00	-	0%		
Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber Daya Perikanan						
- Reservat (Danau)	-	6,00	6,00	6,00	8	
- Restocking (Ekor)	-	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000	
- Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah)	-	60,00	30,00	30,00	-	

### 2.3.4. Penunjang Urusan

#### 2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator : Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA dan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.

**Tabel 2. 67**  
**Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	89,58%	82,50%	106,67%	93,07%	81,39%		
----------------------------------------------------	--------	--------	---------	--------	--------	--	--

### 2.3.4.2. Keuangan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Keuangan diukur dengan indikator : Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana, Persentase belanja pendidikan (20%), Persentase belanja kesehatan (10%), Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kabupaten/kota dan desa, dan Penetapan APBD.

**Tabel 2. 68**  
**Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Persentase SILPA	9,36%	7,53%	8,53%	8,53%	8,53%	
Persentase SILPA terhadap APBD	9,36%	7,53%	8,94%	5,06%	8,40%	
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	9,36%	7,53%	2,80%	3,20%	17,12%	
Persentase belanja pendidikan (20%)	27,55%	26,25%	24%	25%	21,12%	
Persentase belanja kesehatan (10%)	10,56%	15,98%	17,41%	13,20%	13,62%	
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	55/46	55/45	56/44	56/45	49/34	
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	529.246.100,00	2.042.972.538,00	1.240.952.900,00	11.307.265,00	1.365.809.900,00	
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	

#### 2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diukur dengan indikator : Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

**Tabel 2. 69**  
**Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta**  
**Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	4 Bulan	4 Bulan	-		
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	88%	64%	82%	83,33%		
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40%	0%	73%	0%		
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	27 Orang	28 Orang	25 Orang	30 Orang	28 Orang	
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	126 Orang	123 Orang	129 Orang	134 Orang	134 Orang	
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2207 Orang	2194 Orang	2193 Orang	1940 Orang	1915 Orang	

#### 2.3.4.4. Pengawasan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pengawasan diukur dengan indikator : Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai dan Jumlah temuan BPK.

**Tabel 2. 70**  
**Capaian Kinerja Urusan Pengawasan**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase tindak lanjut temuan	74,25%	72,96%	72,01%	71,62%	76,62%	
Persentase pelanggaran pegawai	15%	20%	10%	25%	5%	
Jumlah temuan BPK	23	20	17	12	9	

#### 2.3.4.5. Sekretariat Dewan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Sekretariat Dewan diukur dengan indikator : Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

**Tabel 2. 71**  
**Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan**  
**Kabupaten Barito Selatan**

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD (Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna)	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	8 Raperda	9 Raperda	5 Raperda	9 Raperda	3 Raperda	
Terintegrasi Program-program DPRD untuk	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	

Indikator	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD						

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus iklim investasei

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi baik komoditas makanan maupun bukan makanan selama sebulan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk

non makanan. Untuk rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat di tabel berikut ini,

**Tabel 2. 72**  
**Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Bulan**  
**Kabupaten Barito Selatan**

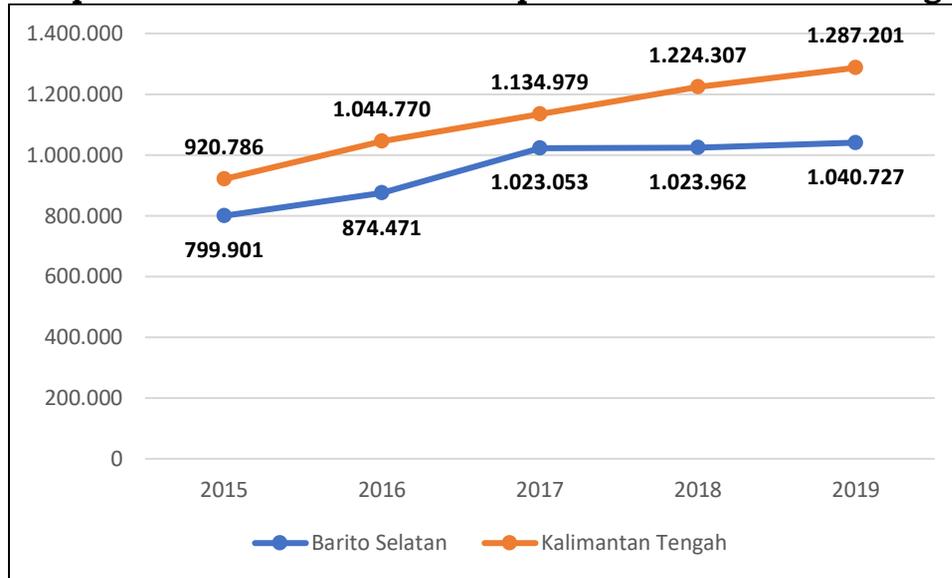
Tahun	Makanan (Rp)	Non Makanan (Rp)	Total (Rp)	Persentase Pengeluaran Makanan	Persentase Pengeluaran Non Makanan
2017	589.290	433.763	1.134.979	57,60	42,40
2018	567.545	456.763	1.224.307	55,43	44,57
2019	564.978	475.749	1.287.201	54,29	45,71
2020	NA	NA	NA	NA	NA
2021	NA	NA	NA	NA	NA
2022	NA	NA	NA	NA	NA

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Barito Selatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata total pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.134.979 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi Rp.1.287.201. Untuk proporsi rata-rata pengeluaran konsumsi, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 masih didominasi oleh rata-rata pengeluaran konsumsi makanan. Meskipun begitu, selama beberapa tahun terakhir persentase tersebut mulai bergeser ke arah pengeluaran non makanan yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Barito Selatan terus membaik karena pengeluaran untuk kebutuhan primer (makanan) sedikit demi sedikit bergeser ke pengeluaran kebutuhan sekunder dan tersier.

Jika dibandingkan dengan rata-rata total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015 ke tahun 2019, rata-rata total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Barito Selatan masih cenderung berada di bawah rata-rata total pengeluaran konsumsi rumah tangga Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2. 28**  
**Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/Bulan**  
**Kabupaten Barito Selatan Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah**



Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka  
 Dari Beberapa Edisi, diolah

#### 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani dan Produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani. Jika nilai NTP > 100 maka petani mengalami surplus, jika nilai NTP = 100 petani mengalami impas serta NTP < 100 petani mengalami defisit. NTP Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 73**  
**NTP Kabupaten Barito Selatan**

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
It *)	NA	123,96	127,71	NA	NA	NA
Ib **)	NA	128,1	132,42	NA	NA	NA
NTP ***) (Indikator Kinerja)	NA	96,77	96,45	NA	NA	NA
Pertumbuhan NTP	Na	NA	-0,3 %	NA	NA	NA

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020

\*) It : Indeks harga yang diterima petani    \*\*) Ib : Indeks harga yang dibayar petani

\*\*\*) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Barito Selatan mengacu kepada tabel di atas mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar -0,3 persen dimana pada tahun 2018, NTP berada pada angka 96,77 dan pada tahun 2019, NTP berada pada angka 96,45. Berdasarkan besaran NTP di tahun 2019 bisa dikatakan bahwa petani mengalami defisit mengingat nilai NTP < 100. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama para *stakeholder* terkait peningkatan efisiensi dan produktifitas di bidang pertanian mengingat sampai saat ini, sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbesar serta juga merupakan sektor lapangan usaha yang masuk ke dalam tiga besar dalam berkontribusi membentuk PDRB Kabupaten Barito Selatan.

Bila ditelaah lebih lanjut terkait Nilai Tukar Petani (NTP) untuk setiap sub sektor di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019, sub sektor perikanan memiliki NTP tertinggi dengan nilai 110,03 yang mana terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan NTP tahun 2018 yang memiliki angka sebesar 108,67. NTP tertinggi lainnya adalah sub sektor hortikultura dengan angka sebesar 104,07 yang meningkat apabila dibandingkan dengan NTP tahun 2018 dengan angka sebesar 103,1. Kedua sub sektor inilah yang menjadi sub sektor andalan Kabupaten Barito Selatan untuk sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya terkait dengan perbandingan setiap sub sektor di tahun 2018 dan 2019 bisa dilihat pada gambar berikut ini

**Gambar 2. 29**  
**Nilai Tukar Petani Per Sub Sektor**  
**di Kabupaten Barito Selatan 2018-2019**



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2020

### 2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang memiliki manfaat untuk menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja di ketujuh belas sektor tersebut. Adapun yang menjadi kendala dalam perhitungan produktivitas total daerah di Kabupaten Barito Selatan adalah terkait dengan format data yang tersedia, di mana ada perbedaan antara format data lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari 9 sektor terhadap data PDRB yang memuat 17 sektor atau lapangan usaha sehingga harus dilakukan penyesuaian. Berikut capaian produktivitas total daerah di Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2019.

**Tabel 2. 74**  
**Produktivitas Daerah Kabupaten Barito Selatan**

Lapangan Pekerjaan Utama	Capaian		
	2017		
	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHB (milyar)	Produktivitas (juta/thn)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	27.024	1.018,5	37.688.721,1
Pertambangan dan penggalian	2.738	1.046,0	382.030.679,3
Industri Pengolahan	2.602	338,5	130.092.236,7
Listrik, gas dan air	205	10,0	48.780.487,8
Bangunan	4.980	354,3	71.144.578,3
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	8.337	544,4	65.299.268,3
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	498	690,4	1.386.345.381,5
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	751	385,1	512.782.956,1
Jasa Kemasyarakatan, sosial dan Perorangan	9.950	1.022,8	102.793.969,8
<b>Jumlah</b>	<b>57.085</b>	<b>5.410</b>	<b>94.770.955,6</b>
Lapangan Pekerjaan Utama	Capaian		
	2018		
	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHB (milyar)	Produktivitas (Juta/Tahun)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	24.423	1.084,7	44.413.053,27
Pertambangan dan penggalian	4.127	1.154,0	279.622.001,45
Industri Pengolahan	4.573	348	76.098.841,02
Listrik, gas dan air	258	11,4	44.186.046,51

Bangunan	4.648	392,1	84.358.864,03
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	9.340	594,1	63.608.137,04
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	966	791,9	819.772.256,73
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	737	420,0	569.877.883,31
Jasa Kemasyarakatan, sosial dan Perorangan	9.592	1.146,9	119.568.390,33
<b>Jumlah</b>	<b>58.664</b>	<b>5.943,1</b>	<b>101.307.445,79</b>
<b>Lapangan Pekerjaan Utama</b>	<b>Capaian</b>		
	<b>2019</b>		
	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>	<b>PDRB ADHB (milyar)</b>	<b>Produktivitas (Juta/Tahun)</b>
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	30.189	1.173,3	38.865.149,56
Pertambangan dan penggalian	4.356	1.160,0	266.299.357,21
Industri Pengolahan	3.258	365,7	112.246.777,16
Listrik, gas dan air	552	13,5	24.456.521,74
Bangunan	3.226	435,8	135.089.894,61
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	8.940	512,7	57.348.993,29
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.021	831,4	814.299.706,17
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	326	457,7	1.403.987.730,06
Jasa Kemasyarakatan, sosial dan Perorangan	14.443	1.275,7	88.326.524,96
<b>Jumlah</b>	<b>66.311</b>	<b>5.410</b>	<b>93.887.891,903</b>

*Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Dari Beberapa Edisi, diolah*

Mengacu kepada tabel di atas, lapangan pekerjaan utama yang memiliki produktivitas relatif rendah apabila melihat perbandingan nilai PDRB yang dihasilkan terhadap jumlah tenaga kerja adalah *sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan* yang nilai produktivitasnya pada tahun 2019 hanya berada pada angka 38.865.149,56 per tahun atau sekitar 3.238.762 per bulan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor ini mengingat 45 persen dari masyarakat Kabupaten Barito Selatan bekerja di sektor tersebut dengan mengembangkan industri hulu hilir di sektor pertanian untuk memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian. Adapun sektor dengan produktivitas tertinggi adalah sektor *Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan* yang memiliki produktivitas sebesar Rp.1.403.987.730,06 atau sebesar Rp.116.998.978 per bulan.

#### 2.4.2. Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupu internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan dan konsistensi investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan ekonomi.

##### 2.4.3.1. Kriminalitas

Angka kriminalitas di suatu wilayah akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi sehingga tingg atau rendahnya angka kriminalitas akan mempengaruhi kondusivitas investasi. Angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2018, tercatat terjadi 63 tindak pidana atau meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 45 tindak pidana. Kasus pencurian mendominasi angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2018 yang terbagi menjadi 12 kasus pencurian berat (curat), 2 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan 8 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian, salah satunya adalah desakan ekonomi sehingga kondisi ini patut menjadi perhatian pemerintah dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan untuk menekan angka tindak pidana pencurian. Jumlah tindak pidana berdasarkan jenis tindak pidana di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 75**  
**Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana di Kabupaten Barito Selatan**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	Jumlah	93	107	91	NA	NA	NA
Jumlah Penduduk	Jumlah	134.543	135.736	136.796	NA	NA	NA
Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Kasus Tertangani /10.000 penduduk	6,9	7,8	6,5	NA	NA	NA

*Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020, diolah*

Berdasarkan data di atas, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupatean Barito Selatan cukup fluktuatif dari tahun 2017 sampai tahun 2019, dimana pada tahun 2019 mencapai angka 6,5 yang berarti terdapat 6-7 tindak kriminalitas yang tertangani di antara 10.000 penduduk Kabupaten Barito Selatan.

### 2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

#### 2.4.1.1. Kualitas Tenaga Kerja

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang akan menentukan arah tujuan pembangunan. Sebagai pondasi pelaksana pembangunan, setiap individu menjadi penentu dalam setiap aktivitas pembangunan melalui partisipasinya salah satunya dalam hal kualitas angkatan kerja mengingat semakin tinggi kualitas angkatan kerja maka produktivitas akan semakin meningkat yang pada akhirnya dengan produktivitas yang tinggi akan berkontribusi kepada peningkatan perekonomian suatu wilayah. Di kabupaten Barito Selatan, salah satu pendekatan untuk melihat seberapa besar kualitas tenaga kerja adalah melalui tingkat pendidikan angkatan kerja yang mana dari tahun ke tahun, peningkatan kualitas pendidikan angkatan kerja terus mengalami perbaikan. Pada tahun 2016, kualitas pendidikan angkatan kerja untuk tingkat pendidikan Diploma/ S-1/S-2/S3 hanya berada pada kisaran 13,7 persen dari total angkatan kerja yang menjadi 15,2 persen pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 76**  
**Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Kabupaten Barito Selatan**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Capaian					
	2017		2018		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak/Belum Tamat SD	7488	13,0	7.361	12,0	5.582	8,1
Sekolah Dasar	17380	30,1	16.968	27,7	17.126	24,7
Sekolah Menengah Pertama	12574	21,8	12.184	19,9	13.798	19,9
Sekolah Menengah Atas	12819	22,2	13.506	22,0	17.234	24,9
Sekolah Menengah Kejuruan	1255	2,2	3.563	5,8	4.927	7,1
Diploma/S-1/S-2/S-3	6182	10,7	7.736	12,6	10.539	15,2
<b>Jumlah</b>	<b>57.698</b>	<b>100,0</b>	<b>61.318</b>	<b>100,0</b>	<b>69.206</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka dari berbagai edisi

#### 2.4.1.2. Tingkat Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Konsep tingkat ketergantungan adalah untuk mengetahui seberapa besar beban tanggungan penduduk yang berada di usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk di usia tidak produktif (< 15 tahun dan > 64 tahun). Untuk Kabupaten Barito Selatan, tingkat ketergantungan dari tahun 2017–2019 cenderung menurun yakni pada tahun 2017, rasio ketergantungan berada pada angka 47 dan pada tahun 2019 berada pada angka 46 yang berarti setiap 100 orang yang berada didalam kategori usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah di tengah melimpahnya penduduk kabupaten Barito Selatan yang berusia produktif agar tetap bisa mengakomodir penyediaan lapangan pekerjaan agar SDM yang dimiliki tidak bocor ke luar daerah.

**Tabel 2. 77**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Non Produktif Terhadap Penduduk Usia Produktif Kabupaten Barito Selatan**

Uraian	Capaian					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk < 15 Tahun	38.098	37.901	37.649	NA	NA	NA
Jumlah Penduduk > 64 Tahun	5.014	5.217	5.448	NA	NA	NA
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	43.112	43.118	43.097	NA	NA	NA
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun (usia produktif)	91.431	92.618	93.699	NA	NA	NA
<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	NA	NA	NA

*Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Dari Beberapa Edisi, diolah*

#### 2.5 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh capaian kinerja utama RPJMD Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Tahun 2021, terdapat beberapa indikator kinerja utama yang tercapai bahkan melebihi target yang direncanakan, namun adapula indikator yang masih belum tercapai. Untuk indikator yang masih belum tercapai diperlukan adanya upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja dan menjadi prioritas pembangunan tahun 2023-2026, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan nantinya dapat tercapai dengan baik.

**Tabel 2.78**  
**Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>CAPAIAN 2021</b>	<b>TARGET</b>	<b>STATUS</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>
Pertumbuhan Ekonomi	2,03	7,80	Tidak Tercapai	Hal ini banyak dipengaruhi oleh dampak terjadinya pandemi Covid-19
Gini Rasio	0,286	0,35	Tercapai	Capaian melebihi target yang ditetapkan
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,16	4,40	Tercapai	Capaian melebihi target yang ditetapkan
Indeks Pembangunan Manusia	70,54	72,22	Tidak Tercapai	
Umur Harapan Hidup	67,19	72,04	Tidak Tercapai	Target yang ditetapkan di RPJMD terlalu tinggi
Harapan Lama Sekolah	12,66	12	Tercapai	Capaian melebihi target yang ditetapkan

## **2.6 Sustainable Development Goals (SDG's)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030 dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Terdapat 17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's), seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.30

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)



Sumber : <https://sdgs.bappenas.go.id/>

**Tabel 2.79**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja SDGs**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Daerah	Capaian kinerja tahun 2021
1.	Tanpa kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	6.420 Jiwa
2.	Tanpa kelaparan	Prevalensi stunting	17 %
3.	Kehidupan sehat dan sejahtera	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	- 399 - 3
4.	Pendidikan berkualitas	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99 %
5.	Kesetaraan gender	Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD	10 kursi
6.	Air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi.	13,38
7.	Energi bersih dan terjangkau	- Rasio elektrifikasi	n/a
8.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	- Laju pertumbuhan PDRB - Tingkat Pengangguran terbuka	- 2,03 - 4,16
9.	Industri, Inovasi dan infrastruktur	- Kondisi mantap jalan	379,96 km
10.	Berkurangnya kesenjangan	- Rasio Gini - Indeks Desa Membangun	- 0,286 - 0,6522
11.	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	Jumlah rumah layak huni	2.245
12.	Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	- Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	

13.	Penanganan perubahan iklim	- Tersedianya strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	
14.	Ekosistem lautan	-	Tidak ada wilayah laut di Barito Selatan.
15.	Ekosistem Darat	- Luas kawasan hutan	507 262,27 Ha
16.	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	- Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B - Persentase bayi berakta kelahiran	95,39 %
17.	Kemitraan untuk mencapai tujuan	- Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	n/a

### 2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan SPM di Indonesia merupakan amanat dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan pengganti dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

SPM di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 bisa dilihat pada Tabel berikut ini

**Tabel 2.80**  
**Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						KETERANGAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
<b>A.</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>							
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						KETERANGAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
<b>B.</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						KETERANGAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah Warga Negara penderita terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara penderita dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap tahun	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
2023-2026



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						KETERANGAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
<b>C. Bidang Pekerjaan Umum</b>								
1.	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa Jumlah barang, jasa dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum.
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%	Setiap tahun	
<b>D. Bidang Perumahan Rakyat</b>								
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa Jumlah barang, jasa dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang perumahan rakyat.
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni.	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100%	Setiap tahun	
<b>E. Bidang Trantibumlinmas</b>								
1.	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang trantibumlinmas.

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						KETERANGAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
2.	peayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
3.	peayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
4.	peayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
<b>F.</b>	<b>Bidang Sosial</b>							
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial.
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%		

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						KETERANGAN
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%	Setiap tahun	

## **2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

### **2.8.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan**

### **2.8.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

#### **1. Pendidikan**

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- a. Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- b. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya terwujud.
- c. Jumlah minimum guru masih belum terpenuhi.
- d. Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik.
- e. Program dan kegiatan terhambat oleh pandemi Covid-19.
- f. Kenaikan jabatan kepala sekolah terhambat karena sertifikasi-perjalanan dinas tidak dapat dilakukan.
- g. Proses belajar mengajar terganggu terutama karena belum semua sekolah, guru, dan peserta didik terlayani jaringan internet/paket internet untuk menunjang pembelajaran daring.

#### **2. Kesehatan**

Prioritas bidang kesehatan memiliki sasaran meningkatnya usia harapan hidup. Dari 10 indikator kinerja yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup capaian kinerja 3,83 kasus dari target 4 kasus, Angka Kelangsungan Hidup Bayi capaian kinerja 99,9% dari target 99,9%, Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup

capaian kinerja 339,9 dari target 45, Rasio Posyandu per Satuan Balita capaian kinerja 80%: dari target 1:50, Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk capaian kinerja 10 dari target 10:100.00, Rasio Pustu per Satuan Penduduk capaian kinerja 6 dari target 6:10.000, Rasio Dokter per Satuan Penduduk capaian kinerja 42,6 dari target 42:100.00, Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan capaian kinerja 0,019 dari target 3%, dan Cakupan Pelayanan Nifas capaian kinerja 62% dari target 85%.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain:

- a. Angka harapan hidup masyarakat Barito Selatan yaitu 67,19 tahun masih dibawah rata-rata nasional 73,5 tahun.
- b. Tingginya angka stunting.
- c. Tingginya angka kematian bayi.
- d. Tenaga kesehatan yang masih sangat kurang yaitu dokter gigi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan di 12 PKM.
- e. Masih rendahnya jumlah jamban yang dimiliki warga.
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. Salah satu sistem jaringan prasarana adalah sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan jalan merupakan bagian dari Sistem jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Jaringan jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem jaringan jalan yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat

mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah ini menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan pada wilayah tertentu, selain itu jaringan jalan juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan adanya sistem jaringan jalan yang terkoneksi antar wilayah diharapkan dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya merata di semua daerah. Dengan dibangun/ditingkatkannya infrastruktur jalan, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana jalan yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Menghubungkan Jaringan jalan antar desa, desa ke kecamatan dan desa/kecamatan ke ibu kota kabupaten merupakan tantangan bagi Kabupaten Barito Selatan ke depan karena masih terdapat 3 kecamatan belum sepenuhnya terhubung ke ibu kota kabupaten dan harus menggunakan transportasi air, terkecuali terlebih dahulu melewati kabupaten tetangga.

Capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kabupaten Barito Selatan rentang waktu tahun 2017-2021 dari total panjang jalan keseluruhan 1.035,040 Km yaitu target tahun 2017 sepanjang 421,66 Km (0,41) dan realisasi 613,158 Km (0,59), Target tahun 2018 sepanjang 463,83 Km (0,45) dan realisasi 559,439 Km (0,54), Target tahun 2019 sepanjang 510,21 Km (0,49) dan realisasi 483,670 Km (0,47), Target tahun 2020 sepanjang 561,23 Km (0,54) dan realisasi 648,35 Km (0,63), Target tahun 2021 sepanjang 617,35 Km (0,60) dan realisasi 680,970 Km (0,66). Dari data tersebut, Pada tahun 2019 terjadi penurunan proporsi

panjang jalan dalam kondisi baik dan capaiannya di bawah target. Selanjutnya dari tahun 2020-2021 proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi 0,63 di tahun 2020 dan 0,66 di tahun 2021. Panjang jalan dalam kondisi baik mulai mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan beberapa ruas jalan dengan skema Proyek Multiyears dari Tahun 2018-2020.

- b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)  
Berbanding lurus dengan proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) persentase capaian tahun 2017-2018 melebihi target yang ditetapkan yaitu target tahun 2017 sebesar 40,71 persen dan realisasi 59,24 persen, target tahun 2018 sebesar 44,81 persen dan realisasi 54,05 persen, target tahun 2019 sebesar 49,29 persen dan realisasi 46,73 persen, target tahun 2020 sebesar 54,22 persen dan realisasi 62,64 persen, target tahun 2021 sebesar 59,65 persen dan realisasi dengan 65,79 persen.
- c. Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air( minimal 1,5 m)  
Prasarana drainase dominan hanya terdapat di daerah Kota Buntok yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dibanding kecamatan lainnya. Untuk kawasan pedesaan, drainase banyak dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat. Rata-rata masyarakat membangun drainase lebih bersifat swadaya. Pembangunan tersebut lebih pada kebutuhan untuk mengalirkan air pemakaian rumah tangga keperluan sehari-hari.  
Capaian panjang jalan bertrotoar dan berdrainase yang disediakan bagi pejalan kaki mengalami peningkatan namun belum signifikan atau masih jauh dari target yang ditetapkan dalam rentang waktu tahun 2017-2021, Capaian tahun 2017 sebesar 0,078 persen dari target 10 persen, capaian tahun 2018 sebesar 0,094 persen dari target 12 persen, capaian tahun 2019 sebesar 0,109 persen dari target 14 persen, capaian tahun 2020 sebesar 0,109 persen dari target 16 persen dan capaian tahun 2021 sebesar 1,125 persen dari target 18 persen. Peningkatan dan pembangunan trotoar dan

drainase ini setiap tahunnya terfokus di Kota Buntok karena Kota Buntok sebagai ibu kota kabupaten yang merupakan wilayah perkotaan yang perlu ditata.

- d. Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar diperoleh dari panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar dibagi panjang seluruh sempadan jalan kabupaten. Capaian Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar belum mencapai target yang ditetapkan dari Tahun 2017-2021, namun terus mengalami penurunan, yaitu 5,79 persen di tahun 2017 dari target 2 persen, 5,16 persen di tahun 2018 dari target 1 persen, 4,93 persen di tahun 2019 dari target 1 persen, 4,64 persen di tahun 2020 dari target 1 persen dan 4,53 persen di tahun 2021 dari target 1 persen. Capaian sampai tahun 2021 masih di atas 1 persen. Penurunan ini menunjukkan telah dilakukan penataan, terkhususnya di Kota Buntok dan Sababilah sebagai wilayah pengembangan kota.

- e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Capaian persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barito Selatan sepanjang tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 sebesar 36 persen dari target 30,67 persen, pada tahun 2018 sebesar 52,18 persen dari target 30,67 persen, pada tahun 2019 sebesar 4,01 persen dari target 25,57 persen, pada tahun 2020 sebesar 50,48 persen dari target 25,32 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 64,73 persen dari target 20,67 persen. Penurunan persentase pada tahun 2019 disebabkan perubahan pola perhitungan menyesuaikan dengan aplikasi SPM dari Pemerintah Pusat dimana sektor persampahan bukan lagi bagian perhitungan SPM akses sanitasi layak, sehingga penyesuaian perhitungan capaian baru dapat dilakukan mulai tahun 2020. Berdasarkan target exercise/distribusi Provinsi Kalimantan Tengah bahwa target akses sanitasi layak Kabupaten Barito Selatan sebesar 69 persen sampai tahun 2024.

Capaian sampai tahun 2021 ini merupakan keberhasilan Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Barito Selatan yang telah mengupayakan tercapainya target melalui berbagai program mulai dari pemicuan, pembangunan jamban sehat bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR), pembangunan SPALD skala komunal yang didanai dari APBD Kabupaten, DAK, Dana Desa serta swasta (CSR).

- f. Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar  
Persentase capaian indikator sempadan sungai yang dipakai bangunan liar diperoleh dari panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi panjang seluruh sempadan sungai di Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu 2017-2021. Persentase tidak mengalami penurunan yaitu tetap sebesar 2 persen dimana target sampai dengan tahun 2021 sebesar 1 persen. Hal ini menunjukkan belum ada penanganan atau penertiban bangunan liar di sempadan sungai.
- g. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat  
Dari Kurun waktu tahun 2017-2021, capaian persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Barito Selatan yaitu capaian tahun 2017 sebesar 7 persen dari target 10 persen, capaian tahun 2018 sebesar 7 persen dari target 12 persen, capaian tahun 2019 sebesar 7 persen dari target 16 persen, capaian tahun 2020 sebesar 7 persen dari target 20 persen, capaian tahun 2021 sebesar 86,58 dari target 24 persen.
- h. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor  
Capaian persentase realisasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor diperoleh dari jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikali 100 persen. Capaian tahun 2017 sebesar 0 persen dari target 1,50 persen, capaian tahun 2018 sebesar 0

persen dari target 1,70 persen, capaian tahun 2019 sebesar 0,76 persen dari target 1,90 persen, capaian tahun 2020 sebesar 0,76 persen dari target 2,10 persen dan capaian tahun 2021 sebesar 1,13 persen dari target 2,50 persen. Penanganan daerah rawan longsor baru bisa terealisasi mulai tahun 2019 dengan capaian sebesar 0,76 persen dan terus meningkat sampai tahun 2021 sebesar 1,13 persen.

i. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017-2021 namun masih berada di bawah target yang ditetapkan. Target tahun 2017 seluas 5469.6 Ha (47,11 persen) dan realisasi 3265.01 Ha (28,12 persen), target tahun 2018 seluas 6069.6 Ha (52,27 persen) dan realisasi 3265.01 Ha (28,12 persen), target tahun 2019 seluas 6469.6 Ha (55,72 persen) dan realisasi 3265.01 Ha (28,12 persen), target tahun 2020 seluas 6869.6 Ha (59,16 persen) dan realisasi 4081,27 Ha (35,15 persen) dan target tahun 2021 seluas 7269.6 Ha (62,61 persen) dan realisasi 4897,52 Ha (42,18 persen). Peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik disebabkan selain pendanaan APBD Kabupaten juga karena adanya dukungan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi khususnya Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa.

j. Rasio Jaringan Irigasi

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Barito Selatan dalam kondisi baik sepanjang tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar 0,001, tahun 2018 sebesar 0,001, tahun 2019 sebesar 0,34, tahun 2020 sebesar 0,35, tahun 2021 sebesar 0,40. Peningkatan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat melalui APBN terhadap ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan cetak sawah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat.

k. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Sistem penyediaan air minum yang dikembangkan di Kabupaten Barito Selatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum

dalam menunjang kegiatan rumah tangga, komersial, sosial, pemerintahan dan lainnya. Rencana sistem pengembangan penyediaan air minum di Kabupaten Barito Selatan harus memperhatikan lokasi sumber mata air yang ada, sistem jaringan pipa PDAM yang telah melayani masyarakat, jumlah penduduk yang bersangkutan, dan keadaan topografi Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya di wilayah perdesaan juga dikembangkan SPAM Berbasis Masyarakat (SPAM BM) yang dikelola oleh KPSPAM. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Barito Selatan terbagi menjadi dua, meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

Capaian persentase penduduk berakses air minum dalam rentang waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi capaian. Capaian tahun 2017 sebesar 55,71 persen dari target 55,5 persen, capaian tahun 2018 sebesar 40,35 persen dari target 55,5 persen, capaian tahun 2019 sebesar 23,32 persen dari target 61,05 persen, capaian tahun 2020 sebesar 23,96 persen dari target 67,16 persen dan capaian tahun 2021 sebesar 50,35 persen dari target 73,87 persen. Sedangkan target akses air minum layak yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 adalah sebesar 80,04 persen. Belum optimalnya capaian, salah satunya disebabkan Perusahaan PDAM yang seharusnya bisa mandiri dalam penanganan dan peningkatan kapasitas PDAM, masih bertumpu pada bantuan APBD Kabupaten, APBN dan DAK dalam rangka pembangunan dan peningkatan sarana prasarana PDAM, seperti jaringan pipa distribusi, instalasi pengolahan air serta Sambungan Rumah. Disamping itu sarana prasarana PAMSIMAS yang sudah terbangun di perdesaan tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan masyarakat karena masih sebatas kran umum dan memerlukan pengelolaan yang baik, biaya operasional dan pemasangan sambungan rumah. Sejak tahun 2021 melalui dana DAK dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP) pemerintah pusat membantu desa PAMSIMAS yang sarana prasarananya dalam kategori berfungsi sebagian untuk dioptimalisasi.

1. Rasio Areal Kawasan Kumuh

Penetapan areal kawasan kumuh di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 294 Tahun 2014 yang berlokasi di Kelurahan Buntok Kota (Jalan Karau dan sekitarnya, Jalan Niaga dan sekitarnya, Jalan Veteran dan Pembangunan dan sekitarnya), Kelurahan Hilir Sper (Jalan Jelapat/Kawasan Kamper dan sekitarnya), Kelurahan Jelapat (Jalan Jelapat/Kawasan Jelapat dan sekitarnya). Selanjutnya pada Tahun 2021 areal kawasan kumuh di Kabupaten Barito Selatan direvisi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2021, yaitu meliputi Kawasan Kumuh Pahlawan Bawah, Kawasan Kumuh Veteran, Kawasan Kumuh Kamper, Kawasan Kumuh Jelapat, Kawasan Kumuh Bangkuang dan Kawasan Kumuh Rantau Kujang.

Persentase capaian penanganan areal Kawasan kumuh tahun 2017-2019 tidak terjadi penurunan yaitu masih sebesar 4 persen areal kumuh dan pada tahun 2020 menurun menjadi 0 persen.

m. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB diperoleh dari luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah ber HPL/HGB. Total luas lahan ber HPL/HGB adalah 16.500 Ha. Rasio capaian tahun 2017 sebesar 0,12 (1.991,55 Ha) dari target 0,96 (15.913 Ha), capaian tahun 2018 sebesar 0,12 (1.991,55 Ha) dari target 0,96 (15.913 Ha), capaian tahun 2019 sebesar 0,13 (2.100,45 Ha) dari target 0,97 (16.000 Ha), capaian tahun 2020 sebesar 0,20 (3.379,20 Ha) dari target 0,97 (16.000 Ha), capaian tahun 2021 sebesar 0,25 (4.176,15 Ha) dari target 1,00 (16.500 Ha).

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2021, persentase rumah layak huni kurang lebih sebesar 86%. Rehabilitasi Rumah berdasarkan program kegiatan SKPD yaitu program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Peningkatan Kualitas Swakelola dengan sumber dana dari APBD dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari TA. 2016 sd 2020 sebanyak 96 unit.

Rehabilitasi Rumah berdasarkan program kegiatan SKPD yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sumber dana APBN dilaksanakan Oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah dimana Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi pendamping pelaksana kegiatan tersebut dari TA. 2016 sd 2021 sebanyak 1.850 Unit dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sumber dana Wold Bank dari tahun 2018 sd 2019 sebanyak 299 Unit.

Seluruhnya merupakan upaya pencapaian target RPJMD terhadap kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Barito Selatan dimana berdasarkan data dari Tim Nasional Penanganan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2016 masih terdapat 7005 Rumah Tidak Layak Huni dari 33.367 unit rumah yang ada di kabupaten Barito Selatan.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih
- b. Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan
- c. Tempat Pemakaman Umum belum terkelola dengan baik
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan belum terkelola dengan baik.
- e. Masih tingginya angka backlog
- f. Belum optimalnya pelayanan jaringan air bersih/minum permukiman
- g. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman
- h. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

- i. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan – kegiatan yang ada di Bidang Perumahan.
  - j. Belum selesainya Penyusunan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
  - k. Belum selesainya Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
  - l. Belum diriviewnya dokumen RP2KPKP dan RP3KP
  - m. Belum adanya masterplan penataan bantaran/ sempadan sungai
5. Pertanahan

Indikator kinerja berupa persentase ketersediaan lahan yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, selama periode tahun 2017 sampai dengan 2022, dengan kondisi akhir periode Renstra tahun 2017-2022, diharapkan penyertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mencapai target sebesar 100%. Target capaian Renstra Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang mengacu pada target sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 sebesar 80,75% dengan realisasi capaian kinerja tahun 2017-2022 adalah sebesar 0,82%, dengan jumlah persil yang telah disertifikat sebanyak 298 persil tanah aset Pemerintah Daerah.

Rencana sertifikasi Tanah di tahun 2022 adalah sebanyak 92 Persil, sementara sampai dengan Maret 2022 telah dilakukan pengukuran sebanyak 46 persil. Kegiatan tersebut masih belum dapat dilaporkan ke dalam capaian kinerja karena masih dalam proses.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pertanahan antara lain:

- a. Banyak bidang tanah non-produktif dengan pemilik tidak berada di tempat, banyak pula bidang tanah yang tidak jelas kepemilikannya
- b. Masih banyak ditemui tumpang tindih surat kepemilikan
- c. Banyaknya lokasi tanah yang berada di wilayah kawasan hutan sehingga sulit untuk dilakukan pembuatan kepemilikan sertifikat tanah

- d. Kurang sinkronnya peta RTRWK perda no 4 tahun 2014 dengan fungsi dan pemanfaatan lahan yang berkembang di masyarakat saat ini
  - e. Kurangnya fasilitas pendukung dan SDM yang berkompeten menangani masalah pertanahan
6. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat  
Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat antara lain:
7. Sosial  
Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban KDRT, karang taruna, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pembinaan.  
Capaian kinerjanya dilihat dari Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari tahun 2017 tercapai hanya 75%, 2018 hanya tercapai 80% sedangkan tahun 2019,2020,2021 tercapai 100%.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Capaian kinerja tahun 2021 urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dilihat dari indikator Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) capaian kinerja 65%, Persentase LSM Aktif 45%, Persentase LPM berprestasi 65%, Persentasi PKK Aktif 80%, Persentase Posyandu Aktif 30%, Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 80% dan Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 80%.
9. Tenaga Kerja  
Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja antara lain:
- a. Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun di Kabupaten Barito Selatan jumlahnya cenderung mengalami fluktuatif mulai dari tahun 2017 ada 5 kasus kemudian di tahun 2018 menurun

menjadi 6 kasus, ditahun 2019 menurun lagi menjadi 2 kasus, pada tahun 2020 naik menjadi 4 kasus dan pada tahun 2021 meningkat drastis menjadi 11 kasus yang mana semua sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun yang mana semua kasusnya terselesaikan.

- b. Jumlah besaran kasus yang diselsesaikan dengan perjanjian (PB) di Kabupaten Barito Selatan cenderung mengalami fluktuatif mulai dari tahun 2017 sebanyak 3 kasus yang telah terelesaikan, ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6 kasus sedangkan ditahun 2019 tidak ada kasus, ditahun 2020 meningkat menjadi 4 kasus, di tahun 2021 besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) 5 kasus.
- c. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan pemerintahan daerah hanya ada ditahun 2017 sedangkan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tidak ada kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap kebijakan pemerintahan.
- d. Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 30 orang, ditahun 2018 tenaga kerja yang mendapat pelatihan sebanyak 30 orang ditahun 2019 menurun menjadi 20 orang dan tahun 2020 dan tahun 2021 menurun menjadi 15 orang disebabkan anggaran yang terbatas dan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 adanya pandemi covid 19.

#### 10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah terus mengalami peningkatan terakhir tahun 2021 dari 3.474 PNS yang ada di pemerintah Daerah Kab Barsel 52,56% adalah perempuan , Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD periode 2019-2024 sebanyak 10 orang perempuan atau 40%, Partisipasi perempuan di lembaga swasta 86%, Rasio KDRT mengalami penurunan dari target 0,25 menjadi 0,20, Partisipasi angkatan kerja perempuan dari 40,50% menjadi 36% artinya mengalami penurunan, Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan

oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum untuk tahun 2021 sudah tertangani 100%.

Persentase partisipasi Rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,17 dari target 2,11, Ratio Akseptor KB sebesar 74% dari target 84%, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun sebesar 75% dari target 88%, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 1,83 dari target 2,17, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 16,18 dari target 13,00, Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 10,86 dari target 22%, Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 75,27 dari target 88,30%, Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB, sebesar 84,6% dari target 90,50%, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB sebesar 82,9 dari target 83,40%, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan, Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri, dan Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Rendahnya partisipasi kader koordinator KB untuk mensosialisasikan program KB kepada masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana. Data tahun 2021 menunjukkan persentase Pasangan Usia Subur dalam penggunaan peralatan pengendalian kelahiran (implant dan suntikan) sebesar 75%.
- c. Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan program KB.
- d. Masih banyak usia remaja di yang belum mendapatkan pendidikan dan penyuluhan serta fasilitasi dalam program dan kegiatan Keluarga Berencana yang ditinjau dari cakupan PIK remaja dikarenakan minimnya anggaran.

## 11. Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pangan Pertanian, Perikanan dan Kelautan antara lain:

- a. Rendahnya produktivitas tanaman pangan;
- b. Diversifikasi yang belum berjalan secara progresif sehingga tekanan kebutuhan terhadap beras sebagai bahan pangan utama semakin besar;
- c. Alih fungsi lahan pangan ke non pangan yang belum terkendali dengan baik terutama pada lahan sawah;
- d. Sistem agribisnis dan jiwa kewirausahaan petani yang belum berjalan baik;
- e. Keseimbangan ekosistem yang terganggu, sehingga sering terjadi serangan hama/penyakit;
- f. Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian dan perikanan masih kurang dan relatif terbatas;
- g. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia pelaku utama untuk menghasilkan produk yang berdaya saing;
- h. Terbatasnya sarana pendukung di sekitar kawasan sentra perikanan;
- i. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayan teknis maupun non teknis;
- j. Kurang optimalnya upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan sebagai akibat dari rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya pelaksanaan operasional pengawasan aparat pemerintah.

## 12. Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), akibat Penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran dari usaha/dan atau kegiatan masyarakat, dimana belum terkelolanya limbah domestik dari pemukiman

- b. Penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
- c. Penurunan tutupan hutan, dimana tingginya tingkat erosi, akibat meningkatnya lahan terbuka.
- d. Belum Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terbitnya PP 22 Tahun 2021 adanya kewajiban penyusunan RPPMA, RPPMU dan RPPMAL dan diintegrasikan dalam RPPLH yang terkendala minimnya anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
- e. Data untuk penyusunan penyusunan RPPMA, RPPMU masih minim
- f. Tidak adanya anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen perencanaan lingkungan Hidup
- g. Peningkatan Sampah dan Limbah B3 yang diakibatkan oleh Pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan peningkatan volume sampah, mengakibatkan adanya sampah yang belum terangkut ke TPA, dimana kurangnya sarana dan tenaga kebersihan yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA
- h. Rendahnya kesadaran masyarakat melakukan 3R, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dengan 3R
- i. Masih kurangnya jumlah BANK Sampah di Kab. Barito Selatan, dan kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya BANK Sampah dan tidak tersedianya dana untuk pembangunan BANK Sampah baru
- j. Tidak tersedianya sarana pemusnahan limbah B3 di Kabupaten Barito Selatan, dimana tingginya biaya pemusnahan limbah B3 karena harus dikirim kedaerah lain untuk pemusnahan.
- k. Rendahnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan/izin Lingkungan, dan kurangnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan/izin Lingkungan.

### 13. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan dilihat dari indikator Rasio Penduduk ber- KTP per Satuan Penduduk capaian kinerja 99,98% dari target 100% , Rasio bayi berakte capaian kinerja 95,38% dari target 88,50%, Rasio pasangan berakte nikah capaian kinerja 80,06% dari target 45%, Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi data tersedia, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan mulai tahun 2011, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) capaian kinerja 99,98% dari target 100% dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran capaian kinerja 95,03% dari target 93%. Dilihat dari capaian kinerja administrasi kependudukan yang berkaitan rasio pasangan berakte nikah yang capaian hanya 80,06% hal ini dikarena pasangan yang nikah tidak diakui oleh Negara. Agar supaya diakui oleh Negara pasangan harus nikah ulang melalui sidang isbat perkawinan baik melalui KUA maupun pencatatan sipil. Hal itu memerlukan anggaran untuk melaksanakannya.

### 14. Perhubungan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain:

- a. Masalah transportasi terutama yang berkaitan dengan lalu lintas disetiap kota di Indonesia memang sering menjadi hal yang sering dihadapi, baik oleh para pengguna jalan maupun pemerintahan kota yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Masalah transportasi sekarang ini disebabkan karena sarana dan prasarana transportasi yang tersedia tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat akan transportasi. Rasio Jumlah arus penumpang angkutan umum pada Tahun 2017 sebesar 27,420 orang tahun 2019 sebesar 39,504 orang pada tahun 2019 sebesar 18,304 pada tahun 2020 sebesar 13,100 orang dan pada tahun 2021 sebesar 16,586 orang. Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seluruh negara di dunia mengalami

kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakan arus penumpang angkutan umum, dan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan pada skala tertentu.

- b. Realisasi rasio ijin trayek Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan sepanjang tahun 2017-2021, pada tahun 2017 sebesar 1.325 Orang, tahun 2018 sebesar 1.235 Orang, tahun 2019 sebesar 1.120 Orang, tahun 2020 sebesar 310 Orang dan tahun 2021 sebesar 25 orang. Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakan rasio ijin trayek, dan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan pada skala tertentu.
- c. Jumlah uji kir angkutan umum pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari 255 unit meningkat sebesar 281 unit, pada tahun 2019 tidak ada uji kir angkutan umum dikarenakan alat uji tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pengujian, pada tahun 2020 sebesar 220 unit dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 690 unit.
- d. Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Barito Selatan sepanjang tahun 2017 – 2021 adalah 0 % dikarenakan tidak tersedia anggaran dari APBD Kabupaten Barito Selatan pemasangan rambu dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi dan Pusat dan berada di ruas jalan Nasional dan jalan Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- e. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2017 sebesar 0,058 tahun 2018 sebesar 0,053, tahun 2019 sebesar 0,049, pada tahun 2020 sebesar 0,052 dan tahun 2021 sebesar 0,05 rendahnya rasio tersebut dipengaruhi

dengan adanya Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 538 tahun 2013 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten Barito Selatan.

- f. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di daerah kota Buntok pada tahun 2017 sebanyak 15,840, tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 21,820, pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 10,774 dan pada tahun 2021 sebanyak 10,931. Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan pada skala tertentu.

#### 15. Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Tahun 2021 belum bisa melaksanakan urusan Pemerintahan Statistik Sektoral termasuk persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon karena keterbatasan anggaran, baru akhir Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dapat menyiapkan aplikasi statistik dan baru Tahun 2022 mulai dioperasikan. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun 2019 sebesar 48,7%.
- b. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 sebesar 7,80 % dan pada tahun 2021 sebesar 8,70 %.

#### 16. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- c. Masih kurangnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Koperasi dan UKM;
- d. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- e. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi dan UKM;
- f. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UKM;
- g. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- h. Kurangnya inovasi produk ;
- i. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UKM;
- j. Kesadaran SDM Koperasi dan UKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah;
- k. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah dari Koperasi dan UKM;
- l. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- m. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UKM dalam tertib hukum dan tertib niaga;
- n. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi dampak globalisasi.

#### 17. Penanaman Modal

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal antara lain:

- a. Sarana / fasilitas yang menunjang pelayanan perizinan masih kurang memadai, diantaranya : jaringan internet kurang

maksimal, tidak tersedianya ruang konsultasi, dan belum tersedianya fasilitas untuk disabilitas;

- b. Masih kurangnya koordinasi dari instansi-instansi teknis dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- c. Belum tersedianya MPP ( Mall Pelayanan Publik );
- d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) handal merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis memadai yang bisa didapatkan dari adanya pelatihan;
- e. Masih kurangnya jumlah tenaga PNS/ASN;
- f. Kesulitan dalam koordinasi untuk kegiatan pengawasan dengan dinas teknis;
- g. Masih terbatasnya upaya pengembangan peningkatan investasi mengingat sangat minimnya dana yang diberikan untuk promosi investasi daerah.

#### 18. Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan antara lain:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia/Aparatur yang masih minim;
- b. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengembangan kepariwisataan;
- c. Belum maksimalnya pengembangan potensi wisata dan terbatasnya SDM Kepariwisata;
- d. Belum maksimalnya promosi pariwisata;
- e. Masih kurang pendanaan terkait pemeliharaan Stadion Batuah, Stadion Sanggu, Stadion Danau Sadar dan GOR Manunggal;
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana Olahraga yang ada di sekolah untuk kegiatan pembinaan anak usia dini;
- g. Belum terlaksananya pembinaan olahraga prestasi sebagai upaya penjaringan atlit usia dini secara sistematis dan berkelanjutan;
- h. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan olahraga tradisional;
- i. Pembinaan atlit-atlit berbakat yang masih sangat kurang terkoordinir dengan baik;

- j. Ekspose dan promosi potensi budaya dan obyek wisata yang dimiliki yang hingga kini masih terkendala teknis;
- k. Pengelolaan, Pemeliharaan, Penataan dan Identifikasi Benda-Benda Museum masih kurang.

#### 19. Perpustakaan dan Kearsipan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:

- a. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2017 berjumlah 6.820 hal tidak mencapai target yang di tentukan yaitu 18.012, tetapi pada tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami kenaikan menjadi 7.801 atau sebanyak 981 orang. Pada tahun 2019 mengalami penurunan pengujung perpustakaan menjadi 5.500, tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebanyak 7.818 atau setara dengan 2.318 orang dan penurunan ditahun berikutnya 2021 sebanyak 2.495 atau 5.323 orang.
- b. Pada tahun 2017 Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 32.767 telah mencapai target yang ditentukan dari 22.568 buku, pada tahun berikutnya mengalami penurunan jumlah buku menjadi 31.412 atau sebanyak 1.355 buku, hal ini sama pada tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 33.718 atau setara dengan 2.306 koleksi judul buku.
- c. Rasio perpustakaan persatuan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 0,56% hal ini telah menecapai target yang ditentukan, tahun 2018 – 2019 sebanyak 0,59%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 0,03% atau menjadi 0,62% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun berikutnya 2021 sebanyak 0,65%.
- d. Tahun 2017 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun sebanyak 568,33 telah mencapai target yang ditentukan sebanyak 397,08 jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 650,08 atau 81,75 orang kemudin mengalami penurunan di tahun 2019 458,33 dan mengalami kenaikan

- kembali di tahun 2020 sebanyak 651,50 atau setara dengan 193,17 orang. Pada tahun 2021 terjadi penurunan secara signifikan menjadi 207,92 atau sebanyak 443,58 orang.
- e. Pada tahun 2017 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah telah sesuai target yang ditentukan 28.757, sebaliknya terjadi penurunan pada tahun berikutnya 2018-2020 sebanyak 28.080 dan kembali mengalami penurunan terendah sebanyak 16.860 judul buku pada perpustakaan daerah Kabupaten Barito Selatan.
  - f. Tahun 2017 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat sebanyak 8 orang hal ini telah mencapai target yang di tentukan kemudian mengalami penambahan jumlah pada tahun 2018-2021 dengan total sebanyak 16 orang.

## 20. Perdagangan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- c. Masih kurangnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Perdagangan;
- d. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- e. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengelolaan Bidang Perdagangan;
- f. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;
- g. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
- h. Belum adanya Dana terkait Data yang khusus menginformasikan secara luas Ketersediaan Bahan Pokok dari Perdagangan ;

- i. Masih rendahnya SDM Perdagangan dalam tertib hukum dan tertib niaga.

## 21. Perindustrian

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain:

- a. Pembinaan pengusaha/perajin IKM masih belum maksimal dan belum menyentuh secara keseluruhan ke jenis/cabang industri binaan karena terbatasnya dana yang tersedia dan SDM pada bidang IKM yang masih kurang/terbatas;
- b. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- d. Masih kurangnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM IKM;
- e. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- f. Bantuan usaha ekonomi produktif dari dana perbantuan (APBN) berupa mesin peralatan pengolah rotan yang masih belum dapat dimanfaatkan oleh pengusaha/perajin secara optimal dikarenakan kesulitan modal biaya operasional seperti bahan baku (rotan batangan) dan biaya operator mesin peralatan.

## 22. Perencanaan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Perencanaan antara lain:

Indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD merupakan suatu komitmen daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui program kerja PD. Capaian penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tidak sesuai dengan harapan, perubahan program sering terjadi, hal ini menunjukkan tidak konsistennya penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, tidak konsistennya penjabaran tersebut adalah karena sebagian besar perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan tidak berpedoman pada Renstra sehingga program yang dilaksanakan cenderung berubah-ubah yang mengakibatkan keberhasilan atau

capaian suatu program tidak dapat diukur selama periode RPJMD. Faktor lain yang mempengaruhi tidak konsistennya jumlah program RPJMD dengan Program RKPD adalah perubahan regulasi dari Permendagri No.13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmendagri 050-050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 23. Keuangan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Keuangan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
- b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah atau masih dibawah 90% ditengah situasi menyebarkan wabah Pandemi Covid-19;
- c. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- d. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
- e. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;
- f. Belum Maksimalnya Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menyebabkan rendahnya Rasio Pendapatan daerah terhadap APBD ditengah situasi menyebarkan wabah Pandemi Covid-19;
- g. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya integrasi e-planning dan e-budgeting;

- h. Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik;
- i. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
- j. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
- k. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- l. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
- m. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih terbatas.

#### 24. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Kepegawaian antara lain:

- a. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tujuan dari pendidikan dan pelatihan kepada ASN untuk mewujudkan kualitas SDM aparatur yang Kompeten dan Profesional. Di Kabupaten Barito Selatan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah 3 bulan, ditahun 2017 Kpegawaian tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan dikarenakan anggaran tidak tersedia dan ditahun 2020 karena adanya pademi covid-19.
- b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami penurunan mulai tahun 2017 sebesar 88% dan turun ditahun 2018 sebesar 64% naik lagi ditahun 2019 sebesar 82% kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya pademi covid-19.
- c. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural jumlah pertahunnya tidak terlalu signifikan.

- d. Jumlah Jabatan Pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan tidak terlalu signifikan dari tahun ketahun mulai dari tahun 2017 sebanyak 27 orang kemudian ditahun 2018 sebanyak 27 orang dan terakhir ditahun 2021 ada sebanyak 28 orang.
- e. Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah cenderung mengalami kenaikan dari tahun ketahun mulai tahun 2017 sebanyak 126 orang dan ditahun 2021 sebanyak 139 orang.
- f. Jumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintahan mengalami penurunan yang mana tahun 2017 ada sebanyak 2207 orang, pada tahun 2018 menurun menjadi 2194 orang, kemudian ditahun 2019 turun 2193 orang, ditahun 2020 menurun menjadi 1940 orang dan ditahun 2021 menjadi 1915 orang.

## 25. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Penelitian dan pengembangan adalah kurang optimalnya implementasi dalam mewujudkan pengembangan litbang dan inovasi daerah.

## 26. Pengawasan

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan Pengawasan antara lain:

- a. Jumlah Tindak lanjut temuan cenderung fluktuatif mulai tahun 2017 sebanyak 74,25%, Tahun 2018 sebanyak 72,96% ditahun 2019 sebanyak 72,01% ditahun 2020 sebanyak 71,62% dan ditahun 2021 sebanyak 76,62% dikarenakan banyaknya temuan yang tidak ditindak lanjuti.
- b. Persentase pelanggaran pegawai mengalami jumlah fluktuatif dari tahun ke tahun mulai tahun 2017 sebanyak 15%, Tahun 2018 sebanyak 20% ditahun 2019 sebanyak 10% ditahun 2020 sebanyak 25% dan ditahun 2021 sebanyak 5%.
- c. Jumlah temuan BPK cenderung menurun dari tahun 2017 dari sebanyak 23 temuan, ditahun 2018 sebanyak 20 temuan dan tahun 2017 sebanyak 17 temuan, ditahun 2020 sebanyak 12 temuan dan ditahun 2021 sebanyak 9 temuan.

## **2.9 Dukungan Untuk Ibukota Negara (IKN) Baru**

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sudah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) dengan nama Nusantara bisa dilaksanakan.

Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung sampai 2045. Mengacu buku saku pemindahan IKN, tahapan pembangunan ibu kota baru dilakukan pada 2020-2024, yakni membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan di area utama IKN. Kemudian pemindahan ASN/PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air hingga energi untuk 500 ribu penduduk di tahap awal.

### **2.9.1. Food Estate**

Salah satu program utama Pemerintah Pusat yang merupakan program strategis pembangunan pertanian nasional dan dukungan untuk IKN adalah Program Food Estate yang berada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Program tersebut bertujuan untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan Food and Agriculture Organization (FAO). Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Program Food Estate dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan dalam negeri yang juga dilandasi upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi yang fokus kepada masyarakat sebagai bagian penanganan pandemi covid-19.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensukseskan program ini sangat besar, tetapi tidak mengurangi komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap ekosistem gambut di Kalimantan Tengah sebagaimana telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang disusul dengan penetapan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/684/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 s/d 2050.

Rencana kegiatan food estate di lokasi eks-PLG merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua mengingat kegagalan dimasa lalu, sehingga diperlukan integritas dan komitmen dalam pelaksanaannya. Peran masyarakat baik yang terdampak langsung, tokoh adat, serta pemerhati lingkungan yang ada di Prov. Kalteng sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan saran/masukan/pendapat/ tanggapan serta informasi terhadap gambaran permasalahan di lapangan baik ekonomi maupun lingkungan terkait rencana food estate, sehingga nantinya dapat diambil keputusan guna merumuskan suatu kebijakan yang tepat dan konkret karena berlandaskan dengan fakta dan objektivitas (Evidence Based) dengan semangat pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau pada khususnya dan Prov. Kalteng pada umumnya untuk Kalteng Makin Berkah.

Terkait hal tersebut, walaupun Kabupaten Barito Selatan tidak termasuk dalam area Program Food Estate namun Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kab. Barito Selatan siap mendukung program tersebut. Hal ini telah dilakukan pengecekan rencana lokasi pengembangan food estate di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas sesuai intruksi Bupati Barsel serta menindaklanjuti surat Sekda Kalteng tertanggal 18 Mei 2021 terkait tindak lanjut pengembangan food estate berbasis korporasi petani.

Berdasarkan hasil pengecekan dilapangan, masih tersedia lahan seluas 50 hektar yang berada di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas. Luas lahan 50 hektar ini, akan ditanam padi, jagung dan tanaman hortikultura serta dibuat kolam serta juga akan dikembangkan peternakan ayam petelur sebanyak 1.500 ekor yang akan diusulkan ke Kementerian Pertanian RI.

Lokasi ini nantinya dapat menjadi tempat pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani yang paling layak dari aspek teknis, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang disesuaikan dengan potensi.

Diharapkan lokasi tersebut dapat menjadi percontohan bagi petani lainnya untuk mengembangkan agribisnis dan lokasi tersebut dapat di jadikan tempat agrowisata.

Diharapkan kedepannya (jangka panjang) kita siap sebagai daerah pendukung program food estate bahkan terlibat langsung didalamnya dengan potensi lahan dan sumber daya yang ada. Yang juga pada saatnya nanti kita bisa mengembangkan wilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi seperti infrastruktur jalan dan jembatan guna terbukanya akses jalan yang dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi hasil pertanian dan lainnya.

## **2.10 Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024**

Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyepakati tanggal Pilkada Serentak pada Tanggal 27 November 2024. Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Barito Selatan pada 2024 membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itulah perlu ada dana cadangan atau dana yang disisihkan dari setiap satu tahun anggaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan rencananya akan menyediakan Dana cadangan sejumlah Rp30.000.000.000,00 yang akan dibagi ke dalam dua tahun anggaran, Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.000.000.000,00.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini kemudian di pertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;

- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasi program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

### **3.1. Kinerja Masa Lalu**

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1

**Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)
2017	49.297.479.852,95	931.583.634.313,36	5,29
2018	81.427.860.612,76	993.055.937.843,65	8,20
2019	77.337.581.831,24	1.006.510.308.469,03	7,68
2020	59.790.417.171,83	987.379.417.289,87	6,06
2021	n/a	n/a	n/a
<b>Rata-rata</b>			6,81

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Barito Selatan masih sangat kecil yaitu rata-rata 6,81 persen dalam lima tahun terakhir. Dengan keadaan seperti itu maka menjadi dorongan bagi pemerintahan Kabupaten Barito Selatan untuk dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, APBD Kabupaten Barito Selatan mengalami perkembangan yang stabil. Meskipun demikian, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Barito Selatan yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.  
 Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD  
 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (Rupiah)

(dalam juta rupiah)

URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pendapatan	931.583	911.628	902.605	987.379	n/a	2,09
Belanja	912.645	990.032	1.074.383	962.825	n/a	2,11
Surplus (Defisit)	18.937	3.023	(67.873)	24.553	n/a	(854,97)
Penerimaan Pembiayaan	84.959	100.910	136.707	98.536	n/a	8,78
Pengeluaran Pembiayaan	5.578	8.078	15.198	32.902	n/a	83,15
Pembiayaan Netto	79.381	92.856	121.508	66.634	n/a	0,89
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	97.910	95.597	53.635	85.141	n/a	4,16

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2022. Diolah

**Tabel 3. 3**  
**Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021**

NO	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>995.276.336.006,03</b>	<b>931.583.634.313,36</b>	<b>996.697.830.595,81</b>	<b>993.055.937.843,65</b>	<b>1.037.998.733.499,92</b>	<b>1.006.510.308.469,03</b>	<b>994.205.031.164,97</b>	<b>987.379.417.289,87</b>	n/a	n/a
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>80.928.967.348,19</b>	<b>49.297.479.852,95</b>	<b>72.421.660.169,97</b>	<b>81.427.860.612,76</b>	<b>100.859.710.040,00</b>	<b>77.337.581.831,24</b>	<b>87.062.560.060,00</b>	<b>56.790.417.171,83</b>	n/a	n/a
4.1.01	Pajak Daerah	14.766.071.256,00	7.115.682.253,31	14.543.536.236,00	11.130.151.141,05	23.445.996.280,00	18.796.170.247,17	20.877.500.000,00	12.967.330.285,54	n/a	n/a
4.1.02	Retribusi Daerah	6.017.249.202,00	4.577.253.746,00	4.696.776.152,00	4.914.887.719,00	5.187.393.774,00	3.990.320.846,00	3.709.345.805,00	3.455.933.184,80	n/a	n/a
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.091.751.296,00	7.091.751.296,00	7.091.751.296,00	8.925.715.960,00	8.957.726.131,00	8.285.479.957,00	9.383.573.104,00	8.531.879.158,00	n/a	n/a
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.053.895.594,19	30.512.792.557,64	46.089.596.485,97	56.457.105.792,71	63.268.593.855,00	46.265.610.781,07	53.092.141.151,00	31.835.274.543,49	n/a	n/a
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>912.108.938.240,84</b>	<b>862.618.701.368,49</b>	<b>902.451.940.008,84</b>	<b>911.628.077.230,89</b>	<b>911.477.593.042,92</b>	<b>902.605.223.637,79</b>	<b>874.648.764.157,77</b>	<b>903.135.067.712,04</b>	n/a	n/a
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	807.717.502.232,00	769.484.748.243,00	796.899.436.000,00	810.947.108.709,00	794.879.234.000,00	791.125.694.326,00	705.631.318.000,00	734.170.496.133,00	n/a	n/a
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	35.088.585.008,84	30.459.434.321,89	34.018.099.042,92	29.486.049.311,79	29.935.927.157,77	30.248.150.579,04	n/a	n/a
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	70.463.919.000,00	70.221.534.200,00	82.580.260.000,00	81.993.480.000,00	139.081.519.000,00	138.716.421.000,00	n/a	n/a
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.238.430.417,00</b>	<b>19.667.453.091,92</b>	<b>21.824.230.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.661.430.417,00</b>	<b>26.567.503.000,00</b>	<b>32.493.706.947,20</b>	<b>27.453.932.406,00</b>	n/a	n/a
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	17.986.797.497,92	20.085.800.000,00	0,00	23.923.000.000,00	26.567.503.000,00	28.497.023.000,00	21.398.345.000,00	n/a	n/a
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.738.430.417,00	1.680.655.594,00	1.738.430.417,00	0,00	1.738.430.417,00	0,00	3.996.683.947,20	6.055.587.406,00	n/a	n/a
5	<b>BELANJA</b>	<b>916.680.252.548,27</b>	<b>912.645.780.811,38</b>	<b>956.441.918.314,60</b>	<b>990.032.213.115,75</b>	<b>1.004.900.602.586,39</b>	<b>1.074.383.498.021,26</b>	<b>911.920.303.360,89</b>	<b>962.825.619.233,29</b>	n/a	n/a
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>772.038.256.603,27</b>	<b>645.015.128.952,38</b>	<b>718.307.202.824,60</b>	<b>650.913.843.466,75</b>	<b>772.943.371.124,44</b>	<b>700.279.624.110,72</b>	<b>686.559.464.636,89</b>	<b>601.695.604.299,29</b>	n/a	n/a
5.1.01	Belanja Pegawai	446.333.861.442,45	343.603.258.753,68	495.572.910.135,90	398.623.809.450,25	436.792.918.504,78	387.069.282.503,00	426.882.025.902,71	369.217.835.363,00	n/a	n/a
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.665.895.160,82	266.546.490.596,70	205.866.478.688,70	238.643.628.784,50	306.065.034.046,05	289.175.581.872,72	232.995.124.023,00	210.946.701.185,29	n/a	n/a
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	12.421.232,00	3.663.753.573,61	171.351.667,00	1.247.640.986,18	637.627.057,00	n/a	n/a
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	n/a	n/a
5.1.05	Belanja Hibah	29.978.500.000,00	26.505.257.244,00	13.367.814.000,00	11.148.984.000,00	23.921.665.000,00	21.879.885.750,00	19.080.000.000,00	14.569.327.885,00	n/a	n/a
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.060.000.000,00	7.360.122.358,00	3.500.000.000,00	2.485.000.000,00	2.500.000.000,00	1.983.522.318,00	5.069.673.725,00	5.039.112.809,00	n/a	n/a



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>143.641.995.945,00</b>	<b>133.616.784.497,00</b>	<b>237.134.715.490,00</b>	<b>204.359.109.701,00</b>	<b>230.957.231.461,95</b>	<b>225.100.815.134,54</b>	<b>211.808.862.663,00</b>	<b>203.300.687.244,00</b>	n/a	n/a
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.371.000.000,00	1.369.889.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	n/a
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.546.795.800,00	16.656.590.960,00	45.770.571.490,00	44.343.985.464,00	26.789.861.555,00	23.077.094.354,50	29.715.306.651,00	22.996.163.757,00	n/a	n/a
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.315.705.006,00	14.739.687.758,00	32.208.911.600,00	28.486.610.749,00	27.937.424.106,95	26.820.396.118,00	26.628.885.384,00	25.497.550.280,00	n/a	n/a
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.448.974.300,00	86.941.297.571,00	155.936.823.000,00	127.614.903.655,00	175.820.822.000,00	174.917.182.300,04	153.550.768.628,00	152.898.083.416,00	n/a	n/a
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.616.020.839,00	13.573.854.000,00	3.094.409.400,00	3.795.414.583,00	294.123.800,00	282.369.442,00	1.689.000.000,00	1.684.025.791,00	n/a	n/a
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>264.905.250,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>91.200.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551.976.061,00</b>	<b>12.417.267.490,00</b>	n/a	n/a
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	264.905.250,00	1.000.000.000,00	91.200.000,00	1.000.000.000,00	0,00	13.551.976.061,00	12.417.267.490,00	n/a	n/a
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>136.845.326.690,62</b>	<b>133.748.962.112,00</b>	<b>136.717.490.238,80</b>	<b>134.668.059.948,00</b>	<b>152.648.949.405,40</b>	<b>149.003.058.776,00</b>	<b>147.913.670.580,50</b>	<b>145.412.060.200,00</b>	n/a	n/a
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.092.918.225,80	529.246.100,00	2.042.972.538,80	1.232.357.900,00	2.863.339.005,40	1.240.952.900,00	2.458.684.580,50	1.080.318.300,00	n/a	n/a
5.1.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.752.408.464,82	133.219.716.012,00	134.674.517.700,00	133.435.702.048,00	149.785.610.400,00	147.762.105.876,00	145.454.986.000,00	144.331.741.900,00	n/a	n/a
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>79.410.100.274,37</b>	<b>79.381.521.990,80</b>	<b>57.700.584.022,99</b>	<b>92.832.522.207,78</b>	<b>119.550.818.491,87</b>	<b>121.508.565.468,26</b>	<b>65.628.942.776,42</b>	<b>65.634.375.916,03</b>	n/a	n/a
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>84.988.100.274,37</b>	<b>84.959.521.990,80</b>	<b>64.268.584.022,99</b>	<b>100.910.522.207,78</b>	<b>120.550.818.491,87</b>	<b>136.707.372.239,26</b>	<b>98.536.762.500,03</b>	<b>98.536.375.916,03</b>	n/a	n/a
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.988.100.274,37	84.959.521.990,80	64.268.584.022,99	97.910.522.207,78	95.597.998.768,26	95.597.998.768,26	53.635.375.916,03	53.635.375.916,03	n/a	n/a
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	24.952.819.723,61	41.109.373.471,00	44.901.386.584,00	44.901.000.000,00	n/a	n/a
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.578.000.000,00</b>	<b>5.578.000.000,00</b>	<b>6.578.000.000,00</b>	<b>8.078.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>15.198.806.771,00</b>	<b>32.907.819.723,61</b>	<b>32.902.000.000,00</b>	n/a	n/a
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.578.000.000,00	5.578.000.000,00	6.578.000.000,00	6.578.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	7.955.000.000,00	7.950.000.000,00	n/a	n/a
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	14.198.806.771,00	24.952.819.723,61	24.952.000.000,00	n/a	n/a
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>21.160.857.041,51</b>	<b>97.910.522.207,78</b>	<b>(38.760.993.934,60)</b>	<b>95.597.998.768,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53.635.375.916,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85.141.845.272,61</b>	n/a	n/a

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah

Dari tahun 2017 sampai 2021 pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017, realisasi Pendapatan Daerah sebesar 931,583 juta rupiah. Pada tahun 2018, realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan menjadi 993.055 juta rupiah. Pada tahun 2019, Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 902.605 juta rupiah. Hal ini merupakan dampak dari merebaknya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Kemudian pada tahun 2020, Pendapatan Daerah kembali mengalami kenaikan menjadi 987.379 juta rupiah.

Dari sisi Belanja, pada Tahun 2017 realisasi Belanja Daerah sebesar 912.645 juta rupiah. Pada tahun 2018, Belanja Daerah mengalami kenaikan menjadi 990.032 juta rupiah. Pada tahun 2019, Belanja Daerah kembali mengalami kenaikan kembali menjadi 1.074.383 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2020, Pendapatan Daerah mengalami penurunan menjadi 962.825 juta rupiah.

Dari sisi SILPA, Kabupaten Barito Selatan memiliki SILPA yang cukup besar pada tiap tahunnya. Akan tetapi sebagian dari SILPA tersebut merupakan sisa anggaran yang memang jelas peruntukannya seperti SILPA dari DAK/BLUD/JKN/BOS dan lain-lain yang bersifat mengikat dan harus digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan yang sama, dengan demikian dari total SILPA pada tahun 2020 sebesar 85,141 juta rupiah tidak semuanya dapat digunakan untuk menambah anggaran belanja secara bebas untuk digunakan pada tahun anggaran yang akan datang.

Berdasarkan tabel rata-rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi rata-rata selama 5 tahun terakhir (2017-2021), Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,09 persen per tahun. Pencapaian target tersebut merupakan wujud upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya meningkatkan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian

tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah, persentase kontribusi PAD masih relatif kecil, sedangkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi. Rata-rata Kontribusi Pendapatan Daerah selama rentang waktu Tahun 2017-2022, yang tertinggi berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 91,39 persen, PAD sebesar 6,73 persen dan lain-lain penerimaan pendapatan daerah yang sah sebesar 9,18 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Perkembangan realisasi Penerimaan Daerah dari Pendapatan Transfer mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,54 persen per tahun. Akan tetapi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Ini merupakan salah satu dampak dari upaya Pemerintah Pusat dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 beserta dampaknya yang melanda Indonesia, dimana salah dampak yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah semakin menurunnya jumlah transfer dari pemerintah Pusat ke Daerah.

Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah rata-rata selama 5 tahun terakhir, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan termasuk menata ulang data para wajib pajak bumi dan bangunan yang belum diperbaharui dengan menganut prinsip-prinsip; (1) Potensial, lebih menitikberatkan pada potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah

diterapkan dan dilaksanakan; dan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya.

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah akan secara konsisten selalu dioptimalkan agar proporsi PAD terhadap pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan. Untuk melihat perilaku (*behaviour*) dari pendapatan, pada tabel 3.4 berikut akan ditunjukkan perkembangan dari komponen pendapatan secara lebih rinci.

Dari tabel perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan diatas terlihat bahwa secara umum pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan pertumbuhan yang bernilai positif sebesar 1,96 persen. Walaupun dalam realisasinya Pendapatat Daerah setiap tahunnya tidak mencapai target. Pertumbuhan tahunan dan rata-rata dari masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (dalam Juta rupiah)**

NO	Uraian	Realisasi					Proyeksi 2023	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>931.583.634.313,36</b>	<b>993.055.937.843,65</b>	<b>1.006.510.308.469,03</b>	<b>987.379.417.289,87</b>	<b>n/a</b>	<b>1.002.077.855.953,36</b>	<b>1,96</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>49.297.479.852,95</b>	<b>81.427.860.612,76</b>	<b>77.337.581.831,24</b>	<b>56.790.417.171,83</b>	<b>n/a</b>	<b>89.094.042.318,00</b>	<b>4,83</b>
4.1.01	Pajak Daerah	7.115.682.253,31	11.130.151.141,05	18.796.170.247,17	12.967.330.285,54	n/a	22.430.600.000,00	22,15
4.1.02	Retribusi Daerah	4.577.253.746,00	4.914.887.719,00	3.990.320.846,00	3.455.933.184,80	n/a	6.998.448.664,00	(8,94)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.091.751.296,00	8.925.715.960,00	8.285.479.957,00	8.531.879.158,00	n/a	10.209.260.800,00	6,36
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.512.792.557,64	56.457.105.792,71	46.265.610.781,07	31.835.274.543,49	n/a	49.455.732.854,00	1,42
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>862.618.701.368,49</b>	<b>911.628.077.230,89</b>	<b>902.605.223.637,79</b>	<b>903.135.067.712,04</b>	<b>n/a</b>	<b>905.563.662.848,89</b>	<b>1,54</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>769.484.748.243,00</b>	810.947.108.709,00	791.125.694.326,00	734.170.496.133,00	n/a	872.007.693.540,00	(1,55)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	30.459.434.321,89	29.486.049.311,79	30.248.150.579,04	n/a	33.555.969.308,89	0,85
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	<b>69.302.851.000,00</b>	70.221.534.200,00	81.993.480.000,00	138.716.421.000,00	n/a	0,00	26,03
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>19.667.453.091,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.567.503.000,00</b>	<b>27.453.932.406,00</b>	<b>n/a</b>	<b>7.420.150.786,47</b>	<b>11,76</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.986.797.497,92	0,00	26.567.503.000,00	21.398.345.000,00	n/a	3.383.500.000,00	5,96
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.680.655.594,00	0,00	0,00	6.055.587.406,00	n/a	4.036.650.786,47	53,31

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**

RENCANA  
 PERUBAHAN  
 TRIPTIM



1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	<b>BELANJA</b>	912.645.780.811,38	990.032.213.115,75	1.074.383.498.021,26	962.825.619.233,29	n/a	1.095.287.225.702,20	1,62
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	645.015.128.952,38	650.913.843.466,75	700.279.624.110,72	601.695.604.299,29	n/a	748.005.802.092	(2,29)
5.1.01	Belanja Pegawai	343.603.258.753,68	398.623.809.450,25	387.069.282.503,00	369.217.835.363,00	n/a	468.444.509.528,60	2,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.546.490.596,70	238.643.628.784,50	289.175.581.872,72	210.946.701.185,29	n/a	235.576.481.367,70	(7,50)
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	12.421.232,00	171.351.667,00	637.627.057,00	n/a	1.372.405.084,60	92,90
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.285.000.000,00	n/a	752.116.211,00	
5.1.05	Belanja Hibah	26.505.257.244,00	11.148.984.000,00	21.879.885.750,00	14.569.327.885,00	n/a	39.110.289.900,00	(18,08)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.360.122.358,00	2.485.000.000,00	1.983.522.318,00	5.039.112.809,00	n/a	2.750.000.000,00	(11,86)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	133.616.784.497,00	204.359.109.701,00	225.100.815.134,54	203.300.687.244,00	n/a	197.761.427.419	15,02
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.369.889.708,00	0,00	0,00	0,00	n/a	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.656.590.960,00	44.343.985.464,00	23.077.094.354,50	22.996.163.757,00	n/a	26.408.205.543,50	11,35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.739.687.758,00	28.486.610.749,00	26.820.396.118,00	25.497.550.280,00	n/a	67.252.333.445,00	20,04
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.941.297.571,00	127.614.903.655,00	174.917.182.300,04	152.898.083.416,00	n/a	104.044.788.430,00	20,71
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.573.854.000,00	3.795.414.583,00	282.369.442,00	1.684.025.791,00	n/a	56.100.000,00	(50,13)

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**

RENCANA  
PERUBAHAN  
TRIPIN



5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>264.905.250,00</b>	<b>91.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.417.267.490,00</b>	<b>n/a</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	260,56
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	264.905.250,00	91.200.000,00	0,00	12.417.267.490,00	n/a	3.000.000.000,00	260,56
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>133.748.962.112,00</b>	<b>134.668.059.948,00</b>	<b>149.003.058.776,00</b>	<b>145.412.060.200,00</b>	<b>n/a</b>	<b>146.519.996.191,80</b>	2,83
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	<b>529.246.100,00</b>	1.232.357.900,00	1.240.952.900,00	1.080.318.300,00	n/a	4.157.058.771,80	26,85
5.1.02	Belanja Bantuan Keuangan	<b>133.219.716.012,00</b>	133.435.702.048,00	147.762.105.876,00	144.331.741.900,00	n/a	142.362.937.420,00	2,71
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>79.381.521.990,80</b>	<b>92.832.522.207,78</b>	<b>121.508.565.468,26</b>	<b>65.634.375.916,03</b>	<b>n/a</b>	<b>0,00</b>	(6,14)
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>84.959.521.990,80</b>	<b>100.910.522.207,78</b>	<b>136.707.372.239,26</b>	<b>98.536.375.916,03</b>	<b>n/a</b>	<b>0,00</b>	5,07
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.959.521.990,80	97.910.522.207,78	95.597.998.768,26	53.635.375.916,03	n/a	0,00	(14,21)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	3.000.000.000,00	41.109.373.471,00	44.901.000.000,00	n/a	0,00	146,44
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.578.000.000,00</b>	<b>8.078.000.000,00</b>	<b>15.198.806.771,00</b>	<b>32.902.000.000,00</b>	<b>n/a</b>	<b>0,00</b>	80,68
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.578.000.000,00	6.578.000.000,00	1.000.000.000,00	7.950.000.000,00	n/a	0,00	12,54
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	1.500.000.000,00	14.198.806.771,00	24.952.000.000,00	n/a	0,00	155,27
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>97.910.522.207,78</b>	<b>95.597.998.768,26</b>	<b>53.635.375.916,03</b>	<b>85.141.845.272,61</b>	<b>n/a</b>	<b>0,00</b>	(4,55)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah

Dari tabel diatas, secara umum terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari tiga komponen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah dari tahun 2017 sampai tahun 2021 memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 1,96 persen. Sedangkan untuk Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami pertumbuhan yang positif seperti Pendapatan Daerah sebesar 1,62 persen. Belanja operasi mulai tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami nilai pertumbuhan rata-rata yang negatif yakni 2,29 persen, Belanja Modal tumbuh positif rata-rata sebesar 15,02 persen, Belanja Tidak Terduga tumbuh positif rata-rata sebesar 260,56 persen, dan Belanja Transfer tumbuh positif rata-rata sebesar 2,83 persen.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Selain melihat progres pendapatan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa lampau juga dapat dilihat melalui neraca daerah. Neraca daerah merupakan suatu gambaran terkait dengan harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Banyak hal yang perlu di cermati terhadap aspek-aspek tersebut sehingga diperlukan sebuah kebijakan agar tidak menjadi persoalan di periode mendatang. Rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Aset	1.719.865.874.462,12	1.689.212.036.374,53	1.746.916.173.623,06	1.899.112.873.336,24	n/a	
1,1	Aset Lancar	124.155.609.477,79	130.829.549.643,21	85.144.882.966,54	131.341.551.042,82	n/a	
1.1.1	Kas	92.002.166.377,01	88.299.883.672,50	48.986.478.246,27	81.095.088.525,14	n/a	
1.1.2	Piutang	6.158.357.336,86	7.749.851.231,91	0,00	0,00	n/a	
1.1.3	Persediaan	8.341.854.410,90	8.003.904.224,11	6.441.493.945,32	7.714.245.856,03	n/a	
1.1.4	Investasi Jangka Panjang	44.212.230.388,00	65.881.406.495,00	66.856.406.495,00	73.179.900.005,00	n/a	
1,2	Aset Tetap	1.227.882.017.648,98	1.362.324.938.243,14	1.506.420.848.268,43	1.652.931.493.459,49	n/a	
1.2.1	Tanah	258.395.772.388,50	257.026.883.073,49	262.482.442.424,49	262.157.468.170,49	n/a	
1.2.2	Peralatan Dan Mesin	165.056.991.725,23	192.846.112.809,77	216.619.895.642,26	244.023.676.283,90	n/a	
1.2.3	Gedung Dan Bangunan	567.639.097.209,59	593.510.558.857,84	629.326.808.730,84	657.564.175.165,30	n/a	
1.2.4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	655.768.523.650,86	852.471.438.953,24	924.321.098.082,28	1.095.827.345.280,28	n/a	
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	16.731.545.815,86	14.528.097.398,04	15.955.940.057,23	16.129.568.852,23	n/a	
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.120.806.874,00	59.163.867.168,00	169.071.734.568,00	156.523.679.826,00	n/a	
1,3	Aset Lainnya	323.616.016.947,35	130.176.141.993,18	88.494.035.893,09	41.659.928.828,93	n/a	
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	291.184.400,16	291.184.400,16	18.124.251,00	26.486.951,00	n/a	
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	285.475.056,36	285.475.056,36	426.378.714,17	566.202.091,17	n/a	
1.3.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1.3.4	Aset Tak Berwujud	2.079.941.500,00	3.644.209.562,71	2.431.642.824,37	2.405.818.938,97	n/a	
1.3.5	Aset Bukan Milik Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1.3.6	Aset Lain-Lain	320.404.183.155,24	125.400.040.108,36	85.485.733.612,20	38.921.150.833,60	n/a	
	Jumlah Aset	1.719.865.874.462,12	1.689.212.036.374,53	1.746.916.173.623,06	1.899.112.873.336,24	n/a	



2	Kewajiban	0,00	0,00	43.078.709.337,54	66.660.691.034,00	n/a	
2,1	Kewajiban Jangka Pendek	4.471.904.046,00	20.564.839.408,54	18.126.709.337,54	66.660.691.034,00	n/a	
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
2.1.2	Uang Muka Dari Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	298.577.104,00	163.234.375,00	n/a	
2.1.4	Utang Belanja	4.145.714.846,00	21.356.519,00	45.038.189,00	52.197.079,00	n/a	
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	326.189.200,00	20.543.482.889,54	17.752.421.226,54	66.445.259.580,00	n/a	
2,2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	24.952.000.000,00	0,00	n/a	
2.2.1	Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
	Jumlah Kewajiban	4.471.904.046,00	20.564.839.408,54	43.078.709.337,54	66.660.691.034,00	n/a	
3	Ekuitas Dana	1.715.393.970.416,16	1.668.647.196.965,99	1.703.287.364.285,52	1.832.452.182.302,24	n/a	
3,1	Ekuitas Dana Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
3.1.1	Silpa	98.319.375.492,78	95.856.246.935,68	53.635.375.916,03	85.141.845.272,61	n/a	
3.1.2	Cadangan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
3.1.3	Cadangan Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
3.1.4	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
3.1.5	Dana Yang Disediakan Untuk Hutang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
3,2	Ekuitas Dana Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
3.1.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
3.1.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
3.1.3	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	66.856.406.495,00	73.179.900.005,00	n/a	
	Jumlah Ekuitas Dana	1.715.393.970.416,12	1.668.647.196.964,99	1.703.287.364.285,52	1.832.452.182.302,24	n/a	
	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	1.689.212.036.374,53	1.719.865.874.462,12	1.746.366.073.623,06	1.899.112.873.336,24	n/a	

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2017-2021 digunakanlah beberapa analisis rasio seperti :

### 1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Barito Selatan adalah rasio lancar. Neraca pada pemerintah daerah sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, untuk itu dilakukan penyesuaian pada aktiva lancar.

**Tabel 3. 6**  
**Rasio Lancar**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (000 Rupiah)**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Aset Lancar	124.155.609.477,79	130.829.549.643,21	85.144.882.966,54	131.341.551.042,82	n/a
Kewajiban Lancar	4.471.904.046,00	20.564.839.408,54	43.078.709.337,54	66.660.691.034,00	n/a
Rasio Lancar	27,76	6,36	1,98	1,97	n/a

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah

Dengan rasio lancar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Selatan sangat likuid dengan kemampuan pengembalian hutang lancar mencapai rata-rata mencapai 9,52 terhadap aset lancarnya.

### 2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga rasio leverage (daya ungkit) yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana aktiva entitas dibiayai oleh hutang sehingga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah:

**a. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)**

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

**Tabel 3.7**  
**Rasio Hutang Terhadap Ekuitas**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Kewajiban	4.471.904.046,00	20.564.839.408,54	43.078.709.337,54	66.660.691.034,00	n/a
Ekuitas	1.715.393.970.416,16	1.668.647.196.965,99	1.703.287.364.285,52	1.832.452.182.302,24	n/a
Total Debt to equity Ratio	0,003	0,012	0,025	0,036	n/a

*Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah*

Dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Selatan memiliki kemampuan modal untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

**b. Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)**

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang di belanjai oleh hutang.

**Tabel 3.8**  
**Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)**

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Kewajiban	4.471.904.046,00	20.564.839.408,54	43.078.709.337,54	66.660.691.034,00	n/a
Aktiva	1.689.212.036.374,53	1.719.865.874.462,12	1.746.366.073.623,06	1.899.112.873.336,24	n/a
Total Debt to Total Aset Ratio	0,003	0,012	0,025	0,035	n/a

*Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah*

### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Di setiap organisasi seperti halnya organisasi Perangkat Daerah (PD) yang berada dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Perangkat Daerah (PD) tersebut bertanggung jawab terhadap panggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan secara administratif harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah (PD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing PD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2017-2021 disusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap PD dan dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Badan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelola Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan

SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Kabupaten Barito Selatan pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.9**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2021**

Tahun	OpiniBPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan Tengah
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber:Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2022

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Analisis Proporsi Belanja Daerah 2017-2020**

(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2017		2018		2019		2020	
		Jumlah (Rp)	Proporsi (%)						
1.	Belanja Operasi	645.015	82,81	650.913	76,10	700.279	75,67	601.695	73,61
2.	Belanja Modal	133.616	17,15	204.359	23,89	225.100	24,33	203.300	24,87
3.	Belanja Tidak Terduga	264	0,03	91	0,01	0,00	0,00	12.417	1,52
4.	Belanja Transfer	133.748	17,17	134.668	15,74	149.003	16,10	145.412	17,79

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya berdasarkan hasil audit BPK RI. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya.

Tingginya SILPA menjadi catatan penting terhadap perekonomian makro Kabupaten Barito Selatan dimana hal tersebut menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan sehingga tidak optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**  
**SILPA Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021 (Rupiah)**

Tahun	SILPA (Rp)
2017	97.910.522.207,78
2018	95.597.998.768,26
2019	53.635.375.916,03
2020	85.141.845.272,61
2021	n/a

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Barito Selatan, 2022

Analisis pembiayaan Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dijelaskan secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017-2021**

(dalam juta rupiah)

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	931.583	993.055	1.006.510	987.379	n/a
2	BELANJA DAERAH	912.645	990.032	1.074.383	962.825	n/a
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.578	8.078	15.198	32.902	n/a
<b>A.</b>	<b>Surplus/Defisit Riil</b>	<b>18.937</b>	<b>3.023</b>	<b>(67.873)</b>	<b>24.553</b>	<b>n/a</b>
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	84.959	97.910	<b>95.597</b>	53.635	n/a
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	3.000	41.109	44.901	n/a
<b>B.</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan</b>	<b>84.959</b>	<b>100.910</b>	<b>136.707</b>	<b>98.536</b>	<b>n/a</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		<b>97.910</b>	<b>95.597</b>	<b>53.635</b>	<b>85.141</b>	<b>n/a</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah

Dari Tabel diatas tampak bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Kabupaten Barito Selatan mengalami surplus anggaran sebesar 18.937 juta dan 3.023 juta. Tahun 2019 mengalami defisit sebesar 67.873 juta, kemudian

di 2020 kembali surplus sebesar 24.553 juta. Surplus anggaran pada periode sebelumnya dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2017-2021) terlihat pada Tabel 3.16 berikut ini:

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017-2021**

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		RATA-RATA PERTUMB
		( Rp )	%									
1	Jumlah SiLPA	97.910		95.597		53.635		85.141		n/a	n/a	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain :

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

### 3.2.3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

**Tabel 3.14**  
**Rasio Kemandirian Keuangan**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2021**

Tahun	Total PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kategori
2017	49.297.479.852,95	931.583.634.313,36	5,29%	Rendah Sekali
2018	81.427.860.612,76	993.055.937.843,65	8,20%	Rendah Sekali
2019	77.337.581.831,24	902.605.223.637,79	8,57%	Rendah Sekali
2020	56.790.417.171,83	987.379.417.289,87	5,75%	Rendah Sekali
2021	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2017-2021. Diolah

Dengan rasio kemandirian keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2021, rasio kemandirian daerah Kabupaten Barito Selatan berada dalam kategori rendah sekali (0-25%).

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun 2026. Pendanaan program kegiatan yang diakomodir sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2023-2026.

#### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

##### 1. Proyeksi Pendapatan Daerah

###### a. Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2017-2021, dengan menggunakan tahun dasar 2022 dan mempertimbangkan bahwa pendapatan transfer jumlah penerimaan serta alokasinya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat serta beberapa

komponen pendapatan lainnya yang tidak bisa diproyeksikan dengan menggunakan nilai pertumbuhan pendapatan masa lalu, maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:



**Tabel3.15**  
**Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.002.077.855.953,36</b>	<b>1.015.128.469.628,31</b>	<b>1.032.118.010.856,43</b>	<b>1.049.286.092.352,33</b>	<b>1,52%</b>
I	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>89.094.042.318,00</b>	<b>93.014.817.857,00</b>	<b>100.783.222.567,00</b>	<b>108.637.956.180,00</b>	<b>6,38%</b>
1	Pajak Daerah	22.430.600.000,00	25.286.000.000,00	26.790.600.000,00	26.877.500.000,00	5,74%
2	Retribusi Daerah	6.998.448.664,00	7.224.969.162,00	7.493.022.842,00	7.696.828.800,00	3,12%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.209.260.800,00	10.500.230.800,00	11.110.210.800,00	12.560.450.975,00	6,60%
4	Lain-lain PAD yang Sah	49.455.732.854,00	50.003.617.895,00	55.389.388.925,00	61.503.176.405,00	6,92%
II	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>905.563.662.848,89</b>	<b>914.619.299.476,98</b>	<b>923.765.492.472,15</b>	<b>933.003.147.396,88</b>	<b>0,99%</b>
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	872.007.693.540,00	880.727.770.475,00	889.535.048.180,15	898.430.398.661,96	0,99%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.555.969.308,89	33.891.529.001,98	34.230.444.292,00	34.572.748.734,92	0,99%
III	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.420.150.786,47</b>	<b>7.494.352.294,33</b>	<b>7.569.295.817,28</b>	<b>7.644.988.775,45</b>	<b>0,99%</b>
1	Pendapatan Hibah	3.383.500.000,00	3.417.335.000,00	3.451.508.350,00	3.486.023.433,50	0,99%
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.036.650.786,47	4.077.017.294,33	4.117.787.467,28	4.158.965.341,95	0,99%

Sumber:Proyeksi/Target Struktur APBD Tahun 2023-2026. Diolah

Proyeksi penerimaan Kabupaten Barito Selatan tiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,52 persen selama 6 (enam) tahun (2023-2026), dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2023-2026 rata-rata sebesar 6,38 persen. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan tersebut, mengindikasikan bahwa Kabupaten Barito Selatan belum cukup memiliki kemandirian fiskal dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan tahun 2023-2026.

Peningkatan proyeksi target PAD secara signifikan diarahkan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Guna merealisasikan PAD dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain: revitalisasi BUMD/Perusda dan ekstensifikasi usaha dalam berbagai sektor, seperti pemungutan pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan, pertambangan galian C, jasa konstruksi dan bidang usaha lainnya melalui penyertaan saham sesuai ketentuan yang berlaku.

## **b. Proyeksi Silva**

Proyeksi SiLPA tahun 2023-2026 menggunakan data SiLPA kurun waktu 2017-2021, namun dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut ini :

**Tabel 3.16**  
**Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2026**  
 (dalam juta rupiah)

URAIAN	TAHUN PROYEKSI			
	2023	2024	2025	2026
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.538	59.414	55.022	55.982

Sumber:Proyeksi/Target Struktur APBD Tahun 2023-2026. Diolah

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Barito Selatan dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2023-2026, disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2026**

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN PROYEKSI			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	1.002.077	1.015.128	1.032.118	1.049.286
4	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	56.538	59.414	55.022	55.982
	<b>Total Kapasitas Kemampuan Keuda</b>	1.058.615	1.074.542	1.087.140	1.105.269

## 2. Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Belanja operasi
- b. Belanja modal
- c. Belanja tidak terduga
- d. Belanja transfer

Proyeksi Belanja Daerah kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 bisa dilihat pada tabel 3.18 berikut ini:

**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah)**

Kode	Uraian	APBD 2022	PROYEKSI RAPBD			
			2023	2024	2025	2026
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.019.710.164.747,68</b>	<b>1.033.916.383.518,47</b>	<b>1.044.626.278.848,07</b>	<b>1.071.860.481.844,15</b>	<b>1.089.589.401.383,35</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>680.005.274.629,90</b>	<b>700.153.645.665,07</b>	<b>700.153.645.665</b>	<b>700.153.645.665</b>	<b>700.153.645.665</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	425.858.645.026,00	430.834.189.849,17	430.834.189.849,17	430.834.189.849,17	430.834.189.849,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.160.437.607,00	230.580.904.805,00	230.580.904.805,00	230.580.904.805,00	230.580.904.805,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.247.640.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	683.742.010,90	683.742.010,90	683.742.010,90	683.742.010,90	683.742.010,90
5.1.05	Belanja Hibah	35.554.809.000,00	35.554.809.000,00	35.554.809.000,00	35.554.809.000,00	35.554.809.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>179.783.115.835,00</b>	<b>179.783.115.835,00</b>	<b>179.783.115.835</b>	<b>179.783.115.835</b>	<b>179.783.115.835</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.007.459.585,00	24.007.459.585,00	24.007.459.585,00	24.007.459.585,00	24.007.459.585,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.138.484.950,00	61.138.484.950,00	61.138.484.950,00	61.138.484.950,00	61.138.484.950,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.586.171.300,00	94.586.171.300,00	94.586.171.300,00	94.586.171.300,00	94.586.171.300,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>26.721.777.744,00</b>	<b>14.634.524.952,00</b>	<b>14.634.524.952,00</b>	<b>14.634.524.952,00</b>	<b>14.634.524.952,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	26.721.777.744,00	14.634.524.952,00	14.634.524.952,00	14.634.524.952,00	14.634.524.952,00
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>133.199.996.538,78</b>	<b>139.345.097.066,40</b>	<b>150.054.992.396,00</b>	<b>177.289.195.392,08</b>	<b>195.018.114.931,29</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.779.144.338,78	2.942.904.866,40	2.920.216.696,00	5.030.041.113,88	5.533.045.225,27
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	129.420.852.200,00	136.402.192.200,00	147.134.775.700,00	172.259.154.278,20	189.485.069.706,02

Sumber : Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2023-2026. Diolah

### **3. Proyeksi Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Sebagai salah satu cara mempersiapkan dana untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan berencana menganggarkan Dana Cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00 yang akan dilaksanakan dalam dua tahap/tahun Anggaran (Tahun 2023-2024). Proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2023-2026 bisa dilihat pada tabel 3.19 berikut ini:

**Tabel 3.19**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah)**

Kode	Uraian	APBD 2022	PROYEKSI RAPBD			
			2023	2024	2025	2026
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
		<b>80.000.000.000,00</b>	<b>59.138.527.564,94</b>	<b>56.797.809.219,76</b>	<b>39.742.470.987,72</b>	<b>40.303.309.031,03</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.000.000.000,00	59.138.527.564,94	56.797.809.219,76	39.742.470.987,72	40.303.309.031,03
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>59.138.527.564,94</b>	<b>56.797.809.219,76</b>	<b>39.742.470.987,72</b>	<b>40.303.309.031,03</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				0,00	0,00
		<b>62.300.000.000,00</b>	<b>27.300.000.000,00</b>	<b>27.300.000.000,00</b>		
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>62.300.000.000,00</b>	<b>27.300.000.000,00</b>	<b>27.300.000.000,00</b>	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>17.700.000.000,00</b>	<b>31.838.527.564,94</b>	<b>29.497.809.219,76</b>	<b>39.742.470.987,72</b>	<b>40.303.309.031,03</b>

Sumber : Proyeksi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2023-2026. Diolah

**3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Besar anggaran ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program yang diproyeksikan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD.

**1. Penghitungan Pendanaan**

Secara garis besar, proyeksi kerangka pendanaan tahun 2023-2026, yang meliputi : pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut. Proyeksi kerangka pendanaan tersebut sifatnya indikatif dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah dalam perkembangannya nanti, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD tahun 2023-2026).



Tabel 3.20

Proyeksi Kerangka Pendanaan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah)

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	APBD TAHUN 2025	APBD TAHUN 2026
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.002.077.855.953,36</b>	<b>1.015.128.469.628,31</b>	<b>1.032.118.010.856,43</b>	<b>1.049.286.092.352,33</b>
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>89.094.042.318,00</b>	<b>93.014.817.857,00</b>	<b>100.783.222.567,00</b>	<b>108.637.956.180,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	22.430.600.000,00	25.286.000.000,00	26.790.600.000,00	26.877.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.998.448.664,00	7.224.969.162,00	7.493.022.842,00	7.696.828.800,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.209.260.800,00	10.500.230.800,00	11.110.210.800,00	12.560.450.975,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.455.732.854,00	50.003.617.895,00	55.389.388.925,00	61.503.176.405,00
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>905.563.662.848,89</b>	<b>914.619.299.476,98</b>	<b>923.765.492.472,15</b>	<b>933.003.147.396,88</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	872.007.693.540,00	880.727.770.475,00	889.535.048.180,15	898.430.398.661,96
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.555.969.308,89	33.891.529.001,98	34.230.444.292,00	34.572.748.734,92
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.420.150.786,47</b>	<b>7.494.352.294,33</b>	<b>7.569.295.817,28</b>	<b>7.644.988.775,45</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.383.500.000,00	3.417.335.000,00	3.451.508.350,00	3.486.023.433,50
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.036.650.786,47	4.077.017.294,33	4.117.787.467,28	4.158.965.341,95

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**

RENCANA  
 PERUBAHAN  
 RPKM



<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.033.916.383.518,47</b>	<b>1.044.626.278.848,07</b>	<b>1.071.860.481.844,15</b>	<b>1.089.589.401.383,35</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>700.153.645.665,07</b>	<b>700.153.645.665</b>	<b>700.153.645.665</b>	<b>700.153.645.665</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	430.834.189.849,17	430.834.189.849,17	430.834.189.849,17	430.834.189.849,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.580.904.805,00	230.580.904.805,00	230.580.904.805,00	230.580.904.805,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	683.742.010,90	683.742.010,90	683.742.010,90	683.742.010,90
5.1.05	Belanja Hibah	35.554.809.000,00	35.554.809.000,00	35.554.809.000,00	35.554.809.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>179.783.115.835,00</b>	<b>179.783.115.835</b>	<b>179.783.115.835</b>	<b>179.783.115.835</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.007.459.585,00	24.007.459.585,00	24.007.459.585,00	24.007.459.585,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.138.484.950,00	61.138.484.950,00	61.138.484.950,00	61.138.484.950,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.586.171.300,00	94.586.171.300,00	94.586.171.300,00	94.586.171.300,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>14.634.524.952,00</b>	<b>14.634.524.952,00</b>	<b>14.634.524.952,00</b>	<b>14.634.524.952,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.634.524.952,00	14.634.524.952,00	14.634.524.952,00	14.634.524.952,00
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>139.345.097.066,40</b>	<b>150.054.992.396,00</b>	<b>177.289.195.392,08</b>	<b>195.018.114.931,29</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.942.904.866,40	2.920.216.696,00	5.030.041.113,88	5.533.045.225,27
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	136.402.192.200,00	147.134.775.700,00	172.259.154.278,20	189.485.069.706,02

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**

RENCANA  
 PERUBAHAN  
 RPTM



6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.138.527.564,94	56.797.809.219,76	39.742.470.987,72	40.303.309.031,03
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.138.527.564,94	56.797.809.219,76	39.742.470.987,72	40.303.309.031,03
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>59.138.527.564,94</b>	<b>56.797.809.219,76</b>	<b>39.742.470.987,72</b>	<b>40.303.309.031,03</b>
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.300.000.000,00	27.300.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>27.300.000.000,00</b>	<b>27.300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>31.838.527.564,94</b>	<b>29.497.809.219,76</b>	<b>39.742.470.987,72</b>	<b>40.303.309.031,03</b>

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama masa waktu pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, diidentifikasi dengan baik, pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan urusannya, sebagai berikut:

#### **4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **4.1.1. Pendidikan**

1. Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya terwujud.
3. Jumlah minimum guru masih belum terpenuhi.
4. Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik.
5. Program dan kegiatan terhambat oleh pandemi Covid-19.
6. Kenaikan jabatan kepala sekolah terhambat karena sertifikasi-perjalanan dinas tidak dapat dilakukan.
7. Proses belajar mengajar terganggu terutama karena belum semua sekolah, guru, dan peserta didik terlayani jaringan internet/paket internet untuk menunjang pembelajaran daring.
8. Masih kurangnya perhatian pada pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Masih kurangnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan memfungsikan peran dari pejabat tugas pembantuan.
10. Masih kurangnya fokus pemenuhan SPM dalam Penanganan terhadap anak-anak putus sekolah.
11. Kurangnya dukungan terhadap program merdeka belajar mengenai literasi dan numerasi yang merupakan program prioritas nasional serta Provinsi maupun Kabupaten.

##### **4.1.2. Kesehatan**

1. Angka Kematian Ibu yang jauh meningkat pada tahun 2020 sebesar 251 dan 2021 sebesar 399,3.
2. Masih tingginya kasus stunting dan wasting di Kabupaten Barito Selatan (40,19%).
3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai.

4. Fluktuasi penambahan kasus Covid-19;
5. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan. Sebagian wilayah khususnya perkotaan jumlah tenaga kesehatan sudah terpenuhi. Untuk wilayah terpencil dan sangat terpencil tenaga terutama dokter masih sangat terbatas.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama didaerah terpencil dan sangat terpencil.
7. Pelayanan tujukan yang tersedia masih terbatas. Jumlah puskesmas perawatan dan rumah sakit yang terbatas. Pemanfaatan lebih cenderung hanya oleh masyarakat di sekitar fasilitas tersebut.
8. Masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Terutama masih terdapat masyarakat yang BAB di daerah aliran sungai.
9. Kesadaran masyarakat untuk membawa balita ke posyandu sangat rendah terutama bayi yang telah melewati umur 1 tahun dan telah mendapatkan imunisasi lengkap.
10. Pencapaian SPM belum optimal akibat lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan program. Data target sasaran merupakan angka prediksi yang belum sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya sehingga mempersulit pencapaian target realisasi.
11. Sistem pelaporan belum berjalan dengan baik.
12. Capaian indikator SPM Tahun Anggaran 2020 di bawah 60%
  - Pelayanan Kesehatan Balita = 44%
  - Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar = 13%
  - Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif = 23%
  - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut = 21%
  - Pelayanan Kesehatan Orang Hipertensi = 13%
  - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) = 22%
  - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis = 18%
  - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) =57%
13. Masih belum selesainya pendataan keluarga untuk mendapatkan profil kesehatan sampai tingkat keluarga disuatu wilayah sehingga akan memberikan kemudahan dalam pengambilan kebijakan.

14. Belum optimalnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
15. RSUD Jaraga Sasameh masih kelas C.
16. Masih belum maksimalnya digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Transformasi Digital Layanan Kesehatan Melalui Pelayanan Telemedicine.
17. Percepatan penyelesaian pendataan keluarga dalam program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

#### **4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Masih terdapat desa/kelurahan yang belum terhubung melalui jalan darat ke ibu kota kabupaten, melainkan harus melalui transportasi air yang memerlukan biaya pengeluaran yang lebih banyak/tinggi.
2. Belum optimalnya penataan/penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan sempadan jalan, karena sampai tahun 2021 masih 4,53 persen dari target 1 persen.
3. Belum optimalnya pembangunan Trotoar di perkotaan, karena sampai dengan tahun 2021 capaian masih 1,125 persen dari target 18 persen.
4. Belum optimalnya Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor, karena sampai dengan tahun 2021 capaian masih 1,13 persen dari target 2,50 persen.
5. Belum optimalnya penanganan sarana prasarana irigasi kabupaten, karena sampai dengan tahun 2021 capaian luas jaringan irigasi dalam kondisi baik masih 42,18 persen dari target 62,61 persen.
6. Masih rendahnya penduduk berakses air minum layak sampai dengan tahun 2021 sebesar 50,35 persen dari target 73,87 persen, Capaian tersebut juga masih jauh berada di bawah target akses air minum layak yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Tahun 2021 sebesar 80,04 persen.
7. Terbatasnya tenaga pelaksana sebagai pengawas direksi yang mengawasi paket-paket kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan.
8. Kabupaten Barito Selatan merupakan daerah yang sebagian besar daratan rendah/rawa/gambut dalam melaksanakan pembangunan jalan memerlukan biaya yang cukup besar.

9. Terbatasnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kegiatan pembangunan jalan dimana rekanan di Barito Selatan sebagian besar belum memiliki peralatan.
10. Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor.
11. Belum selesainya Peninjauan Kembali dan revisi RTRW, sebagai dasar kepastian pemanfaatan lahan untuk pembangunan.
12. Belum adanya regulasi di daerah tentang ketertiban umum, RDTR, e-government, dan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan, serta turunan beberapa peraturan perundangan terbaru yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik.
13. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada diantaranya trantibum dan ketidaksesuaian peruntukan lahan dengan RTRW.
14. Belum optimalnya regulasi di daerah maupun dokumen pendukung untuk perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah.
15. Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik.
16. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota
17. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.
18. Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar yang telah terbangun.
19. Peninjauan kembali dan revisi RTRW belum selesai, sebagai dasar kepastian pemanfaatan lahan untuk pembangunan.
20. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan dan adanya kegiatan prioritas yang tidak bisa dilelang karena lahan pada lokasi pekerjaan belum clear and clean dan adanya lokasi pekerjaan yang masih dalam kawasan hutan.
21. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran drainase.
22. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dan masih banyak daerah irigasi yang bersetatus kawasan hutan.

23. Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan rencana taat ruang yang telah disusun.
24. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal.

#### **4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih
2. Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan
3. Tempat Pemakaman Umum belum terkelola dengan baik
4. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan
5. Masih tingginya angka backlog
6. Belum optimalnya pelayanan jaringan air bersih/minum permukiman
7. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman
8. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
9. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan – kegiatan yang ada di Bidang Perumahan.
10. Belum selesainya Penyusunan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
11. Belum selesainya Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
12. Belum diriviewnya dokumen RP2KPKP dan RP3KP
13. Belum adanya masterplan penataan bantaran/ sempadan sungai
14. Biaya investasi untuk perpipaan air bersih ke luar ibukota kecamatan tinggi

#### **4.1.5. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat**

1. Kurangnya SDM dalam upaya memaksimalkan capaian kinerja bidang.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring ke daerah – daerah dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana (kendaraan dinas/operasional).

3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran Ormas/LSM akan pentingnya perpanjangan kembali status ormas/LSM dan melakukan pendaftaran terhadap keberadaan ormas/LSM.
4. Kurangnya inovasi dan pengetahuan terhadap layanan data ormas/LSM berbasis online.
5. Terbatasnya dukungan dana operasional bagi Komunitas Intelijen Daerah untuk melakukan pemantauan ke lapangan.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas operasional deteksi dini di lapangan.
7. Belum optimalnya dana pada Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
8. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP serta kualitas dari personil Satpol PP itu sendiri;
9. Kurangnya prasarana public (gedung kantor) dalam rangka kelancaran operasional Satpol PP;
10. Minimnya pemahaman PERDA dan PERKADA oleh anggota Satpol PP;
11. Minimnya dukungan dari stakeholder;
12. Minimnya pendampingan hukum yudikatif;
13. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan (K3);
14. Masih tingginya pelanggaran perbuatan asusila sebagaimana diatur dalam Perda No.3 Tahun 2008;
15. Masih tingginya pelanggaran tidak memiliki KTP diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015;
16. Masih adanya pelanggaran mengemis, mengamen dan gelandangan diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008;
17. Masih adanya masyarakat yang tidak patuh terhadap izin mendirikan bangunan (Perda Nomor 6 Tahun 2010);
18. Masih banyaknya pelanggaran pedagang kaki lima di jalur hijau (Perda Nomor 3 Tahun 2004);
19. Minimnya ketersediaan dana untuk pembinaan anggota linmas kecamatan, kelurahan dan desa se Kab. Kotim;
20. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas, karena sifat keanggotaannya suka rela.

#### **4.1.6. Sosial**

1. Adanya pendatang dari luar daerah dengan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas.
2. Belum optimalnya pemberian bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial.

#### **4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### **4.2.1. Urusan Tenaga Kerja**

1. Masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja
2. Kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas
3. Rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perUndang-Undangan ketenagakerjaan
4. Masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting
5. Masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya ( Wajib Lapor Ketenagakerjaan )
6. Masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan.

##### **4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Belum optimalnya lembaga perlindungan anak.
2. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir.
3. Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling
4. Dalam hal pembangunan di kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) masih banyak OPD yang belum melakukan integritas programnya. Sehingga lebih dari 50% Kampung KB belum terlihat kemajuannya meski sudah memasuki tahun ke-4 dalam penyelenggaraan program.

Termasuk dukungan melalui dana desa/alokasi dana desa belum terintegrasi.

5. Alokasi Dana yang sangat minim
6. Fasilitas penunjang yang kurang

#### **4.2.3. Pangan**

1. Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi Force Majeure dan bencana alam tidak bisa dianggarkan optimal sesuai amanat SPM.
2. Sertifikasi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan) masih belum bisa dianggarkan karena keterbatasan anggaran sehingga tidak ada satupun kelembagaan petani yang berbadan hukum (legal aspek) di Kabupaten Barito Selatan.

#### **4.2.4. Pertanahan**

1. Banyak bidang tanah non-produktif dengan pemilik tidak berada di tempat, banyak pula bidang tanah yang tidak jelas kepemilikannya.
2. Masih banyak ditemui tumpang tindih surat kepemilikan.

#### **4.2.5. Lingkungan Hidup**

1. Penanganan Sampah baru dapat terlaksana sekitar 75%, sedangkan sisanya sekitar 25% dikelola masyarakat (dibakar, dikubur, dan dibuang kesungai)
2. Data Kualitas air hanya diperoleh dari perusahaan, sehingga apabila pihak perusahaan tidak menyampaikan laporannya, maka capaian pengelolaan kualitas air akan rendah. Beberapa perusahaan yang secara rutin menyampaikan laporannya adalah antara lain : PT Adaro, PT MTU, PT Artha Cantrkator, PT PLN dan PT BAP.
3. Banyak pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan, disebabkan harga batubara yang masih terus menurun.
4. Sebagian penduduk berada di Kecamatan diluar Kota Buntok, sedangkan tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada hanya di Kota Buntok.
5. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana.
6. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open damping.

#### **4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. Keterbatasan tenaga operator, petugas pelayanan serta dana dan peralatan keperluan pengolahan data kependudukan untuk verifikasi serta input data langsung ke lapangan data dimaksud.
2. Adanya kegiatan pada bidang-bidang yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku, sehingga dari keluruhan pagu anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat terserap secara 100% atau seluruhnya, dan sisa anggaran disettor kembali ke kas daerah.
3. Seringnya terjadi gangguan jaringan komunikasi data sehingga data tidak dapat diakses dengan baik dan juga pengiriman data ke pusat terjadi keterlambatan, sehingga menghambat proses pencetakan dokumen terkait.
4. Tidak tertibnya petugas register desa/kelurahan dalam menyampaikan laporan data kependudukan, hal ini dikarenakan tidak tersedianya dana transport bagi petugas register.
5. Pemerintah Desa tidak menganggarkan dana baik dari ADD maupun Dana Desa untuk pembuatan data kependudukan secara lengkap.
6. Penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) point e, yang mensyaratkan Akta Perkawinan Orang tua bagi Non muslim dan Buku Nikah orang tua bagi muslim. Sedangkan kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah di Kabupaten Barito Selatan baru ada sekitar 20,18%.
7. Penerbitan Kartu Keluarga baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 5 ayat (1) point b.5, yang juga mensyaratkan Akta Perkawinan Orang tua bagi Non Muslim dan Buku Nikah orang tua bagi yang muslim.

#### **4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal.
2. Teknologi Tepat Guna yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal.
3. Kemampuan SDM perangkat desa yang masih rendah
4. Kendala jaringan komunikasi sehingga data dan informasi lambat diterima
5. Kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur wilayah desa yang berbeda – beda sehingga terdapat desa yang sulit dijangkau
6. Kurang pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan perekonomian masyarakat.
7. Kurangnya pemahaman pengurus PKK Desa/Kelurahan untuk pengembangan program – program didesa dan kelompok binaan PKK.
8. Kurangnya dukungan PD lain yang terkait, dalam peningkatan perekonomian desa.

#### **4.2.8. Perhubungan**

1. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan.
2. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal.
3. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan.

#### **4.2.9. Komunikasi dan Informatika**

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom.
2. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk mendukung kelancaran tugas infokom.
4. Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam pelaksanaan tugas di bidang informatika.
5. Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan para wartawan sebagai partner pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan.
6. Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan petugas yang menjaganya selama 24 jam.

#### **4.2.10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

1. Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal.
2. Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif.
3. Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable).

#### **4.2.11. Penanaman Modal**

1. Sarana / fasilitas yang menunjang pelayanan perizinan masih kurang memadai, diantaranya : jaringan internet kurang maksimal, tidak tersedianya ruang konsultasi, dan belum tersedianya fasilitas untuk disabilitas;

2. Masih kurangnya koordinasi dari instansi-instansi teknis dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Belum tersedianya MPP ( Mall Pelayanan Publik );
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) handal merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis memadai yang bisa didapatkan dari adanya pelatihan;
5. Masih kurangnya jumlah tenaga PNS/ASN;
6. Kesulitan dalam koordinasi untuk kegiatan pengawasan dengan dinas teknis;
7. Masih terbatasnya upaya pengembangan peningkatan investasi mengingat sangat minimnya dana yang diberikan untuk promosi investasi daerah.

#### **4.2.12. Kepemudaan dan Olahraga**

1. Penanganan Kepemudaan dan Olahraga masih sangat terkendala terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya, Sehingga penangan tugas-tugas teknis tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Keterbatasan dana / anggaran merupakan permasalahan yang sangat nyata dalam pengembangan kepemudaan dan Olahraga di Daerah.
3. Kurangnya ketersediaan dana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.
4. Kurangnya promosi yang dilakukan kepada masyarakat (halayak umum) tentang pentingnya berolahraga.
5. Kurangnya koordinasi antara Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan PD terkait.

#### **4.2.13. Kebudayaan**

1. Program dan kegiatan terhambat pandemi Covid-19.
2. Terbatasnya fasilitas untuk mengakomodir antusiasme masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya dan cagar budaya.
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan masih relatif rendah disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan dan peningkatan pengembangan SDM kelembagaan.

4. Masih rendahnya koordinasi Pelaku Usaha bidang kebudayaan dalam mengembangkan secara optimal potensi yang ada, amenities dan aksesibilitas.

#### **4.2.14. Perpustakaan dan Kearsipan**

1. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan teknis dan juga adanya petugas fungsional Pustakawan.
2. Masih rendahnya minat baca bagi Masyarakat Umum, dengan indikator masih sedikitnya kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar membaca.
3. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum di Kabupaten Barito Selatan.
4. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan
5. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Kearsipan.

### **4.3. Urusan Pilihan**

#### **4.3.1. Kelautan dan perikanan;**

1. Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil.
2. Masih maraknya kegiatan Ilegal Fishing (Penangkapan ikan menggunakan Setrom dan bahan kimia berbahaya), sehingga merusak kelestarian sumberdaya perairan.
3. Pengolahan Hasil Perikanan masih bersifat tradisional dan musiman, belum mengarah kepada perindustrian perikanan.
4. Masih belum optimalnya Balai Benih Ikan (BBI) Palu Rejo dalam memproduksi benih ikan.

#### **4.3.2. Pertanian;**

1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi dalam keadaan rusak.
2. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah.
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian.

4. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang.
5. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Pada saat musim banjir dan puncaknya musim kemarau, banyak lahan pertanian tidak bisa menghasilkan, sehingga mengurangi ketersediaan pangan bagi masyarakat.
6. Perluasan areal tanam tidak dapat dilakukan khususnya di daerah yang termasuk kawasan hutan produksi, perlu secepatnya kepastian pemanfaatan dari RTRW.
7. Belum adanya perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai lahan yang tidak boleh beralih fungsi ke kepentingan apapun. Manajemen usaha tani dan kualitas produk relatif rendah, sehingga kalah bersaing dengan produk yang masuk dari luar daerah.

#### **4.3.3. Perdagangan;**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP.
2. Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- ( Nol rupiah ) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target.
3. Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan.
4. Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat.
5. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi.
6. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk sarana transportasi roda 4.
7. Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrolgian serta tenaga tekhnis kemetrolgian yang tersedia.

#### **4.3.4. Perindustrian;**

1. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan.
3. Ketatnya tingkat persaingan pasar.
4. Dinamisnya selera konsumen.
5. Tingginya cost produksi.
6. Kurang kondusifnya iklim usaha.

#### **4.3.5. Transmigrasi;**

Permasalahan utama terkait dengan Transmigrasi di Kabupaten Barito Selatan adalah bahwa sampai saat ini Kabupaten Barito Selatan Khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umum sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Moratorium penerimaan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk Wilayah Kabupaten Barito Selatan tidak terdapat lokasi baru untuk Transmigrasi. Dengan demikian pelaksanaan urusan transmigrasi adalah hanya dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap para transmigran yang sudah ada.

### **4.4. Unsur pendukung Urusan Pemerintahan**

#### **4.4.1. Sekretariat Daerah**

1. Terbatasnya pelaksana yang menangani kajian hukum terhadap kebijakan daerah.
2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin seperti perjalanan dinas dalam daerah KDH/WKDH, rapat koordinasi unsur Muspida (Forkopimda), pemeliharaan rutin dan penyediaan BBM mobil Jabatan dan mobil operasional serta penyediaan makanan dan minuman tamu/rapat masih belum optimal dikarenakan realisasi kegiatan tersebut menyesuaikan dengan intensitas kegiatan pimpinan dan pelayanan tamu-tamu pemda tidak bisa diprediksi secara pasti sehingga anggaran tersebut tidak harus habis.

#### **4.4.2. Sekretariat DPRD**

1. Kurang optimalnya koordinasi dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD, kepala daerah, kepala perangkat daerah, dan unsur masyarakat.
2. Sosialisasi program-program/kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang masing-masing komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat secara intensif tidak terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat kurang mengetahui mekanisme baik hukum maupun administrasi tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat.

#### **4.5. Unsur penunjang urusan pemerintahan**

##### **4.5.1. Perencanaan**

1. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Penataan data base dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.
3. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan instansi vertikal lainnya sebagai penyedia/sumber data.

##### **4.5.2. Keuangan**

1. Masih perlu untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Perlu adanya pembaharuan dan pembenahan database objek pajak daerah dan retribusi daerah.
3. PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diaplikasikan pada SIPD belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga masih menggunakan aplikasi SIMDA.

#### **4.5.3. Kepegawaian**

Penetapan UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dimana setiap angkatan Jabatan Pimpinan Tinggi harus melalui seleksi JPT.

#### **4.5.4. Pendidikan dan Pelatihan**

Penetapan Kebutuhan Diklat belum didukung oleh kegiatan survei dan pengolahan data AKD secara ilmiah..

#### **4.5.5. Penelitian dan Pengembangan**

Kurang optimalnya implementasi dalam mewujudkan pengembangan litbang dan inovasi daerah.

#### **4.6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan**

1. Kelemahan SPIP (APIP) antara lain Keterbatasan SDM dan Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
2. Tidak ekonomis, efisien, dan efektif dalam menjalankan sistem/prosedur;
3. Evaluasi SAKIP dan Penilaian Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB) Sudah dilaksakan akan tetapi Saran dan Rekomendasi yang sudah sampaikan hanya ada beberapa Perangkat Daerah yang menanggapi dan menindaklanjuti sebagai upaya perbaikan kinerja dan pertimbangan atau feedback dalam penyusunan Laporan di tahun berikutnya.
4. Laporan akuntabilitas kinerja masih dianggap sebagai pemenuhan pelaporan saja karena masih banyak kekurangan terutama dari segi perencanaan dan evaluasi pencapaian target kinerja untuk IKU.
5. Masih terdapat aparatur pada perangkat daerah yang belum memahami akan pentingnya penyusunan Indikator Kinerja Utama sehingga dalam memproses/menginput data tidak sesuai aturan yang berlaku.

#### **4.7. Unsur pemerintahan umum**

1. Pendidikan politik masyarakat masih rendah.
2. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun.
3. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

#### **4.8. Telaah Kebijakan & Isu-Isu Strategis**

##### **4.8.1. Kebijakan Internasional (Sustainable Development Goals/SDGs)**

Tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan.

Program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan kurun waktu selama 15 tahun program MDGs berjalan. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Ada tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs, yaitu : Indikator pertama yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs paska MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang harus dicapai hingga 2030 yaitu :

1. Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang
2. Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan
3. Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia
4. Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak.
5. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak.
6. Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energy untuk semua
8. Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak.
9. Membangun infrastruktur yang memiliki keandalan, dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi.
10. Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara.
11. Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan.
12. Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi
13. Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya
14. Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/ menghentikan penurunan, dan mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati.
16. Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dapat dipertanggungjawabkan dan kelembagaan terbuka pada setiap level.
17. Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

#### **4.8.2. Kebijakan Nasional : Telaah Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 memiliki visi:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, visi dan misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Pada perencanaan tahunan, ketujuh agenda ini menjadi prioritas nasional (PN). Tujuh agenda pembangunan pada RPJMN tahun 2020-2024 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

#### **4.8.3. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”**

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 5 misi pembangunan meliputi:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

#### **4.8.4. Telaah RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2006-2026**

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 yaitu:

**“Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”**

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 12 misi pembangunan meliputi:

1. Asri dan Lestari.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi diluar Sektor Pertanian.
4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Barito Selatan.
5. Mengembangkan kondisi sosial dan politik yang demokratis, saling tenggang rasa, persatuan dan aman.
6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial.
7. Beriman dan Bertaqwa.
8. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi.
9. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman.
10. Mencegah Bencana Alam.
11. Peningkatan Profesionalisme pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

#### **4.8.5. Telaah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035**

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;

- d. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan; perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
- e. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- f. Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
- b. Sistem Jaringan Prasarana utama;
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, **Buntok di Kabupaten Barito Selatan**; dan
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

**Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama meliputi :**

**a. Sistem jaringan transportasi darat:**

**1) Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan**, mencakup:

**Rencana pengembangan jaringan jalan :**

- Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi: Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km;

Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km; dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.

- Rencana pengembangan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi: Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanamang – Tumbang Kaburai – Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km.
- Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :
  - ❖ Jl. Tjilik Riwut Km 31 – Lingkar Luar – Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km;
  - ❖ Bawan – Lahei – Batekong sepanjang 261,18 Km;
  - ❖ Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) – Sebangau sepanjang 15 Km;
  - ❖ Lanjutan Jl. G. Obos - Bukit Kaki – Pagatan sepanjang 125 Km;
  - ❖ Kereng Bangkirai – Sp. Jl. Cilik Riwut sepanjang 25 Km;
  - ❖ Pelabuhan Bukit Pinang – Kalampangan sepanjang 6,4 Km;
  - ❖ Simpang Sepaku (Nanga Bulik) – Parigi – Pangkut – Rantau Pulut – Kuala Kuayan – Simpang Sei Babi – Tangar – Parenggean – Kalanaman – Buntut Bali – Takaras – Bawan;
  - ❖ Tewah – Tumbang Miri – Tumbang Anoi sepanjang 83 Km;
  - ❖ Simpang Batapah – Tumpang Laung – Muara Teweh;
  - ❖ Kuala Kurun – Linau – Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km;
  - ❖ Simpang Trinsing (Muara Teweh) –Trinsing sepanjang 16 Km;
  - ❖ Tampa – Pinang Tunggal – Jihi sepanjang 40 Km;
  - ❖ **Rikut Jawu (Buntok) – Tabak Kanilan – Simpang Patas sepanjang 41,5 Km;** dan
  - ❖ Simpang Penopa – Tapin Bini sepanjang 28 Km.
  - ❖ Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian sepanjang 56,5 Km;
  - ❖ Palantaran – Parenggean - Tb.Sangai – Tb.Kalang sepanjang 90 Km;
  - ❖ Mendawai – Pagatan sepanjang 39,05 Km;
  - ❖ Sp.Kenawan – Riam Durian – Sukamara sepanjang 112,7 Km;
  - ❖ Pulang Pisau – Pangkoh – Bahaur sepanjang 80 Km;
  - ❖ Kuala Kapuas – Palingkau – Dadahup – Lamunti dan A5 sepanjang 94,7 Km;
  - ❖ Simpang Pundu – Tb.Samba sepanjang 68 Km;

- ❖ Sampit – Samuda sepanjang 35,38 Km;
- ❖ Patung – Hayaping – Bentot sepanjang 34,8 Km;
- ❖ M.Teweh – Sp.Benangin sepanjang 55 Km.

**2) Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan,**  
meliputi:

**Jaringan angkutan sungai dan danau:**

- Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai;
- Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri;
- Sungai Kumai: Pangkalan Banteng - Kumai;
- Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
- Sungai Lamandau: Tapin Bini - N. Belantikan - N. Bulik - Kotawaringin Lama - Mendawai Seberang;
- Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru - Pembuang Hulu - Telaga Pulang Kuala Pembuang;
- Sungai Tualan: Kota Baru (Padas)- Parenggean - Hanjalipan;
- Sungai Mentaya: Tb. Sangai - Kuala Kuayan - Hanjalipan - Kotabesi - Sampit - Bagendang - Samuda;
- Sungai Cempaga: Pantai Harapan - Cempaka Mulia - Kota Besi;
- Sungai Katingan: Bukit Raya – Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb.Senamang – Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai Pagatan;
- Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantanan - Muara Sebangau;
- Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti - Palangkaraya -
- Pulang Pisau – Maluku - Pangkoh – Bahaur;
- Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling – Palangka Raya;

- Sungai Kapuas: Sei Hanyu - Pujon - Timpah - Mantangai - Mandomai - Kuala Kapuas - Lupak Dalam;
- **Sungai Barito: Puruk Cahu - Muara Teweh – Montalat - Buntok – Bangkuang – Mengkatip –**
- Telang Baru - Jenamas – Banjarmasin;
- Anjir Serapat: Banjarmasin – Kapuas;
- Anjir Kelampan: Pulang Pisau - Mandomai;
- Anjir Basarang: Kuala Kapuas - Basarang – Mintin;
- Terusan Raya: Kuala Kapuas – Bahaur; dan
- Terusan Hantipan: Pulau Hanaut – Pagatan.

**3) Jaringan angkutan penyeberangan :**

- Kumai – Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk);
- Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);
- Kumai – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan
- Bahaur – Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).

**4) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian;**

- Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi:
- **Jalur kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung;**
- Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang - Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
- Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit –Kuala Pembuang – Teluk Segintung;
- Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan
- Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.

**5) Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan** yang meliputi Jalur Kereta api dengan:

- Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya – Banjarmasin;
- **Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Muara Teweh – Buntok – Tanjung; dan**

- Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.

**6) Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah,**

meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), **Buntok (Kabupaten Barito Selatan)**, Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

**7) Sistem jaringan transportasi laut;**

Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :

- Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
- Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

**8) Sistem jaringan transportasi udara.**

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:

**a. Rencana sistem jaringan energi,** mencakup;

**1) Pembangkit Tenaga Listrik;**

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, **Kabupaten Barito Selatan**, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas;

- Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau;

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.

**2) Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik,**

meliputi;

- Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik;
- **Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;**
- Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan Puruk Cahu – Muara Juloi;
- Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten Sukamara ke Jepara (Provinsi Jawa Tengah).
- Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah; Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

**3) Gardu Induk ( GI),** terdiri atas ; pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu

- 4) **Depo Bahan Bakar Minyak (BBM)**, mencakup: Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiyang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok
- 5) **Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi**, berupa Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak – Palangka Raya – Banjarmasin

**b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi**, terdiri dari;

- 1) **Sistem Jaringan Backbone**; Jaringan backbone dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut
- 2) **Remote Metro Junction (RMJ)**; Jaringan RMJ dalam bentuk kabel SKSO dan Radio
- 3) **Sistem Jaringan Akses**; Jaringan Akses dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (*Verry Small Aperture Terminal*)

**c. Rencana sistem sumberdaya air**, terdiri atas:

- 1) **Wilayah Sungai (WS)**, mencakup;
  - a) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, meliputi : Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, D DAS Kumai, DAS Jelai; Wilayah Sungai (WS) Barito, terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas;
  - b) Wilayah Sungai Strategis Nasional, yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.
  - c) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi : Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS Segintung; dan Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.
- 2) **Bendung, Bendungan, Embung, Danau dan Situ**, meliputi;
  - a) **Bendung** Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tampa, Talohen, Natampin, Baruh Rintis, Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau, Bendung Tanjung

Harapan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Kabupaten Barito Selatan;

- b) **Bendungan** Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau;
- c) **Embung** Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;
- d) **Danau** Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Selatan, Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- e) **Situ** Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau

### **3) Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak**

Berdasarkan Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015, tentang kriteria dan penetapan status irigasi, Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- **Daerah Irigasi Permukaan (D.I.P)**, mencakup 1 lokasi di wilayah Majundre seluas 365 Ha.
- **Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) :**
  - D.I.R. Desa Babai Seluas 450 Ha
  - D.I.R. Desa Baru Seluas 150 Ha
  - D.I.R. Desa Batilap Seluas 100 Ha
  - D.I.R. Desa Bengkuang Seluas 200 Ha
  - D.I.R. Desa Bintang Kurung Seluas 100 Ha

- D.I.R. Desa Damparan Seluas 700 Ha
- D.I.R. Desa Janggi Seluas 400 Ha
- D.I.R. Desa Jenamas Seluas 500 Ha
- D.I.R. Desa Kalahien Seluas 407 Ha
- D.I.R. Desa Kayumban Seluas 350 Ha
- D.I.R. Desa Keladan-Talio Seluas 400 Ha
- D.I.R. Desa Lehai Seluas 400 Ha
- D.I.R. Desa Lembeng Seluas 386 Ha
- D.I.R. Desa Mabararas Seluas 250 Ha
- D.I.R. Desa Mabuan Seluas 150 Ha
- D.I.R. Desa Mahajandau Seluas 300 Ha
- D.I.R. Desa Mangkatip Seluas 510 Ha
- D.I.R. Desa Mangkatir Seluas 50 Ha
- D.I.R. Desa Marawan Lama Seluas 250 Ha
- D.I.R. Desa Muka Haji Seluas 200 Ha
- D.I.R. Desa Pararapak Seluas 500 Ha
- D.I.R. Desa Penda Asem Seluas 150 Ha
- D.I.R. Desa Rangga Ilung Seluas 100 Ha
- D.I.R. Desa Rantau Bahuang Seluas 200 Ha
- D.I.R. Desa Rantau Kujang Seluas 480 Ha
- D.I.R. Desa Reong Seluas 130 Ha
- D.I.R. Desa Sanggu Seluas 150 Ha
- D.I.R. Desa Simpang Tiga Batampang Seluas 50 Ha
- D.I.R. Desa Sire Seluas 200 Ha
- D.I.R. Desa Tabak Kanilan Seluas 409 Ha
- D.I.R. Desa Talio Seluas 450 Ha
- D.I.R. Desa Tampijak Seluas 200 Ha
- D.I.R. Desa Tanjung Jawa Seluas 329 Ha
- D.I.R. Desa Teluk Betung Seluas 200 Ha
- D.I.R. Desa Teluk Timbau Seluas 580 Ha
- D.I.R. Lelek Seluas 150 Ha
- D.I.R. Marawan Baru Seluas 80 Ha
- D.I.R. Palui Seluas 150 Ha
- D.I.R. Pendang Seluas 250 Ha
- D.I.R. Rubang Seluas 100 Ha

- D.I.R. Tarusan Seluas 200 Ha
  - D.I.R. Teluk Telaga Seluas 300 Ha
- 4) **Pengamanan Pantai**, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km, meliputi:
- Pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Cabang Barat, Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Jelai, Pantai Sei Baru),
  - Pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);
  - Pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau);
  - Pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran),
  - Pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); dan
  - Pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pantai Cemara Labat,
  - Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).
- 5) **Instalasi Pengolahan Air Minum**, mencakup:
- Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi:
  - Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai
  - Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota
- 6) **Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai**, meliputi kegiatan
- Pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.

Adapun **rencana pola ruang provinsi** pada **kawasan budidaya** terdiri atas:

**a. kawasan peruntukan hutan produksi** meliputi:

- 1) Hutan produksi terbatas (HPT) seluas  $\pm 3.335.571$  Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Hutan produksi tetap (HP) seluas  $\pm 3.896.706$  Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas  $\pm 2.258.274$  Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas  $\pm 624.101.04$  Ha yang tersebar pada 377

**b. Non kawasan hutan** seluas  $\pm 2.629.779$  Ha dengan peruntukan sebagai berikut:

**1) Kawasan peruntukan pertanian** meliputi:

- a) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas  $+187.814,65$  Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas  $178.572,86$  Ha dimana
- c) didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas  $\pm 64,001,81$  Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas  $\pm 37,385$  Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
- e) Kawasan Tanah Adat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas  $900.000$  Ha;
- f) Kawasan sepanjang jalan dengan jarak  $2.500$  meter ( $2,5$  Km) sebelah kanan dan  $2.500$  meter ( $2,5$  Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- g) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak  $3.000$  meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.

- 2) **Kawasan Peternakan** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) **Kawasan peruntukan perkebunan** tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) **Kawasan peruntukan perikanan laut** seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) **Kawasan peruntukan industri** terdiri atas:
  - a) Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - b. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
- 6) **Kawasan peruntukan pariwisata** disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.
- 7) **Kawasan peruntukan permukiman** terdiri atas:
  - a) Kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar diseluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b) Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8) **Kawasan peruntukan transmigrasi** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9) **Kawasan peruntukan technopark** perkebunan, *technopark* pertambangan, *technopark* perikanan, *technopark* kehutanan, *technopark* pertanian, *technopark* peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

- 10) **Kawasan peruntukan lainnya**, yaitu:
- Kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan *geostrategic* nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ±65 Ha di Kota Palangka Raya; dan
  - Hutan Monumental seluas ±600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Wilayah Pertambangan dan Energi** terdiri atas:

- Kawasan peruntukan pertambangan** yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
- Kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi** di 14 Kabupaten/Kota.

#### **4.9. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Selatan**

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Selatan, maka dapat dirumuskan **isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Selatan** sebagai berikut :

## **1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah**

Pembangunan daerah merupakan pengembangan setiap lini kehidupan masyarakat yang menyebabkan rasa nyaman, damai, dan sejahtera setiap individu yang tinggal di dalamnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat yang tumbuh dalam rasa kekeluargaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang harus diutamakan pencapaiannya sebagai penyokong pembangunan di bidang lain. Khusus untuk peningkatan jaringan infrastruktur ini, pada tahun 2023-2026 nanti Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menginginkan adanya peningkatan jaringan infrastruktur di wilayah Kecamatan-Kecamatan di luar kota Buntok, karena selama ini, untuk pengembangan dan penataan jaringan infrastruktur di kota buntok dan sekitarnya sementara ini dirasa sudah cukup memadai.

## **2. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja Berdaya Saing**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi.

Memiliki SDM yang berdaya saing tinggi akan menjadikan Kabupaten Barito Selatan siap menghadapi segala tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan segala peluang yang ada. Dengan peningkatan SDM berdaya saing hingga level nasional akan menempatkan kualitas SDM Kabupaten Barito Selatan setara dengan kota-kota di Indonesia. Hal tersebut menjadikan SDM mampu bersaing pada kancah nasional maupun Internasional. Efek lain dari peningkatan kualitas SDM adalah pengembangan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan menjadi lebih maksimal dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal sehingga penyerapan tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Barito Selatan dapat diminimalisir.

Realisasi potensi sumber daya manusia yang telah menjadi tenaga kerja di Kabupaten Barito Selatan masih jauh dari harapan pemerintah daerah. Namun demikian tingkat Pengangguran di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan hasil yang positif dimana pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,9 persen. Dari besaran angka pengangguran ini, yang perlu digaris bawahi adalah kualitas sumber daya manusia yang menjaditenaga kerja baik berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja, maupun buruh/karyawan/ pegawai terindikasi masih memiliki daya saing yang rendah.

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Selatan hanya pernah mengenyam pendidikan hingga SD atau belum lulus SD bahkan ada yang tidak sekolah yakni sebesar 34,23 persen. Sedangkan tenaga kerja yang sekolah hingga perguruan tinggi hanya sebesar 12,27 persen, yakni yang memiliki pendidikan Diploma I/II/III dan jenjang S1/S2/S3.

Peningkatan tenaga kerja dari segi pendidikan dapat menjadi awal jawaban bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga secara otomatis akan meningkatkan daya saing tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berpacu pada pendidikan formal saja dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun tenaga kerja ini, akan tetapi pendidikan non formal seperti keterampilan khusus secara teknis akan memberi poin tersendiri pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **3. Pengelolaan SDA dan LH serta Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Kerentanan Pangan**

Sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah tropis sekaligus memiliki sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Barito Selatan berpotensi meningkatkan daya dukung perkembangan perekonomiannya melalui penggalan sumber daya alam berbasis lingkungan hidup. Eksploitasi setiap sumber daya alam di Kabupaten Barito Selatan dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Optimalisasi investasi memiliki tujuan utama yakni mengembangkan perekonomian daerah dengan berimbang positif pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas wilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur.

### **4. Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh**

*Good governance* didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam *good governance* mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak

hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (*government*), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai aparatur pemerintah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang sehingga peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam pengembangan perekonomian melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup.

Sumber daya hutan yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan daerah perlu diperhatikan keberlanjutannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga perlu dilanjutkan, antara lain: optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan; optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis; perlindungan hutan terhadap kebakaran dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam

penanggulangan kebakaran; pemantapan pengelolaan kawasan konservasi; pengembangan sumber benih dan usaha perbenihan tanaman hutan; pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan efektifitas kawasan konservasi.

## **5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat**

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama yang akan tercapai dengan adanya pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat ialah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat inilah menjadikan segala aspek pembangunan dapat terdongkrak dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah melalui optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah.

Perlu adanya perlakuan khusus bagi Kabupaten Barito Selatan dalam pemerataan hasil pembangunan daerah sebagai sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat. Akses wilayah yang cukup sulit di banyak wilayah menjadikan hambatan tersendiri bagi Kabupaten Barito Selatan untuk berkembang. Hal tersebut tentu saja menjadikan masyarakat tidak leluasa menikmati hasil pembangunan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki di setiap wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki “pekerjaan rumah” yang khusus dalam hal peningkatan aksesibilitas wilayah, baik di internal Kabupaten Barito Selatan, maupun dengan luar daerah Kabupaten Barito Selatan.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disebutkan bahwa :

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2023-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang bertujuan memiliki Visi untuk mewujudkan Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa. Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

#### **5.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.

Secara umum telah dirumuskan sebanyak Enam (Enam) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 15 (Lima Belas) sasaran Pembangunan pada Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Tujuan pertama adalah** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
  - 1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
  - 1.2. Meningkatnya konektivitas wilayah.
- 2) **Tujuan Kedua adalah** “Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
  - 2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
  - 2.2. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.
- 3) **Tujuan Ketiga adalah** “Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat”, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu:
  - 3.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
  - 3.2. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.
  - 3.3. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - 3.4. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.

- 4) **Tujuan Keempat adalah** “Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan yaitu :
  - 4.1. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan.
- 5) **Tujuan Kelima adalah** “Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”, terdiri dari tiga (tiga) sasaran pembangunan yaitu :
  - 5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.
  - 5.2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.
  - 5.3. Meningkatnya pengembangan e-goverment menuju smart city.
- 6) **Tujuan Keenam adalah** “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”, terdiri dari dua (dua) sasaran pembangunan yaitu :
  - 6.1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan.
  - 6.2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - 6.3. Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.

Selanjutnya untuk keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1  
 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2026
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,10
		2. Indeks Gini	indeks	0.286	0.276	0.266	0.256	0.246	0,246
	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	1. Tingkat Inflasi	persen	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
		2. PDRB per Kapita	juta	58,82	59,25	60,14	61,08	61,97	61,97
		3. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Milyar Rupiah	82,8	85,8	87,8	89,8	90,8	90,8
		4. Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Milyar Rupiah	593	611	629	647	665	665
	Meningkatnya konektivitas wilayah	1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	persen	52,22	53,25	54,39	55,58	56,81	56,81
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	48,50	49,42	50,54	51,80	53,15	53,15
		3. Angka kecelakaan lalu lintas	jumlah	119	110	102	92	83	83
		4. Persentase layanan angkutan darat dan sungai	persen	47,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**

RENCANA  
 PERUBAHAN  
 RUPIM



TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	2026
2.	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	72,64	72,90	73,17	73,43	73,70	73,70
	2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
			2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
			3. Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	Indeks	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
			4. Timbunan Sampah yang Ditangani	persen	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
2.2	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	1. Ketaatan terhadap RTRW	Persen	95	96	97	98	99	99	
3.	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat		1. Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,36	5,19	5,01	4,84	4,67	4,67
			2. Persentase Penegakkan Perda	Persen	80	85	90	95	100	100
	3.1	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Permriad (per sepuluh ribu)	5,13	4,92	4,81	4,29	3,69	3,69
			2. Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani	Persen	80	85	90	95	100	100
			3. Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen)	Persen	75	75	75	75	75	75

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**

RENCANA  
 PERUBAHAN  
 RUPIM



TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	2026
	3.2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	1. Tingkat Pengangguran	persen	5,09	5,01	4,93	4,86	4,81	4,81
	3.3	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1. Persentase PMKS yang tertangani	persen	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05	95,05
	3.4	Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi	1. Persentase penduduk berakses air minum / air bersih	persen	37,76	42,76	47,76	52,76	57,76	57,76
			2. Rasio rumah layak huni	persen	19,00	19,01	19,02	19,03	19,04	19,04
			3. Persentase areal kawasan kumuh	persen	0,30	0,23	0,15	0,08	0,00	0,00
			4. Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	83,15	87,15	91,15	94,15	96,15	96,15
			5. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	64,59	66,59	68,59	70,59	72,59	72,59

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**

RENCANA  
 PERUBAHAN  
 RUPIM



TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	2026
4.	Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan		1. Indeks Resiko Bencana	indeks	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40
	4.1	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi	1. Cakupan pelayanan bencana	persen	29,41	47,06	64,71	82,35	100,00	100,00
			2. Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			3. Skor Pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	persen	90	92	95	97	100	100
5.	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif		1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B	B	BB	BB	A	A
	5.1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	1. Opini BPK	kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	indeks	70,23	71,55	72,92	74,35	75,18	75,18
			3. Nilai SAKIP	kriteria	B	BB	BB	BB	BB	BB
			4. Nilai LPPD	kriteria	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
			5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	persen	5,75	6,00	6,50	7,00	7,50	7,50

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**

RENCANA  
 PERUBAHAN  
 RUPIM



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR	
					2023	2024	2025	2026	2026	
		6. Prosentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah	persen	95	96	97	98	99	99	
		7. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6522 (berkembang)	0,6722 (berkembang)	0,6822 (berkembang)	0,6922 (berkembang)	0,7082 (maju)	0,7082 (maju)	
	5.2	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat	Persen	90	92	95	97	100	100	
		2. Jumlah Kajian Kelitbangan	kajian	1	1	1	1	2	2	
	5.3	Meningkatnya pengembangan e-government menuju smart city	indeks	2,20	2,50	2,80	3,00	3,20	3,20	
6.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Pembangunan manusia (IPM)	Persen	70,22	70,30	70,35	70,40	70,50	70,50
	6.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,33	8,41	8,50	8,59	8,59
			2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,14	13,32	13,49	13,67	13,84	13,84
			3. Umur Harapan Hidup	Tahun	67,19	67,29	67,39	67,49	67,59	67,59
			4. Produktivitas Total Daerah	Juta Rupiah	127,43	129,34	131,28	133,24	135,24	135,24
			5. Persentase wirausaha muda	Persen	37,00	41,00	45,00	48,00	51,00	51,00
			6. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	32,20	33,36	34,45	35,58	36,30	36,30

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**

RENCANA  
 PERUBAHAN  
 RUPIM



TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR
						2023	2024	2025	2026	2026
	6.2	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,7	91,80	91,82	91,84	91,86	91,86
	6.3	Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.	1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	16,00
			2. Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	22,56	23,53	25,71	27,78	27,78	27,78

**BAB VI**  
**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN**  
**PROGRAM PRIORITAS**

Setelah tujuan, sasaran dan indikator kinerja RPD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai pada masa periode dokumen perencanaan. Metodologi itulah berupa perumusan strategi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

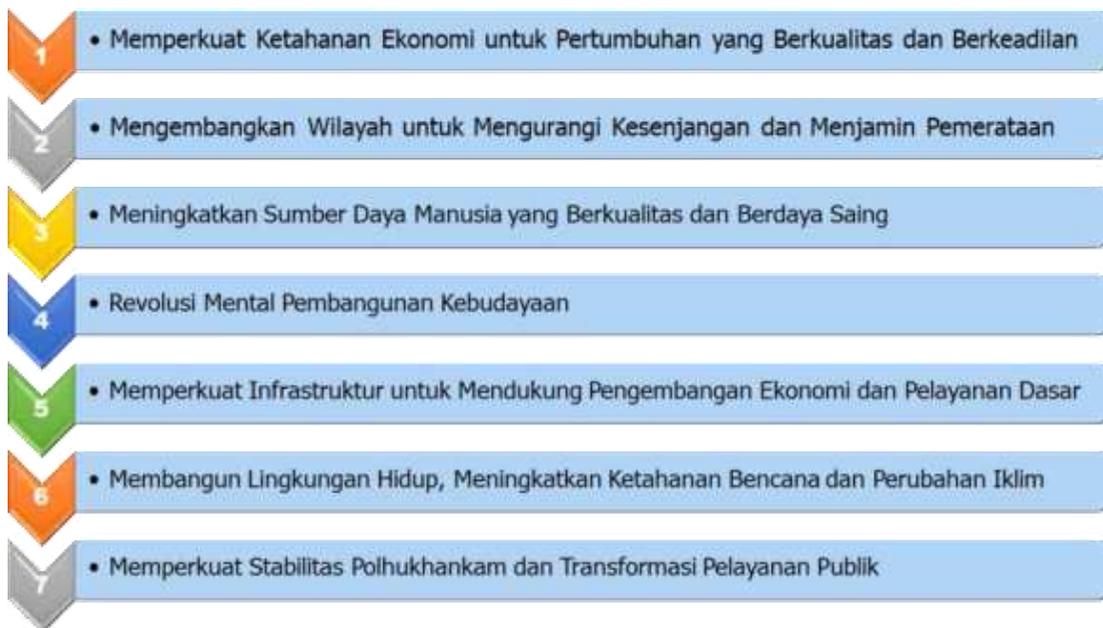
Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi Informasi.

**6.1. Strategi Umum**

Strategi umum pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

**GAMBAR 6.1**

**STRATEGI UMUM RPD KAB. BARSEL 2023-2026**



*Sumber : Tim Penyusun, 2022*

Ketujuh strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, sebagai kelanjutan dari periode pembangunan sebelumnya, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata.

### **1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Hal ini coba dilakukan melalui upaya Mendorong peningkatan UMKM dan pengembang industri yang berbasis 4.0.

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional.

Adapun manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah yakni bagi perekonomian nasional antara lain: Membuka Lapangan Pekerjaan, Menjadi Penyumbang Terbesar Nilai Produk Domestik Bruto, Salah satu Solusi efektif bagi permasalahan Ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Sedangkan manfaat UMKM bagi perekonomian daerah adalah meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, mempererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat sejumlah persoalan yakni UMKM lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia serta teknologi); serta masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antar institusi. Pemerintah telah memberikan upaya-upaya

pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin menguatkan sektor UMKM ini. Namun upaya pemberdayaan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dan membawa daya ungkit (leverage) yang kuat bagi para pelaku UMKM pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Era revolusi industri 4.0 memiliki sisi positif bagi penguatan ekonomi apabila negara siap menghadapinya. Meski demikian, hal ini juga dapat mengancam generasi muda produktif yang tidak inovatif. Secara garis besar, revolusi industri 4.0 membawa gagasan mengenai kekuatan teknologi mutakhir dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “cyber physical system”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya.

## **2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Strategi ini dilakukan melalui upaya Memaksimalkan pembangunan proyek strategis daerah dan nasional. Pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk kategori proyek strategis nasional, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan proyek strategis, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Adapun proyek-proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol; proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol; proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota; proyek kereta api dalam kota; proyek revitalisasi bandara;

pembangunan bandara baru; proyek pembangunan bandara strategis lain; pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas; program satu juta rumah; pembangunan kilang minyak; proyek pipa gas atau terminal LPG; proyek energi asal sampah; proyek penyediaan infrastruktur air minum; proyek penyediaan sistem air limbah komunal; pembangunan tanggul penahan banjir; proyek pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan sarana penunjang; proyek bendungan; program peningkatan jangkauan broadband; proyek infrastruktur IPTEK strategis lainnya; pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus; proyek pariwisata; proyek pembangunan smelter; dan proyek pertanian dan kelautan.

Terdapat dua proyek strategi nasional di yang dilakukan di Kalimantan Tengah yakni pembangunan proyek sarana prasarana Kereta Api Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang. Selain pembangunan sarana prasarana kereta api juga terdapat pengembangan food estate di Kalimantan Tengah. Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024. Tanah yang digunakan untuk food estate adalah eks proyek lahan gambut (PLG). Salah satu alasan pemerintah mengembangkan eks PLG yaitu sebagai perluasan lahan penghasil cadangan pangan nasional.

### 3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Strategi ini dilakukan melalui melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan demi mewujudkan kualitas SDM yang handal dan berdaya saing. Beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yakni : Pertama melalui peningkatan capacity building UMKM. *Capacity building* adalah upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Peningkatan capacity bulding bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: memberikan pelatihanpelatihan kepada lembaga pelaku usaha, dalam meningkatkan kemampuan kredit UMKM, Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM untuk melakukan pelatihan dan akreditasi UMKM, meningkatkan teknologi informasi agar akses informasi lebih mudah, melakukan riset untuk memberikan informasi bagaimana mengembangkan UMKM. Penelitian tersebut disesuaikan dengan daerah

masing-masing. Peningkatkan daya saing UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Upaya kedua yaitu melalui teknologi informasi TI. Teknologi informasi adalah seperangkat untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi secara elektronik. Melalui pemanfaatan TI tersebut UMKM dapat memasuki pasar global. Pemanfaatan TI ini melalui membuka toko virtual dengan menjual produk secara online dengan modal internet atau dikenal dengan e-commerce bagi pemangku usaha dapat melakukan jual beli secara mudah. Mulai dari proses pemesanan melalui perangkat lunak, melakukan transaksi menjadi lebih cepat dan hemat tanpa harus membuka toko atau gudang penyimpanan. Dengan begitu biaya transaksi juga bisa diturunkan. Manfaat E-commerce bagi pemangku usaha, yaitu:

- Dengan adanya e-commerce pelaku UMKM dapat menjual produk kepada konsumen lebih menyeluruh dibandingkan harus mempunyai toko secara offline. Dikarenakan mereka memiliki toko online sehingga semua orang bisa mengakses toko tersebut di mana saja dan kapan saja.
- Dengan adanya e-commerce perusahaan tidak perlu membuka toko offline.
- Biaya pengiriman informasi ke pelanggan lebih efektif tanpa harus menyampaikan informasi melalui jasa paket.

#### **4. Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan**

Strategi ini dilakukan melalui upaya Pengembangan sektor Sosial Budaya dan Pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas.

Pengembangan Pariwisata yang baik dapat menjadi daya tarik untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisata tersebut. Hal ini juga berdampak berupa keuntungan bagi masyarakat daerah. Dari hasil transaksi wisatawan dapat mengangkat dan mengembangkan taraf hidup masyarakat dan negara dari devisa wisatawan asing yang menukarkan mata uangnya dengan Rupiah. Kedepannya apabila pariwisata Indonesia dikelola lebih baik maka akan menjadi aset Negara dalam pertumbuhan ekonomi.

Pulau Kalimantan merupakan pulau yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan keberagaman budaya serta berbagai suku. Pengelolaan

industri pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan memanfaatkan keaneka ragaman adat budaya secara arif dan bijaksana dalam rangka proses pembangunan yang berkelanjutan. Wilayah Kalimantan Tengah didominasi oleh hutan hujan tropis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan di wilayah ini, hal tersebut dikarenakan terdapat banyak fauna dan flora yang khas seperti orang utan dan anggrek. Selain keindahan alam, Kalimantan Tengah juga terkenal dengan wisata budaya dan kuliner. Kebudayaan khas Kalimantan Tengah seperti masyarakat adat dayak lengkap dengan rumah betang tentu menjadi sebuah daya tarik sendiri untuk dikunjungi.

#### **5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Oleh karena itu, strategi ini dilaksanakan melalui upaya Peningkatan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan.

Untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah Indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta melalui skema regular maupun Multy Years Contract baik bersumber dari APBD maupun dari KPBU, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur juga memiliki

pengaruh penting dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja.

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan, jembatan, perhubungan, energi penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktifitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.

Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Suksesnya peningkatan aksesibilitas sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi, baik daerah, nasional, maupun internasional.

Sifat dan jenis infrastruktur yang diperlukan suatu daerah dipengaruhi oleh karakteristik alam dan pola persebaran penduduk yang khas pada daerah tersebut. Infrastruktur bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing demi mendorong lebih banyak kegiatan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan. Selain itu, keberadaan infrastruktur juga sangat diperlukan agar proses pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Proses pembangunan yang disertai dengan perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya pendekatan yang benar-benar tepat dalam program pengembangan SDM. Khusus untuk peningkatan jaringan infrastruktur ini, diharapkan adanya peningkatan jaringan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kota Buntok, karena selama ini, untuk pengembangan dan penataan jaringan infrastruktur di kota Buntok dan sekitarnya sementara ini dirasa sudah cukup memadai. Terkait dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, direncanakan peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan di Barito Selatan antara lain adalah :

- a. Sistem jaringan transportasi darat meliputi:
  - 1) Jaringan jalan meliputi:
    - (a) jaringan jalan strategis nasional yang berstatus jalan nasional yaitu ruas jalan Kalahien – Buntok – Ampah sepanjang 66,84 (enam puluh enam koma delapan puluh empat) kilometer.

- (b) jaringan jalan kolektor K1 yang berstatus jalan nasional ruas jalan Ugang Sayu – Rampa Mea sepanjang 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) kilometer;
- (c) jaringan jalan kolektor K2 yang berstatus jalan Provinsi terdiri dari : 1. ruas jalan Merdeka Raya sepanjang 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) kilometer; 2. ruas jalan Tugu sepanjang sepanjang 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) kilometer; 3. ruas jalan Jelapat sepanjang 1,21 (satu koma dua puluh satu) kilometer.
- (d) jaringan jalan lokal primer yang berstatus jalan Kabupaten terdiri dari :
  - (1) Ruas jalan Simpang Rikut Jawu – Tabak Kanilan – HPH Km. 20–Sei Paken sepanjang 49,70 (*empat puluh sembilan koma tujuh puluh*) kilometer;
  - (2) Ruas jalan MTU – Bangkuang – Teluk Timbau – Damparan Lehai - Mangkatir – Kalanis –Adaro - Rantau Kujang sepanjang 56,61 (lima puluh enam koma enam puluh satu kilometer);
  - (3) Ruas jalan Pendang – jalan strategis nasional sepanjang 22,97 ( *dua puluh dua koma sembilan puluh tujuh*) kilometer;
  - (4) Ruas jalan Bangkuang (Barito Selatan) – Telang (Barito Timur) sepanjang 6,00 ( *enam*) kilometer;
  - (5) Ruas jalanAsam– jalan strategis nasional sepanjang 11 (*sebelas*) kilometer;
  - (6) Ruas jalan Pararapak– jalan strategis nasional sepanjang 1,07 (*satu koma tujuh*) kilometer;
  - (7) Ruas jalan Mabuan – Kalahien sepanjang 4,03 (*empat koma tiga*) kilometer;
  - (8) Ruas jalan Sababilah – Danau Ganting– Keladan sepanjang 15,56 (*lima belas koma lima puluh enam*) kilometer;
  - (9) Ruas jalan Ugang Sayu – Dangka sepanjang 16,95 (*enam belas koma Sembilan puluh lima*) kilometer;
  - (10) Ruas jalan Pamangka – jalan strategis nasional sepanjang 3,58 (*tiga koma lima puluh delapan*) kilometer;
  - (11) Ruas jalan Gunung Rantau – Talekoi – Bundar – HPH KM. 20 sepanjang 30,44 (*tiga puluh koma empat puluh empat*) kilometer;
  - (12) Ruas jalan Tabak Kanilan –Muka Haji– Sire sepanjang 2,69 (*dua koma enam puluh Sembilan*) kilometer;
  - (13) Ruas jalan Tabak Kanilan – Kayumban sepanjang 3,69 (*tiga koma enam puluh Sembilan*) kilometer;
  - (14) Ruas jalan Dangka – Baruang sepanjang 15,09 (*lima belas koma Sembilan*) kilometer;
  - (15) Ruas jalan Sarimbuah – Gagutur sepanjang 5,46 (*lima koma empat puluh enam*) kilometer;

- (16) Ruas jalan Sanggu – Majundre – Sei Telang sepanjang 24,34(*dua puluh empat koma tiga puluh tiga*) kilometer;
- (17) Ruas jalan eks HPH KM.30 Rampa Mea – Hulu Tampang – Gunung Rantau sepanjang 35,12(*tiga puluh lima koma dua belas*) kilometer;
- (18) Ruas jalan Rantau Kujang – Rantau Bahuang – Paminggir sepanjang 25 (*dua puluh lima*) kilometer;
- (19) Ruas jalan mengkatip – Mahajandau – Sungai Jaya – Bukota – dadahup sepanjang 45 (*empat puluh lima*) kilometer;
- (20) Ruas Batampang – Batilap – Muara Puning sepanjang 15 (*lima belas*) kilometer;
- (21) Ruas Tampijak – Babai – Teluk Betung – Batilap 25 (*dua puluh lima*) kilometer.

## **6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Strategi ini dilakukan melalui upaya Pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang.
- Tidak melampaui daya dukung lingkungan (ekosistem).
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyelaraskan kebutuhan manusia dan kemampuan mengolah dengan ketersediaan sumber daya alam.

Sumber daya alam dapat berkelanjutan jika sumber daya alam yang dikelola tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak tergolong pada sumber daya yang berkelanjutan karena pada periode tertentu sumber daya tersebut akan habis. Sumber daya alam yang akan habis hanya dapat dihemat dalam penggunaannya sehingga dapat memperpanjang umur kegunaan dari sumber

daya tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan pertimbangannya tidak hanya pada aspek ekonomi dan kesejahteraan petani, melainkan mencakup kelestarian sumber daya alam dan hubungannya dengan lingkungan yang terdapat di sekitarnya.

## **7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Strategi ini dilakukan melalui kebijakan Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik, serta Reformasi Birokrasi di semua lini. Barang milik daerah memerlukan pengelolaan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, ruang lingkup pengelolaan BMN/D adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan infrastruktur), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Mewujudkan pembangunan bangsa sesuai dengan cita-cita proklamasi.
- Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan laporan.
- Memperbaiki kinerja organisasi sesuai dengan tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi, menyelaraskan dengan kebutuhan strategis yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

## 6.2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang akan dicapai. Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

**TABEL 6.1**  
**PENJABARAN TUJUAN DAN SASARAN KE STRATEGI**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
1		2		3
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan</li> <li>• Peningkatan penggunaan teknologi industri</li> <li>• Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri</li> <li>• Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri</li> <li>• Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan</li> <li>• Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal)</li> <li>• Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM</li> <li>• Pengembangan destinasi dan promosi wisata</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata</li> <li>• Peningkatan Akselerasi dan integrasi industri kepariwisataan</li> <li>• Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif</li> <li>• Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi</li> <li>• Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi</li> </ul>
		1.2	Meningkatnya konektivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah</li> </ul>
2.	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kerjasama dengan semua pihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan</li> <li>• Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ul>
		2.2	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW</li> </ul>
3.	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	3.1	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat lokal</li> <li>• Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.</li> </ul>

1	2	3	
	3.2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu</li> <li>• Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan</li> <li>• Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa</li> <li>• Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa</li> </ul>	
	3.3	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial</li> <li>• Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS</li> </ul>	
	3.4	Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum</li> <li>• Pembangunan infrastruktur sanitasi</li> <li>• Pengembangan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni</li> </ul>	
4.	Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan	4.1	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Early Warning System, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana dan pandemi</li> <li>• Peningkatan Ketahanan Daerah menghadapi Bencana dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</li> </ul>
5.	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	5.1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> <li>• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat</li> <li>• Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</li> <li>• Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</li> <li>• Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan.</li> <li>• Fokus pencapaian indikator SPM bagi PD yang memiliki SPM.</li> </ul>
		5.2	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah</li> <li>• Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date melalui Pelayanan Informasi.</li> <li>• Peningkatan penanganan Complaint Handling System.</li> <li>• Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel</li> </ul>
		5.3	Meningkatnya pengembangan e-government menuju smart city <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pengembangan e-government menuju smart city</li> </ul>

1	2	3
6.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	6.1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan status kesehatan keluarga</li> <li>• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan</li> <li>• Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita</li> <li>• Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas</li> <li>• Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan</li> <li>• Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.</li> <li>• Peningkatan RSUD Rujukan</li> <li>• Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar</li> <li>• Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan</li> <li>• Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan</li> <li>• Peningkatan rata-rata lama sekolah</li> <li>• Peningkatan kualitas , kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>• Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja</li> <li>• Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif</li> </ul>
	6.2	Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengarusutamaan gender</li> <li>• Peningkatan kualitas hidup perempuan</li> </ul>
	6.3	Meningkatkan kemajuan pembangunan kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal.</li> </ul>

### 6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Arah kebijakan RPD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran dalam RPD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

### 6.3.1. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026 sebagai berikut :

**GAMBAR 6. 2**



Sumber : Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan gambar 6.2, dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

- 1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2023 :  
***“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.***
- 1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 :  
***“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yg kondusif, disertai dgn pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.***
- 1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 :  
***“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”.***
- 1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2026 :  
***“Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup menuju Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus”.***

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

#### **7.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai Tahun 2021 telah menerapkan prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### **7.2. Program Perangkat Daerah**

Program pembangunan daerah, diterjemahkan dalam masing-masing program setiap perangkat daerah (PD). Pelaksanaan program-program masing-masing PD bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pada bagian ini disajikan semua program-program masing-masing PD disertai dengan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program perangkat daerah dibuat untuk masa periode pelaksanaan RPD bagi masing-masing PD. Untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai, maka program perangkat daerah dilengkapi dengan target indikator kinerja.

Program perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum. Program-program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut terdiri dari:

1. **Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, yakni:
  - 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - 5) Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - 6) Urusan pemerintahan bidang sosial.
2. **Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, yakni:
  - 1) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  - 2) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 3) Urusan pemerintahan bidang pangan;
  - 4) Urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  - 5) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - 6) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 7) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - 8) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 9) Urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - 10) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

- 11) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 13) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
- 14) Urusan pemerintahan bidang statistik;
- 15) Urusan pemerintahan bidang persandian;
- 16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- 17) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- 18) Urusan pemerintahan bidang kearsipan.

**3. Urusan Pilihan, yakni:**

- 1) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 3) Urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 4) Urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- 5) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- 6) Urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- 7) Urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- 8) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

**4. Unsur pendukung Urusan Pemerintahan, yakni:**

- a. Unsur Sekretariat Daerah
- b. Unsur Sekretariat DPRD

**5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, yakni :**

- a. Unsur perencanaan;
- b. Unsur keuangan;
- c. Unsur kepegawaian;
- d. Unsur pendidikan dan pelatihan;
- e. Unsur penelitian dan pengembangan.

**6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan, yaitu Inspektorat.**

**7. Unsur kewilayahan, yaitu Kecamatan.**

**8. Unsur pemerintahan umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.**

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sesuai Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, meliputi:

**1. Dinas Daerah Kabupaten**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 7) Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Dinas Perhubungan;
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 16) Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

**2. Badan Daerah dan Kesatuan Kabupaten**, terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**3. Sekretariat Daerah**, terdiri dari:

- 1) Bagian Pemerintahan
- 2) Bagian Hukum
- 3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
- 4) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 5) Bagian Administrasi Pembangunan
- 6) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- 7) Bagian Organisasi
- 8) Bagian Umum
- 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Publik

**4. Sekretariat DPRD**

**5. Inspektorat**

**6. RSUD Jaraga Samameh**

**7. Kecamatan,** terdiri dari :

- 1) Kecamatan Dusun Selatan
- 2) Kecamatan Jenamas
- 3) Kecamatan Dusun Hilir
- 4) Kecamatan Karau Kuala
- 5) Kecamatan Dusun Utara
- 6) Kecamatan Gunung Bintang Awai

Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh PD, disamping untuk mendukung tujuan dan sasaran daerah secara langsung juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang antara lain dimaksudkan sebagai fungsi pelayanan PD kepada masyarakat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari tujuan dan sasaran Renstra PD, namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



**Tabel 7.1**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>														
1	<b>Urusan pemerintahan bidang pendidikan</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	201.896.709.232	100%	201.896.709.232	100%	201.896.709.232	100%	201.896.709.232	100%	201.896.709.232	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan SPM pendidikan	100%	100%	64.647.569.830	100%	64.647.569.830	100%	64.647.569.830	100%	64.647.569.830	100%	64.647.569.830	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum yang dikembangkan	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Guru yang Tersedianya di Satuan Pendidikan	78%	80%	0	82%	0	85%	0	90%	0	90%	0	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Perizinan Pendidikan yang dikendalikan	100%	100%	59.929.900	100%	59.929.900	100%	59.929.900	100%	59.929.900	100%	59.929.900	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito selatan
2	<b>Urusan pemerintahan bidang kesehatan</b>													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	90%	100%	116.453.281.368	100%	116.453.281.368	100%	116.453.281.368	100%	116.453.281.368	100%	116.453.281.368	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Layanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76%	80%	55.587.769.287	90%	55.587.769.287	100%	55.587.769.287	100%	55.587.769.287	100%	55.587.769.287	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase capaian SDM Kesehatan yang memenuhi Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80%	90%	3.162.000.000	95%	3.162.000.000	100%	3.162.000.000	100%	3.162.000.000	100%	3.162.000.000	Dinas Kesehatan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minumana	Persentase Pelaksanaan Persediaan Farmasi, alkes dan makanan minuman	60%	70%	343.596.000	80%	343.596.000	90%	343.596.000	100%	343.596.000	100%	343.596.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	80%	90%	854.571.667	100%	854.571.667	100%	854.571.667	100%	854.571.667	100%	854.571.667	Dinas Kesehatan
<b>3</b>	<b>Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>													
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	34,67%	36,60%	72.948.273.000	37,57%	72.948.273.000	38,53%	72.948.273.000	39,50%	72.948.273.000	39,50%	72.948.273.000	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarpras persampahan (sarpras yang sudah terbangun/kebutuhan sarpras di daerah)	60%	70%	1.315.000.000	80%	1.315.000.000	90%	1.315.000.000	100%	1.315.000.000	100%	1.315.000.000	DINAS PUPR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang telah ber-IMB	1,20%	1,50%	9.729.230.000	1,80%	9.729.230.000	2,10%	9.729.230.000	2,40%	9.729.230.000	2,40%	9.729.230.000	DINAS PUPR
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan sesuai dengan RTBL (rencana tata bangunan dan lingkungan)	1,00%	1,25%	3.064.925.000	1,50%	3.064.925.000	1,75%	3.064.925.000	2,00%	3.064.925.000	2,00%	3.064.925.000	DINAS PUPR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan RTRW	20%	25%	940.000.000	50%	940.000.000	75%	940.000.000	100%	940.000.000	100%	940.000.000	DINAS PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)	50,35%	51,35%	11.985.671.800	52,35%	11.985.671.800	53,35%	11.985.671.800	54,35%	11.985.671.800	54,35%	11.985.671.800	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan strategis yang memiliki infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	1,00%	1,25%	3.823.800.000	1,50%	3.823.800.000	1,75%	3.823.800.000	2,00%	3.823.800.000	2,00%	3.823.800.000	DINAS PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak (%)	64,73%	65,73%	5.887.655.500	66,73%	5.887.655.500	67,73%	5.887.655.500	68,73%	5.887.655.500	68,73%	5.887.655.500	DINAS PUPR

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	34,49%	35,17%	14.212.418.700	35,87%	14.212.418.700	36,58%	14.212.418.700	37,31%	14.212.418.700	37,31%	14.212.418.700	DINAS PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	50%	70%	2.750.000.000	80%	2.750.000.000	90%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	DINAS PUPR
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	13.594.233.300	100%	13.594.233.300	100%	13.594.233.300	100%	13.594.233.300	100%	13.594.233.300	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha/masyarakat yang mendapatkan sertifikat keahlian	20%	25%	1.114.200.000	50%	1.114.200.000	75%	1.114.200.000	100%	1.114.200.000	100%	1.114.200.000	DINAS PUPR
4	<b>Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman</b>													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	6.543.738.731	100%	6.543.738.731	100%	6.543.738.731	100%	6.543.738.731	100%	6.543.738.731	DINAS PERKIMTAN
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warganegara korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warganegara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	100%	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	0,40%	0,53%	200.000.000	0,67%	200.000.000	0,80%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya jumlah status permukiman kumuh	Kriteria : Kumuh Sedang (38 sd 59)	Kriteria : Kumuh Sedang (38 sd 59)	20.000.000	Kriteria : Kumuh Ringan (16 sd 37)	20.000.000	Kriteria : Kumuh Ringan (16 sd 37)	20.000.000	Kriteria : Tidak Kumuh (< 16)	20.000.000	Kriteria : Tidak Kumuh (< 16)	20.000.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0,50%	0,60%	340.000.000	0,70%	340.000.000	0,80%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	DINAS PERKIMTAN
5	<b>Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>													

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	97%	1.542.559.200	100%	1.542.559.200	100%	1.542.559.200	100%	1.542.559.200	100%	1.542.559.200	SATPOL PP DAN DAMKAR
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan Respon cepat (Respon Time) Penanggulangan Kejadia Kebakaran	100%	92%	1.533.390.750	100%	1.533.390.750	100%	1.533.390.750	100%	1.533.390.750	100%	1.533.390.750	SATPOL PP DAN DAMKAR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	6.640.428.309	100%	6.640.428.309	100%	6.640.428.309	100%	6.640.428.309	100%	6.640.428.309	SATPOL PP DAN DAMKAR
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Penanganan Pra Bencana. 2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana. 3. Persentase Penyaluran logistik dan Peralatan. 4. Persentase pendampingan penanganan pasca bencana. 5. Terselenggaranya SDM terampil. 6. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	100%	100%	594.859.750	100%	594.859.750	100%	594.859.750	100%	594.859.750	100%	594.859.750	BPBD
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Persentase Penanganan Pra Bencana 2. Persentase SDM Terampil Penanggulangan Bencana 3. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	100%	100%	354.917.850	100%	354.917.850	100%	354.917.850	100%	354.917.850	100%	354.917.850	BPBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.527.617.197	100%	3.527.617.197	100%	3.527.617.197	100%	3.527.617.197	100%	3.527.617.197	BPBD
6	<b>Urusan pemerintahan bidang sosial</b>													
	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PMKS yang Meningkatkan Kemampuannya	75%	80%	51.500.000	85%	51.500.000	90%	51.500.000	95%	51.500.000	95%	51.500.000	DINSOSPMD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	28%	25%	202.900.000	25%	202.900.000	26%	202.900.000	26%	202.900.000	26%	202.900.000	DINSOSPMD
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (KPM)	75%	80%	218.400.000	85%	218.400.000	90%	218.400.000	95%	218.400.000	95%	218.400.000	DINSOSPMD
	Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana yang ditangani	43%	62%	218.000.000	65%	218.000.000	69%	218.000.000	73%	218.000.000	73%	218.000.000	DINSOSPMD
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase Taman Makam yang dipelihara	80%	84%	70.200.000	90%	70.200.000	95%	70.200.000	98%	70.200.000	98%	70.200.000	DINSOSPMD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	84%	97%	6.096.071.350	98%	6.096.071.350	99%	6.096.071.350	100%	6.096.071.350	100%	6.096.071.350	DINSOSPMD
<b>Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>														
7	<b>Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja</b>													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.648.175.456	100%	3.798.175.456	100%	3.798.175.456	100%	3.798.175.456	100%	3.798.175.456	DINAS NAKERTRANS
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Indeks Kesempatan Tenaga Kerja	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DINAS NAKERTRANS
	Program Hubungan Industrial	Indeks Hubungan Industrial	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	DINAS NAKERTRANS
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Indeks Perencanaan Tenaga Kerja	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	DINAS NAKERTRANS
8	<b>Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>													
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.613.488.086	100%	4.613.488.086	100%	4.613.488.086	100%	4.613.488.086	100%	4.613.488.086	DPPKBP3A
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan/Memiliki Focal Point PUG	0,00%	24,39%	40.204.000	48,78%	40.204.000	73,17%	40.204.000	100,00%	40.204.000	100,00%	40.204.000	DPPKBP3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	DPPKBP3A

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Persentase Pelatihan Usaha Perempuan (Orang)	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	DPPKBP3A
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	DPPKBP3A
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Point KLA	600 (Madya)	700 (Hindya)	15.000.000	800 (Utama)	15.000.000	900 (Utama)	15.000.000	1000 (Utama)	15.000.000	1000 (Utama)	15.000.000	DPPKBP3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pelayanan Kasus Tindak Kekerasan Anak (%)	100%	100%	144.973.400	100%	144.973.400	100%	144.973.400	100%	144.973.400	100%	144.973.400	DPPKBP3A
9	<b>Urusan pemerintahan bidang pangan</b>													
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kontribusi penguatan cadangan pangan (%)	100%	22%	183.000.000	24%	183.000.000	26%	183.000.000	28%	183.000.000	100%	183.000.000	DKPPP
		Skor pangan harapan (PPH) ketersediaan (%)	98%	23%		24%		25%		26%		26%		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan (%)	100%	17%	146.000.000	22%	146.000.000	28%	146.000.000	33%	146.000.000	100%	146.000.000	DKPPP
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	100%	20%	25.000.000	24%	25.000.000	26%	25.000.000	30%	25.000.000	100%	25.000.000	DKPPP
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase terlaksananya program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100%	100%	42.600.000	100%	42.600.000	100%	42.600.000	100%	42.600.000	100%	42.600.000	DKPPP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	17.349.118.314	100%	17.003.518.314	100%	17.178.418.314	100%	17.146.418.314	100%	17.146.418.314	DKPPP
10	<b>Urusan pemerintahan bidang pertanian</b>													

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Garapan	100%	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase pengelolaan izin membuka tanah yang terlayani	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Penatagunaan Tanah	persentase kesesuaian penatagunaan tanah terhadap RTRW	100%	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (oke)	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	0%	5.000.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (oke)	0%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan	persentase ketepatan waktu pertimbangan teknis survei, pengukuran dan pemetaan (oke)	0%	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	DINAS PERKIMTAN
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	persentase kondisi pertanahan yang terinput dalam sistem informasi pertanahan (oke)	0%	100%	2.514.710	100%	2.514.710	100%	2.514.710	100%	2.514.710	100%	2.514.710	DINAS PERKIMTAN
	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	persentase jumlah penanganan konflik pertanahan (oke)	0%	100%	20.900.000	100%	20.900.000	100%	20.900.000	100%	20.900.000	100%	20.900.000	DINAS PERKIMTAN
11	<b>Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup</b>													
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah perencanaan lingkungan hidup yang terlaksana	100%	25%	400.000.000	25%	-	25%	-	25%	200.000.000	100%	200.000.000	DLH

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencemaran yang dapat ditanggulangi (jumlah penanggulangan yang dilakukan/jumlah kasus pencemaran yang terjadi)	100%	100%	306.000.000	100%	306.000.000	100%	306.000.000	100%	286.000.000	100%	286.000.000	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase kehati yang terpelihara	100%	22,86%	80.000.000	20,00%	-	21,43%	-	35,71%	-	100%	-	DLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan limbah B3	80%	73,20%	50.000.000	74,66%	50.000.000	76,16%	50.000.000	77,68%	50.000.000	100%	50.000.000	DLH
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	20,27%	22,97%	120.000.000	25,68%	120.000.000	28,38%	120.000.000	31,08%	120.000.000	100%	120.000.000	DLH
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase jumlah MHA, kearifan lokal yang telah ditetapkan	100%	25,00%	40.000.000	25,00%	40.000.000	25,00%	40.000.000	25,00%	40.000.000	100%	40.000.000	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang peduli lingkungan hidup	100%	25%	80.000.000	25%	80.000.000	25%	80.000.000	25%	80.000.000	100%	80.000.000	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan terhadap pengelola lingkungan hidup	100%	25,00%	20.000.000	25%	20.000.000	25,00%	20.000.000	25,00%	20.000.000	100%	20.000.000	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup (%)	100%	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	DLH
	Program Pengelolaan Persampahan	Ketepatan waktu angkut sampah dari TPS ke TPA	100%	91,32%	3.599.072.464	92,24%	3.599.072.464	93,15%	3.599.072.464	95,89%	3.539.072.464	100%	3.514.072.464	DLH

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA	76,09%	74,59%		73,85%		73,12%		73,12%		100%		DLH
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	62,93	63,56	5.125.757.536	64,19	5.125.757.536	64,84	5.125.757.536	65,49	5.125.757.536	100%	5.125.757.536	DLH
12	<b>Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>													
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	98,98%	100%	113.448.820	100%	113.448.820	100%	113.448.820	100%	113.448.820	100%	113.448.820	DUKCAPIL
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan atas pelaporan peristiwa penting	77,01%	95%	166.159.740	95%	166.159.740	100%	166.159.740	100%	166.159.740	100%	166.159.740	DUKCAPIL
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase akurasi database dan informasi kependudukan untuk kepentingan lembaga/ dinas/instansi pengguna data	0%	15%	82.884.780	20%	82.884.780	25%	82.884.780	40%	82.884.780	40%	82.884.780	DUKCAPIL
	Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan buku data dan profil kependudukan	Ada	Ada	21.266.000	Ada	21.266.000	Ada	21.266.000	Ada	21.266.000	Ada	21.266.000	DUKCAPIL
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.234.586.717	100%	4.234.586.717	100%	4.234.586.717	100%	4.234.586.717	100%	4.234.586.717	DUKCAPIL
13	<b>Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa</b>													
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kecamatan dan lembaga adat yang aktif	63%	54%	368.160.000	58%	368.160.000	62%	368.160.000	66%	368.160.000	66%	368.160.000	DINSOSPMD
	Program Penataan Desa	Prosentase Desa Berkembang	80%	75%	898.102.488	77%	898.102.488	79%	898.102.488	83%	898.102.488	83%	898.102.488	DINSOSPMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Aparatur Desa Terlatih	63%	58%	58.734.802.200	62%	58.734.802.200	66%	58.734.802.200	69%	58.734.802.200	69%	58.734.802.200	DINSOSPMD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa yang Bekerjasama ( Mou, Perjanjian Kerjasama )	23%	20%	25.000.000	22%	25.000.000	23%	25.000.000	25%	25.000.000	25%	25.000.000	DINSOSPMD
14	<b>Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>													

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR)	2,41	2,21	167.125.000	2,15	167.125.000	2,1	167.125.000	2,05	167.125.000	2,05	167.125.000	DPPKBP3A
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	13,84%	12,50%	1.335.915.000	11,50%	1.335.915.000	11,00%	1.335.915.000	10,00%	1.335.915.000	10,00%	1.335.915.000	DPPKBP3A
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Poktan Yang dibina dan Aktif	66,98%	71,00%	741.480.000	76,00%	741.480.000	83,00%	741.480.000	85,00%	741.480.000	85,00%	741.480.000	DPPKBP3A
15	<b>Urusan pemerintahan bidang perhubungan</b>													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase rambu-rambu jalan, marka jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik	37%	46%	1.825.000.000	46%	1.060.000.000	46%	1.143.200.000	100%	998.500.000	100%	998.500.000	DISHUB
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase rambu keselamatan alur sungai dalam kondisi baik	30%	46%	1.440.000.000	46%	1.750.000.000	46%	1.660.000.000	100%	1.985.000.000	100%	1.985.000.000	DISHUB
		Persentase dermaga/tambat perahu dalam kondisi baik	17%	25%		55%		75%		100%		100%		DISHUB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	8.166.321.912	100%	8.621.321.912	100%	8.628.121.912	100%	8.447.821.912	100%	8.447.821.912	DISHUB
16	<b>Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika</b>													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.710.294.890	100%	3.710.294.890	100%	3.710.294.890	100%	3.710.294.890	100%	3.710.294.890	KOMINFO
	Program Aplikasi dan Informatika	Persentase Perangkat daerah yang mengimplemtasikan/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai Masterplan	20%	25%	555.000.000	50%	475.000.000	75%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	KOMINFO
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	4.000 Dokumen/ Tayang	4.000 Dokumen/ Tayang	1.492.000.000	4.000 Dokumen/ Tayang	1.492.000.000	4.000 Dokumen/ Tayang	1.492.000.000	4.000 Dokumen/ Tayang	1.492.000.000	4.000 Dokumen/ Tayang	1.492.000.000	KOMINFO
17	<b>Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah</b>													

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USPKop/ KJKS) (Unit)	37 Koperasi (KSP/USP.Kop /KJKS) selama 4 tahun	7 Koperasi (KSP/USP.Kop /KJKS) (19%)		8 Koperasi (KSP/USP.Kop /KJKS) (22%)		9 Koperasi (KSP/USP.Kop /KJKS) (24,3%)		13 Koperasi (KSP/USP.Kop /KJKS) (35%)		13 Koperasi (KSP/USP.Kop /KJKS) (35%)		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	64 Koperasi Aktif selama 4 tahun  Total jumlah koperasi yg diinginkan melaksanakan RAT selama 4 tahun	13 Koperasi/20 %	36.999.640,00	14 Koperasi/22 %	36.999.640,00	17 Koperasi/27 %	36.999.640,00	20 Koperasi/31 %	36.999.640,00	20 Koperasi/31 %	36.999.640,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase Koperasi yang melaksanakan RAT	64 Koperasi yang melaksanakan RAT selama 4 Tahun  Total jumlah koperasi yg diinginkan melaksanakan RAT selama 4 tahun	13 Koperasi/20 %	10.016.800,00	13 Koperasi/20 %	10.016.800,00	14 Koperasi/22 %	10.016.800,00	24 Koperasi/37,5 %	10.016.800,00	24 Koperasi/37,5 %	10.016.800,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM Koperasi dan UMKM yang bersertifikat	75 Koperasi Bersertifikat	15 Koperasi/20 %	49.999.800,00	15 Koperasi/20 %	49.999.800,00	15 Koperasi/20 %	49.999.800,00	30 Koperasi/40 %	49.999.800,00	30 Koperasi/40 %	49.999.800,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Jumlah SDM koperasi dan UKM 150 yg bersertifikat selama 4 tahun yg diinginkan	30 Org Koperasi/20 %		30 Koperasi/20 %		30 Koperasi/20 %		60 Koperasi/40 %		60 Koperasi/40 %		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	15 Koperasi Persentase kenaikan omzet	3 Koperasi/20 %	67.999.880,00	4 Koperasi/20 %	67.999.880,00	4 Koperasi/27 %	67.999.880,00	5 Koperasi/33 %	67.999.880,00	5 Koperasi/33 %	67.999.880,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang aktif	9237 UMKM Jumlah UMKM aktif yg diinginkan selama 4 tahun	1575 UMKM / 17%	72.499.660,00	1620 UMKM / 18%	72.499.660,00	2550 UMKM / 28%	72.499.660,00	3492 UMKM / 38%	72.499.660,00	3492 UMKM / 38%	72.499.660,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan (UMKM)	Persentase Usaha Mikro (dari mikro ke kecil) (Kecil ke menengah ) Jumlah usaha kecil yang diinginkan yg meningkat dari usaha mikro	10 UMKM	2 UMKM / 20 %	49.999.920,00	2 UMKM / 20 %	49.999.920,00	3 UMKM / 30 %	49.999.920,00	3 UMKM / 30 %	49.999.920,00	3 UMKM / 30 %	49.999.920,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
18	<b>Urusan pemerintahan bidang penanaman modal</b>													
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan terkait penanaman modal yang terlaksana	34%	58%	320.000.000	75%	320.000.000	92%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	320.000.000	DINAS PMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal yang terfasilitasi	40%	42%	50.000.000	45%	50.000.000	47%	50.000.000	50%	50.000.000	50%	50.000.000	DINAS PMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	DINAS PMPTSP

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang taat pada aturan	60%	65%	452.352.000	70%	452.352.000	75%	452.352.000	80%	452.352.000	80%	452.352.000	DINAS PMPTSP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.787.972.774	100%	4.787.972.774	100%	4.787.972.774	100%	4.787.972.774	100%	4.787.972.774	DINAS PMPTSP
19	<b>Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga</b>													
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	100%	100%	503.348.500	100%	503.348.500	100%	503.348.500	100%	503.348.500	100%	503.348.500	DINAS PORAPARBUD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi	1 Medali	1 Medali	645.740.950	1 Medali	645.740.950	1 Medali	645.740.950	1 Medali	645.740.950	1 Medali	645.740.950	DINAS PORAPARBUD
20	<b>Urusan pemerintahan bidang statistik</b>													
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	40%	50%	160.000.000	60%	60.000.000	80%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	KOMINFO
21	<b>Urusan pemerintahan bidang persandian</b>													
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tanda Tangan Elektronik ( TTE )	2 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	25.000.000	16 Perangkat Daerah	25.000.000	24 Perangkat Daerah	25.000.000	31 Perangkat Daerah	25.000.000	31 Perangkat Daerah	25.000.000	KOMINFO
22	<b>Urusan pemerintahan bidang kebudayaan</b>													
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	jumlah pengunjung pameran kebudayaan	30 Orang	30 Orang	68.242.250	30 Orang	68.242.250	30 Orang	68.242.250	30 Orang	68.242.250	30 Orang	68.242.250	DINAS PORAPARBUD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase lembaga seni dengan tatakelola yang baik	100%	100%	64.475.000	100%	64.475.000	100%	64.475.000	100%	64.475.000	100%	64.475.000	DINAS PORAPARBUD
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase jumlah cagar budaya yang terjaga/dalam kondisi baik	100%	100%	46.922.000	100%	46.922.000	100%	46.922.000	100%	46.922.000	100%	46.922.000	DINAS PORAPARBUD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Benda Bersejarah Yang Terkumpul Dalam Museum	70 Buah	70 Buah	17.217.700	70 Buah	17.217.700	70 Buah	17.217.700	70 Buah	17.217.700	70 Buah	17.217.700	DINAS PORAPARBUD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
23	<b>Urusan pemerintahan bidang perpustakaan</b>													
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam setahun	0,30%	0,32%	966.793.000	0,33%	987.818.000	0,34%	807.491.800	0,36%	810.099.316	0,36%	810.099.316	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	<b>Urusan pemerintahan bidang kearsipan</b>													
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD menerapkan arsip secara baku sesuai standar kearsipan	6%	23%	363.863.000	32%	365.289.872	45%	366.188.872	58%	366.806.872	58%	366.806.872	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	7%	9%	37.000.000	11%	37.000.000	13%	37.000.000	14%	37.000.000	14%	37.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.168.095.942	100%	4.145.644.070	100%	4.325.071.270	100%	4.321.845.754	100%	4.321.845.754	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	<b>Urusan Pilihan</b>													
25	<b>Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan</b>													
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton/tahun)	6.829,18	6.965,76	298.500.000	7.105,08	373.500.000	7.247,18	398.500.000	7.392,12	430.500.000,00	7.392,12	430.500.000	DKPPP
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)	9.118,61	9.300,98	404.800.000	9.487,00	509.800.000	9.676,74	509.800.000	9.870,27	509.800.000	9.870,27	509.800.000	DKPPP
	Program Pengawasan Sumber Daya kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan UU yang berlaku (%)	100%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	DKPPP
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	3.555,08	3.626,19	128.000.000	3.698,71	128.000.000	3.771,68	128.000.000	3.848,14	128.000.000	3.848,14	128.000.000	DKPPP
26	<b>Urusan pemerintahan bidang pariwisata</b>													
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	45.413 Orang	45.413 Orang	45.000.000	45.413 Orang	45.000.000	45.413 Orang	45.000.000	45.413 Orang	45.000.000	45.413 Orang	45.000.000	DINAS PORAPARBUD
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang di promosikan (%)	100%	100%	116.125.000	100%	116.125.000	100%	116.125.000	100%	116.125.000	100%	116.125.000	DINAS PORAPARBUD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	jumlah hak kekayaan daerah yang dipatenkan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PORAPARBUD
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tempat wisata yang terkelola	100%	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	DINAS PORAPARBUD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.886.402.963	100%	3.886.402.963	100%	3.886.402.963	100%	3.886.402.963	100%	3.886.402.963	DINAS PORAPARBUD
27	<b>Urusan pemerintahan bidang pertanian</b>													
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	94,30%	19,30%	4.860.218.900	20%	4.862.818.900	25%	4.792.918.900	40%	4.792.918.900	94,30%	4.792.918.900	DKPPP
	Program Penyediaan Dan Pengembangan PraSarana Pertanian	Produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	14,2%	3%	150.000.000	3,5%	240.000.000	3,7%	140.000.000	4%	140.000.000	14,2%	140.000.000	DKPPP
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase populasi hewan yang telah di vaksin	77%	15%	227.000.000	17%	270.000.000	20%	270.000.000	25%	270.000.000	77%	270.000.000	DKPPP
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanganan OPT tanaman pangan dan hortikultura yang tertanggulangi akibat bencana	45%	10%	20.000.000	10%	50.000.000	10%	20.000.000	10%	20.000.000	45%	20.000.000	DKPPP
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Ketepatan waktu pertimbangan teknis perizinan usaha pertanian	60%	62%	30.000.000	65%	30.000.000	70%	30.000.000	80%	30.000.000	80%	30.000.000	DKPPP
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas (pemula, lanjut, madya, utama)	62%	10%	1.534.145.000	15%	1.534.145.000	17%	1.534.145.000	20%	1.534.145.000	20%	1.534.145.000	DKPPP
28	<b>Urusan pemerintahan bidang perdagangan</b>													

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi	(4 hari/ dokumen)	100%	33.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	33.000.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang dimanfaatkan dan Jumlah Sarana Perdagangan yang dibangun	63 Pasar Aktif - 14 pasar dibangun	65 Pasar Aktif (60 pasar aktif = 79,4 %)	129.999.860,00	68 Pasar Aktif (61 pasar aktif = 96,8 %)	129.999.860,00	73 Pasar Aktif (62 pasar aktif = 98,4 %)	129.999.860,00	77 Pasar Aktif (63 pasar aktif = 100 %)	129.999.860,00	77 Pasar Aktif (63 pasar aktif = 100 %)	129.999.860,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
				- Bangun 3 pasar ( 21,4 %)		- Bangun 3 pasar ( 21,4 %)		- Bangun 4 pasar ( 28,6 %)		- Bangun 4 pasar ( 28,6 %)		- Bangun 4 pasar ( 28,6 %)		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang harganya stabil	48 Laporan	96 Laporan	406.000.000,00	96 Laporan	406.000.000,00	96 Laporan	406.000.000,00	96 Laporan	406.000.000,00	96 Laporan	406.000.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur yang sudah ditera	2.339 unit	60%	120.889.100,00	70%	120.889.100,00	80%	120.889.100,00	90%	120.889.100,00	90%	120.889.100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Impor barang dan Jasa kalteng (juta US\$)			-		-		-		-		-	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi produk unggulan Kalteng (kegiatan)	40 UMKM, 5 Dokumen, 20 Orang  Jumlah kegiatan promosi selama 4 tahun	40 UMKM, 5 Dokumen, 20 Orang		40 UMKM, 5 Dokumen, 20 Orang		40 UMKM, 5 Dokumen, 20 Orang		40 UMKM, 5 Dokumen, 20 Orang		40 UMKM, 5 Dokumen, 20 Orang		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	45 Orang/ Bulan, 2 Dokumen, 18 Orang, 2 Paket, 30 Laporan, 90 Orang/Bulan, 31 Unit	45 Orang/ Bulan, 2 Dokumen, 18 Orang, 2 Paket, 30 Laporan, 90 Orang/Bulan, 31 Unit	5.483.897.026,00	45 Orang/ Bulan, 2 Dokumen, 18 Orang, 2 Paket, 30 Laporan, 90 Orang/Bulan, 31 Unit	5.483.897.026,00	45 Orang/ Bulan, 2 Dokumen, 18 Orang, 2 Paket, 30 Laporan, 90 Orang/Bulan, 31 Unit	5.483.897.026,00	45 Orang/ Bulan, 2 Dokumen, 18 Orang, 2 Paket, 30 Laporan, 90 Orang/Bulan, 31 Unit	5.483.897.026,00	45 Orang/ Bulan, 2 Dokumen, 18 Orang, 2 Paket, 30 Laporan, 90 Orang/Bulan, 31 Unit	5.483.897.026,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
29	<b>Urusan pemerintahan bidang perindustrian</b>													
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Industri	12 Dokumen	1 dokumen (Dokumen SK Pelaksana TIM Kegiatan RPIK)	135.030.500,00	1 dokumen (dokumen Pernyertifikatan /Legalitas Lahan Industri )	135.030.500,00	2 dokumen (2 dokumen pembentukan SK kelompok IKM 2 Kelompok IKM)	135.030.500,00	3 dokumen (3 dokumen pembentukan SK kelompok IKM 3 Kelompok IKM)	135.030.500,00	3 dokumen (3 dokumen pembentukan SK kelompok IKM 3 Kelompok IKM)	135.030.500,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Industri yang terdaftar di aplikasi SINAS	data industri Jumlah industri saat ini 670 -jumlah industri terdaftar di SIINAS masih belum ada terdaftar)	21 IKM 3%	243.047.900,00	34 IKM 5%	243.047.900,00	34 IKM 5%	243.047.900,00	67 IKM 10	243.047.900,00	67 IKM 10	243.047.900,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase Izin Usaha Industri yang terfasilitasi	670 dokumen (jumlah industri yg diinginkan spy bisa terfasilitasi)	13 IKM 2%		26 IKM 4%		41 IKM 6%		54 IKM 8%		54 IKM 8%		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
30	<b>Urusan pemerintahan bidang transmigrasi</b>													
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman transmigrasi yang Mandiri			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	DINAS NAKERTRANS
	<b>Unsur pendukung Urusan Pemerintahan</b>													
31	<b>Unsur Sekretariat Daerah</b>													

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase Hasil Koordinasi Perekonomian yang terlaksana 2. Persentase Paket Barang/Jasa yang di tender/ seleksikan 3. Persentase Hasil Koordinasi Administrasi Pembangunan yang terlaksana	100%	100%	905.309.300	100%	905.309.300	100%	905.309.300	100%	905.309.300	100%	905.309.300	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Hasil Pelayanan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat 2. Persentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Presentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	100%	100%	7.150.178.700	100%	7.150.178.700	100%	7.150.178.700	100%	7.150.178.700	100%	7.150.178.700	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	21.184.210.774	100%	21.184.210.774	100%	21.184.210.774	100%	21.184.210.774	100%	21.184.210.774	Sekretariat Daerah
32	<b>Unsur Sekretariat DPRD</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	625.058.110.873	100%	650.571.427.938	100%	733.338.036.926	100%	787.717.695.543	100%	787.725.695.543	Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan yang ditetapkan	85%	85%	204.456.174.422	85%	212.962.280.111	85%	240.559.483.107	85%	258.678.702.646	85%	258.678.702.646	Sekretariat DPRD
		Persentase Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	200.002.338.546	100%	208.508.444.235	100%	236.105.647.231	100%	254.224.866.770	100%	254.224.866.770	Sekretariat DPRD
	<b>Unsur penunjang urusan pemerintahan</b>													
33	<b>Unsur perencanaan</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.209.559.876	100%	5.209.559.876	100%	5.209.559.876	100%	5.209.559.876	100%	5.209.559.876	Bappeda

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase dokumen perencanaan yang direviu oleh inspektorat, 2. Persentase ketepatan waktu penetapan/pembuatan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Persentase perangkat daerah yang menyerahkan dokumen/laporan untuk hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (dokumen)	100%	100%	989.767.000	100%	989.767.000	100%	989.767.000	100%	989.767.000	100%	989.767.000	Bappeda
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	1.285.800.000	100%	1.185.800.000	100%	1.185.800.000	100%	1.185.800.000	100%	1.185.800.000	Bappeda
34	<b>Unsur keuangan</b>													
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya data BMD	9 Dokumen/ Laporan	9 Dokumen/ Laporan	837.477.676	9 Dokumen/ Laporan	1.034.060.231	9 Dokumen/ Laporan	1.296.690.095	9 Dokumen/ Laporan	1.652.659.442	9 Dokumen/ Laporan	1.652.659.442	BPKAD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	118.065.229.258	WTP	124.741.678.208	WTP	134.942.567.358	WTP	141.136.687.699	WTP	141.136.687.699	BPKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD	99,22%	100%	2.068.612.853	100%	2.361.199.144	100%	2.707.220.738	100%	3.118.170.169	100%	3.118.170.169	BPKAD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	48.963.800.199	100%	58.005.263.827	100%	74.792.926.215	100%	85.960.106.636	100%	85.960.106.636	BPKAD
35	<b>Unsur kepegawaian</b>													

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi 2. Persentase jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 3. Persentase jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 4. Persentase Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 5. Persentase Tingkat Disiplin ASN 6. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal 7. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 8. Persentase Peningkatan Kinerja ASN	100%	100%	2.081.300.000	100%	2.081.300.000	100%	2.081.300.000	100%	2.081.300.000	100%	2.081.300.000	BKPSDM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.029.612.705	100%	4.029.612.705	100%	4.029.612.705	100%	4.029.612.705	100%	4.029.612.705	BKPSDM
36	<b>Unsur penelitian dan pengembangan</b>													
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan	100%	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	Bappeda
37	<b>Unsur pengawasan urusan pemerintahan</b>													
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	74,44%	80%	1.539.200.000	85,00%	1,539,200,000	90,00%	1,539,200,000	95,00%	1,539,200,000	95,00%	1,539,200,000	INSPEKTORAT
		Persentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (RIKSUS)	100%	100%		100%		100%		100%				
		Persentase Desa Beresiko Tinggi yang Diperiksa	41,86%	50%		70,00%		80,00%		100,00%				

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level APIP	Level 2	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		INSPEKTORAT
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina SPIPTingkat Maturitas SPIP	0%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.961.775.736	100%	5.961.775.736	100%	5.961.775.736	100%	5.961.775.736	100%	5.961.775.736	INSPEKTORAT
<b>Unsur kewilayahan</b>														
38	<b>Kecamatan Dusun Hilir</b>													
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Kecamatan Dusun Hilir
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan		100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	Kecamatan Dusun Hilir
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100%	2.116.672.615	100%	2.116.672.615	100%	2.116.672.615	100%	2.116.672.615	100%	2.116.672.615	Kecamatan Dusun Hilir
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	785.000.000	100%	785.000.000	100%	785.000.000	100%	785.000.000	100%	785.000.000	Kecamatan Dusun Hilir
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		100%	48.500.000	100%	48.500.000	100%	48.500.000	100%	48.500.000	100%	48.500.000	Kecamatan Dusun Hilir
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana		100%	26.300.000	100%	26.300.000	100%	26.300.000	100%	26.300.000	100%	26.300.000	Kecamatan Dusun Hilir
39	<b>Kecamatan Dusun Selatan</b>													

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.881.169.407	100%	5.811.169.407	100%	5.811.169.407	100%	5.802.169.407	100%	5.802.169.407	Kecamatan Dusun Selatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	66,67%	66,67%	7.000.000	75,00%	7.000.000	75,00%	7.000.000	100,00%	7.000.000	100,00%	7.000.000	Kecamatan Dusun Selatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Kegiatan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	75,00%	75,00%	2.000.000	75,00%	2.000.000	75,00%	2.000.000	90,00%	2.000.000	90,00%	2.000.000	Kecamatan Dusun Selatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%	75,00%	1.490.200.000	87,50%	1.560.200.000	87,50%	1.560.200.000	87,50%	1.560.200.000	87,50%	1.560.200.000	Kecamatan Dusun Selatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	80,00%	80,00%	25.000.000	83,33%	25.000.000	87,50%	25.000.000	87,50%	25.000.000	87,50%	25.000.000	Kecamatan Dusun Selatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	66,67%	66,67%	7.000.000	75,00%	7.000.000	75,00%	7.000.000	100,00%	7.000.000	100,00%	7.000.000	Kecamatan Dusun Selatan
40	<b>Kecamatan Dusun Utara</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.753.197.097	100%	2.753.197.097	100%	2.753.197.097	100%	2.753.197.097	100%	2.753.197.097	Kecamatan Dusun Utara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kecamatan Dusun Utara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	Kecamatan Dusun Utara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	755.724.000	100%	755.724.000	100%	755.724.000	100%	755.724.000	100%	755.724.000	Kecamatan Dusun Utara

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Dusun Utara
41	<b>Kecamatan Gunung Bintang Awai</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.032.074.970	100%	3.032.074.970	100%	3.032.074.970	100%	3.032.074.970	100%	3.032.074.970	Kecamatan Gunung Bintang Awai
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	100%	100%	186.491.500	100%	186.491.500	100%	186.491.500	100%	186.491.500	100%	186.491.500	Kecamatan Gunung Bintang Awai
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	80%	80%	56.000.000	75%	56.000.000	75%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	Kecamatan Gunung Bintang Awai
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	80%	80%	24.000.000	75%	24.000.000	75%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	Kecamatan Gunung Bintang Awai
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	Kecamatan Gunung Bintang Awai
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	15.014.290	100%	15.014.290	100%	15.014.290	100%	15.014.290	100%	15.014.290	Kecamatan Gunung Bintang Awai
42	<b>Kecamatan Jenamas</b>													
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kecamatan Jenamas
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Jenamas
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.406.453.951	100%	2.406.453.951	100%	2.406.453.951	100%	2.406.453.951	100%	2.406.453.951	Kecamatan Jenamas

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	665.000.000	100%	665.000.000	100%	665.000.000	100%	665.000.000	100%	665.000.000	Kecamatan Jenamas
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Kecamatan Jenamas
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang Terlaksana	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Kecamatan Jenamas
43	<b>Kecamatan Karau Kuala</b>													
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	0%	0%	-	100%	10.000.000	100%	21.000.000	100%	20.000.000	0%	-	Kecamatan Karau Kuala
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.598.446.253	100%	2.593.446.253	100%	2.622.446.253	100%	2.670.446.253	100%	2.733.446.253	Kecamatan Karau Kuala
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	100%	727.975.000	100%	587.975.000	100%	577.975.000	100%	517.975.000	100%	517.975.000	Kecamatan Karau Kuala
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	100%	30.750.000	100%	135.750.000	100%	80.750.000	100%	115.750.000	100%	80.750.000	Kecamatan Karau Kuala
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana	100%	100%	40.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	Kecamatan Karau Kuala
44	<b>Unsur pemerintahan umum</b>													
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	100%	100%	110.814.250	100%	110.814.250	100%	110.814.250	100%	110.814.250	100%	110.814.250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian efektifitas penguatan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	100%	1.842.347.000	100%	1.842.347.000	100%	1.842.347.000	100%	1.842.347.000	100%	1.842.347.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSEUD yang telah ditangani ( Persentase kasus yang telah ditangani)	100%	100%	59.234.340	100%	59.234.340	100%	59.234.340	100%	59.234.340	100%	59.234.340	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif ( %)	100%	100%	548.949.800	100%	548.949.800	100%	548.949.800	100%	548.949.800	100%	548.949.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.889.148.128,00	100%	2.889.148.128,00	100%	2.889.148.128,00	100%	2.889.148.128,00	100%	2.889.148.128,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

#### **8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan tujuan dan sasaran RPD.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Kabupaten Barito Selatan di masa kini maupun yang akan datang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKD merupakan indikator sasaran dari RPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD bisa dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026**

No.	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	TARGET TAHUN				Kondisi Akhir (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,30 (%)	2,50 Persen (%)	2,70 Persen (%)	2,90 Persen (%)	3,10 Persen (%)	3,10 Persen (%)
2	Indeks Gini	0.286 Angka	0.276 Angka	0.266 Angka	0.256 Angka	0.246 Angka	0,246 Angka
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,64 Poin	72,90 Poin	73,17 Poin	73,43 Poin	73,70 Poin	73,70 Poin
4	Persentase Penduduk Miskin	4,62 (%)	4,52 Persen (%)	4,42 Persen (%)	4,32 Persen (%)	4,22 Persen (%)	4,22 Persen (%)
5	Indeks Resiko Bencana	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka
6	Indeks Reformasi Birokrasi	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,22 (%)	70,30 Persen (%)	70,35 Persen (%)	70,40 Persen (%)	70,50 Persen (%)	70,50 Persen (%)
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,16 (%)	4,00 Persen (%)	3,90 Persen (%)	3,70 Persen (%)	3,50 Persen (%)	3,50 Persen (%)
9	Persentase Penegakkan Perda	80 (%)	85 (%)	90 (%)	95 (%)	100 (%)	100 (%)

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026**

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Inflasi	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen
2	PDRB Per Kapita	58,82 Juta	59,25 Juta	60,14 Juta	61,08 Juta	61,97 Juta	061,97 Juta
3	PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	82,8 Milyar Rupiah	85,8 Milyar Rupiah	87,8 Milyar Rupiah	89,8 Milyar Rupiah	90,8 Milyar Rupiah	70,8 Milyar Rupiah
4	Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	593 Milyar Rupiah	611 Milyar Rupiah	629 Milyar Rupiah	647 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah
5	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi mantap	52,22 Persen	53,25 Persen	54,39 Persen	55,58 Persen	56,81 Persen	56,81 Persen
6	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	48,50 Persen	49,42 Persen	50,54 Persen	51,80 Persen	53,15 Persen	53,15 Persen
7	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	119 jumlah	110 jumlah	102 jumlah	92 jumlah	83 jumlah	83 jumlah
8	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai	47,00 Persen	50,00 Persen	55,00 Persen	60,00 Persen	65,00 Persen	65,00 Persen
9	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
10	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
11	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
12	Timbunan Sampah yang Ditangani	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
13	Ketaatan Terhadap RTRW	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
14	Angka Kriminalitas yang Tertangani	5,13 Permiliad (persepuluhribu)	4,92 Permiliad (persepuluhribu)	4,81 Permiliad (persepuluhribu)	4,29 Permiliad (persepuluhribu)	3,69 Permiliad (persepuluhribu)	3,69 Permiliad (persepuluhribu)
15	Persentase gangguan keteriban umum yang ditangani	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen
16	Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen)	75 Persen					
17	Tingkat Pengangguran	5,09 Persen	5,01 Persen	4,93 Persen	4,86 Persen	4,81 Persen	4,81 Persen
18	Persentase PMKS yang Tertangani	75,05 Persen	80,05 Persen	85,05 Persen	90,05 Persen	95,05 Persen	95,05 Persen
19	Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	37,76 Persen	42,76 Persen	47,76 Persen	52,76 Persen	57,76 Persen	57,76 Persen
20	Rasio Rumah Layak Huni	19,00 Persen	19,01 Persen	19,02 Persen	19,03 Persen	19,04 Persen	19,04 Persen
21	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,30 Persen	0,23 Persen	0,15 Persen	0,08 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen
22	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,15 Persen	87,15 Persen	91,15 Persen	94,15 Persen	96,15 Persen	96,15 Persen
23	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	64,59 Persen	66,59 Persen	68,59 Persen	70,59 Persen	72,59 Persen	72,59 Persen
24	Cakupan Pelayanan Bencana	29,41 Persen	47,06 Persen	64,71 Persen	82,35 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
25	Persentase Penurunan Jumlah Titik Api (Hot Spot)	100,00 Persen					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
26	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen
27	Opini BPK	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria
28	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	70,23 Indeks	71,55 Indeks	72,92 Indeks	74,35 Indeks	75,18 Indeks	75,18 Indeks
29	Nilai SAKIP	CC Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	BB Kriteria	BB Kriteria
30	Nilai LPPD	Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria
31	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,75 Persen	6,00 Persen	6,50 Persen	7,00 Persen	7,50 Persen	7,50 Persen
32	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
33	Indeks Desa Membangun	0,6522(berkembang) Indeks	0,6722(berkembang) Indeks	0,6822(berkembang) Indeks	0,6922(berkembang) Indeks	0,7082(maju) Indeks	0,7082(maju) Indeks
34	Rasio Penduduk ber-KTP	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen
35	Jumlah Kajian Kelitbangan	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian
36	Indeks SPBE	2,20 Indeks	2,50 Indeks	2,80 Indeks	3,00 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks
37	Rata-rata Lama Sekolah	8,95 Tahun	9,05	9,15 Tahun	9,25 Tahun	9,35 Tahun	9,35 Tahun
38	Harapan Lama Sekolah	12,66 Tahun	12,77 Tahun	12,88 Tahun	12,99 Tahun	13,11 Tahun	13,11 Tahun
39	Umur Harapan Hidup	67,19 Tahun	67,29 Tahun	67,39 Tahun	67,49 Tahun	67,59 Tahun	67,59 Tahun
40	Produktivitas Total Daerah	127,43 juta rupiah	129,34 juta rupiah	131,28 juta rupiah	133,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
**2023-2026**



No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
41	Persentase Wirausaha Muda	37,00 Persen	41,00 Persen	45,00 Persen	48,00 Persen	51,00 Persen	51,00 Persen
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	32,20 Indeks	33,36 Indeks	34,45 Indeks	35,58 Indeks	36,30 Indeks	36,30 Indeks
43	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,78 (%)	91,80 Persen (%)	91,82 Persen (%)	91,84 Persen (%)	91,86 Persen (%)	91,86 Persen (%)
44	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8,00 Festival	10,00 Festival	12,00 Festival	14,00 Festival	16,00 Festival	16,00 Festival
45	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	22,56 Persen	23,53 Persen	25,71 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen

**Tabel 8.3**

**Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026**

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>I.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,3	2,50	2,70	2,9	3,1	3,10
2.	Laju Inflasi (%)	3,58	3,25	3,19	3,1	3,05	3,05
3.	PDRB per Kapita (Jutaan Rp)	42.121	47.975	51.229	54.720	58.474	58.474
4.	Indeks Gini	0,278	0,273	0,270	0,268	0,265	0,265
5.	Angka Kemiskinan (%)	5,04	4,98	4,93	4,88	4,82	4,82
6.	Indeks Pembangunan Manusia	70,54	70,94	71,34	71,74	72,14	72,14
7.	Angka Pengangguran Terbuka (%)	2,12	2,08	2,04	2,00	1,92	1,92
8.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,95	9,15	9,25	9,45	9,65	9,65
10.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,65	12,73	12,80	12,88	12,95	12,95
11.	Angka Melek Huruf	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	10,75
12.	Umur Harapan Hidup	67,19	67,20	67,22	67,24	67,26	67,26
13.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	20,72	21,06	21,41	21,75	22,10	22,10

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>II.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
1.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)	53,55	53,88	54,22	54,56	54,89	54,89
2.	Desa Swasembada (%)	19,35	24,19	30,65	35,48	40,32	40,32
3.	Rasio Ketergantungan	43,17	43,37	43,67	43,97	44,17	44,17
<b>III.</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR</b>						
<b>A.</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>						
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	69,61	73,89	78,45	83,28	88,41	88,41
1.2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	98,32	98,32	98,52	98,72	99,00	99,00
1.3.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	89,52	92,52	94,52	96,52	98,52	98,52
1.4.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,28	0,28	0,18	0,18	0,08	0,08
1.5.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,39	0,39	0,29	0,29	0,19	0,19
1.6.	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100
1.7.	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
1.8.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	92,72	93,72	94,72	95,72	96,72	96,72
1.9.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	92,57	93,57	94,57	95,57	96,57	96,57

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>						
2.1.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	93,16	95,31	97,51	99,76	100	100
2.2.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,57	96,77	96,98	97,19	97,40	97,40
2.3.	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100
2.4.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	0,19	2,19	4,19	6,19	8,19	8,19
2.5.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	57,75	59,80	61,93	64,14	66,42	66,42
2.6.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
2.7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100
2.8.	Cakupan Kunjungan Bayi	100	100	100	100	100	100
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	373,96	374,96	375,96	376,96	377,96	377,96
3.2.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	2035,49	2036	2036,50	2037	2037,50	2037,50
3.3.	Rumah Tangga Bersanitasi	13,38	14,38	15,38	16,38	17,38	17,38

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
3.4.	Kawasan Kumuh	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
3.5.	RTH per Satuan Luas Wilayah	25,31	25,81	26,31	26,81	27,31	27,31
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>						
4.1.	Rumah Tangga Penguna Air Bersih	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00
4.2.	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	0,013	0,011	0,009	0,007	0,0065	0,0065
4.3.	Rumah Layak Huni	2,245	96,84	97,91	98,67	100,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>						
5.1.	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
5.2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	75	75	75	75	75	75
5.3.	Angka Tunawisma	0,45	0,45	0,43	0,40	0,40	0,40
5.4.	Angka Prostitusi	1,25	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15
5.5.	Persentase Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15	0,60
5.6.	Persentase Angka Kasus Perjudian	0,70	0,68	0,66	0,60	0,60	6,65
5.7.	Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adektif	6,75	6,70	6,68	6,65	6,65	7,00

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>						
6.1.	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	39,00	48,00	64,00	80,00	90,00	90,00
6.3.	Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	40,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
6.4.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	83,17	84,31	85,27	86,52	88,17	88,17
6.5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.6.	Persentase RTLH Masyarakat Miskin yang ditangani	65,75	97,46	100,00	100,00	100,00	100,00
6.7.	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.8.	Persentase Manula Potensial yang Mendapat Perlindungan	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.9.	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>B.</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR</b>						
<b>1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>						
1.1.	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	9,07	26,17	27,22	28,62	34,62	34,62
1.2.	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	33,33	34,91	35,19	36,33	37,79	37,79
1.3.	Persentase Perusahaan yang membuat & Mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan	28,38	31,94	35,71	39,71	39,71	39,71
1.4.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	5	5	5	4	4	4
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
2.1.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,38	54,88	55,38	55,88	56,38	56,38
2.2.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	24,14	24,50	25,00	25,45	26,00	26,00
2.3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31,30	31,50	31,70	31,90	32,10	32,10
<b>3.</b>	<b>Pangan</b>						
3.1.	Rasio Tingkat Konsumsi Energi	1 : 0,92	1 : 0,94	1 : 0,96	1 : 0,98	1 : 1	1 : 1
3.2.	Rasio Tingkat Konsumsi Protein	1 : 1,44	1 : 1,39	1 : 1,34	1 : 1,29	1 : 1,24	1 : 1,24
3.3.	Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kap/hari)	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	125,00

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
3.4.	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kg)	12.000	17.000	22.000	27.000	32.000	32.000
3.5.	Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	66,67	77,78	77,78	88,89	88,89	88,89
<b>4.</b>	<b>Pertanahan</b>						
4.1.	Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	1,017	1,117	1,217	1,317	1,417	1,417
4.2.	Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Konflik Lahan yang Ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
5.1.	Persentase Pengurangan Sampah	20,00	22,00	24,00	26,00	27,00	27,00
5.2.	Persentase Penanganan Sampah	41,28	42,44	43,62	44,84	45,13	45,13
5.3.	Indeks Kualitas Air	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
5.4.	Indeks Kualitas Udara	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
5.5.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
5.6.	Timbunan Sampah yang Ditangani	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
<b>6.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
6.1.	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Cakupan Penerbitan KTP	99,98	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	95,03	96,03	97,03	98,03	99,03	99,03

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.4.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5.	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	70,00	75,00	78,00	81,00	85,00	85,00
<b>7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
7.1.	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.2.	Persentase Perempuan yang Aktif di Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.3.	Persentase Desa Berkriteria Baik	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4.	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69,86	70,71	71,46	72,12	73,07	73,07
8.2.	Cakupan <i>unmet need</i>	15,51	14,63	13,86	13,20	12,62	12,62
8.3.	Ratio ASFR 15-19 Tahu	48,48	48,56	48,32	48,11	47,94	47,94
<b>9.</b>	<b>Perhubungan</b>						
9.1.	Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
9.2.	Persentase Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	65,46	65,92	66,38	66,84	67,30	67,30
9.3.	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	4,50	4,00	3,00	2,50	2,00	2,00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
<b>11.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>						
11.1.	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
11.2.	Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi dan Keuangan, Jumlah Pelanggan yang dilayani	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
<b>12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
12.1	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Investasi Daerah	24,38	25,79	26,5	28,62	28,62	28,62
<b>13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						
13.1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	60,00	60,00	60,00	60,00	75,00	75,00
13.2	Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi	2,50	2,50	2,75	2,75	3,00	3,00
13.3	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
13.4	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,17

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>14.</b>	<b>Statistik</b>						
14.1.	Persentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Sektoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15.</b>	<b>Persandian</b>						
15.1.	Persentase Berita Sandi Daerah yang diamankan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>16.</b>	<b>Kebudayaan</b>						
16.1.	Persentase Benda dan Situs Cagar Budaya yang dikelola	40,00	60,00	60,00	80,00	100,00	100,00
16.2.	Persentase Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan	86,00	89,00	93,00	95,00	100,00	100,00
16.3.	Persentase Pengelolaan Situs Bersejarah	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
<b>17.</b>	<b>Perpustakaan</b>						
17.1.	Persentase Jenis Koleksi Perpustakaan Umum Daerah	68,17	69,67	71,17	72,67	74,17	74,17
17.2.	Persentase Perpustakaan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan yang dikembangkan	17,65	19,44	21,62	23,68	25,64	25,64
<b>18.</b>	<b>Kearsipan</b>						
18.1	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, BUMN, BUMD, Perguruan tinggi yang Tertib Arsip	66,30	72,57	78,85	85,13	91,40	91,40
18.2	Persentase OPD, Kelurahan, Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD yang Dibina/ Dilatih	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	85,71

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>C.</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>						
<b>1.</b>	<b>Pariwisata</b>						
1.1.	Destinasi Wisata yang Berkualitas (%)	7,40	24,07	42,59	66,67	100,00	100,00
1.2.	Persentase Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi / Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	41,45	45,60	50,16	55,17	60,69	60,69
1.3.	Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi	5,00	10,00	25,00	35,00	50,00	50,00
<b>2.</b>	<b>Pertanian</b>						
2.1.	Peningkatan Kelompok Tani (%)	2,10	2,44	2,51	2,57	2,62	2,62
2.2.	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (Sesuai kriteria Permentan Nomor 91 Tahun 2013)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Perdagangan</b>						
3.1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Alat UTP	20,00	16,00	14,00	8,00	4,00	4,00
3.2.	Persentase Penurunan Peredaran Barang dan Jasa yang tidak sesuai Standar	10,81	8,11	7,50	5,00	2,50	2,50
3.3.	Persentase tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif	23,53	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>4.</b>	<b>Perindustrian</b>						
4.1.	Persentase Peningkatan IKM yang Berbasis Teknologi	74,74	75,89	76,92	79,47	82,39	82,39
4.2.	Persentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM	14,12	15,46	16,07	16,15	16,56	16,56
<b>5.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
5.1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	724,77	768,26	814,36	863,22	915,01	915,01
5.2.	Persentase Nelayan yang Naik Kelas	25,50	28,87	34,43	37,60	40,00	40,00
5.3.	Persentase Pembudidaya Ikan yang Naik Kelas	40,55	44,29	48,,34	53,09	56,50	56,50
<b>D</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>						
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
1.1.	Persentase Program RKPD yang dijabarkan dalam APBD Tiap Tahunnya	75,00	77,00	79,00	80,00	82,00	82,00
1.2.	Persentase Keselarasan RKPD terhadap PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RKP	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
1.4.	Persentase Keselarasan Renstra PD terhadap RPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00
1.6.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
	daerah yang lengkap, akurat dan Tepat Waktu						
<b>2.</b>	<b>Keuangan</b>						
2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
<b>3.</b>	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>						
3.1.	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	63,50	65,62	66,25	68,75	75,00	75,00
3.3.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	13,33	17,14	20,00	22,20	24,44	24,44
<b>4.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>						
4.1.	Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
**RPD**  
 KABUPATEN BARITO SELATAN  
 2023-2026



NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
<b>5.</b>	<b>Pengawasan</b>						
5.1.	% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan yang Material	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.2.	% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai ditindaklanjuti	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.3.	Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	9	8	7	6	5	5
5.4.	% Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5.	% OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>						
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja
6.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.3.	Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program

## **BAB IX** **PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Barito Selatan akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam sisa waktu implementasi perencanaan yang telah dirumuskan, bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai tujuan dan sasaran RPD.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu juga mempertimbangkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Selatan 2014-2035.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Selanjutnya RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode Kabupaten Barito Selatan selama satu tahun.

### **9.1. Pedoman Transisi**

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Dokumen RPD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pedoman perencanaan pembangunan, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Barito Selatan, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Setelah berakhirnya Dokumen RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan dan RPJM Nasional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Selanjutnya, RKPD Tahun 2027 merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

### **9.2. Kaidah Pelaksanaan**

RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dalam sisa waktu perencanaan ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar melakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026; dan
4. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam implementasi RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Bupati Barito Selatan,  
  
EDDY RAYA SAMSURI